



AKTUALISASI LAYANAN
PENDIDIKAN ISLAM
BAGI SISWA
MINORITAS MUSLIM DI BALI

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 113
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**AKTUALISASI LAYANAN
PENDIDIKAN ISLAM
BAGI SISWA
MINORITAS MUSLIM DI BALI**

Dr. H. Alaika M. Bagus Kurnia PS, S. Pd.I., M. Pd



AKTUALISASI LAYANAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SISWA MINORITAS MUSLIM DI BALI

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Global Aksara Pers*

ISBN: 978-623-462-417-5

xii + 224 hal.; Ukuran A5 (14,8 x 21 cm)

Cetakan Pertama, Agustus 2023

Copyright © Agustus 2023 Global Aksara Pers

Penulis : Dr. H. Alaika M. Bagus Kurnia PS, S. Pd.I., M. Pd
Penyunting : Prof. Dr. H. Muhammad Turhan Yani, M.A.
Desain kover : Tito Nanda Ramadhan
Layouter : Hamim Thohari Mahfudhillah

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penulis
dan penerbit.

Diterbitkan oleh:



CV. Global Aksara Pers
Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,
No. 282/JTI/2021
Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya
+628977416123/+628573269334
globalaksarapers.com



PRAKATA PENULIS

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan anugerah kepada kami sebagai penulis, juga demikian kepada siapapun para pembaca buku ini. Semoga Allah Swt selalu memberikan hidayah, memberikan ketambahan kecerdasan dan keilmuan yang bermanfaat, khususnya di bidang rumpun pendidikan Islam.

Keberadaan buku ini adalah hasil konversi dari disertasi penulis selama delapan (8) semester mengenyam pendidikan doctoral di UIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan rasa syukur yang sangat luar biasa, buku ini perlu dipublikasikan secara umum dengan mendaftarkan ISBN, agar buku ini juga mampu menjadi referensi bagi para civitas akademik yang lainnya. Juga demikian pada khususnya buku ini perlu menjadi panduan bagi pelaku pendidikan Islam, khususnya masyarakat minoritas muslim.

Kebutuhan literasi bagi pelaku pendidikan juga dirasa penting, sehingga buku ini juga memuat tiga bab sebagai gambaran umum bagaimana kondisi pelayanan pendidikan Islam dalam setting minoritas, hingga pendekatan teoritik dan

terakhir disajikan bagaimana model-model pelayanan pendidikan Islam setting minoritas. Sehingga sekelumit khazanah tersebut dapat dipaparkan dan dicoba untuk melakukan infiltrasi model pelayanan secara khusus.

Tidak lupa juga ucapan terima kasih teruntuk orang tua saya, Sayyid Agus Fahmi bin Muhammad Fathoni Basyaiban, juga Ibu Tutik Zahrotul Amaliyah yang selalu mendorong secara lahir dan batin untuk menyelesaikan disertasi hingga hasil konversinya dan menjadi buku ini. Juga demikian kedua mbah putriku, Hj. Ainur Rohmah dan Hj. Kartini (Fatimah al-Zahra) yang juga senantiasa mengulurkan doa-doa sucinya. Juga tidak lupa teruntuk saudara saya, Nanda Rizki Amaliyah, Bagas Wicaksono dan Alaina Ahmad Wildan Saifullah yang sampai saat ini juga setia menemani sharing, diskusi hingga melahirkan buku ini.

Beberapa orang yang paling banyak memberikan kontribusi untuk buku ini, Prof. Dr. Abd. Rachman Assegaf, M. Ag., juga kepada Prof. Dr. H. Muhammad Thohir, S. Ag., M. Pd. Selaku promotor disertasi juga menjadi korektor bagi buku ini. Demikian juga Prof. Dr. H. Muhammad Turhan Yani, M.A., sebagai penguji kelayakan naskah dari Universitas Negeri Surabaya sekaligus sebagai editor untuk buku ini, juga demikian kepada Dr. Muhamad Basyrul Muvid, S. Pd.I., M. Pd sebagai rekan dan sekaligus penyunting pada buku ini. Sehingga dari berbagai pihak yang terkait untuk mensukseskan hadirnya buku ini, semoga buku ini menjadi manfaat bagi para pembaca.

Akhirnya, prakata ini kami tutup dengan untaian doa, semoga para pemerhati dan pelaku pendidikan Islam di

lingkungan minoritas selalu semangat dan diberikan kekuatan untuk setia dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran PAI di lingkungannya, dan semakin banyak melahirkan generasi Islami yang soleh dan solehah. Amin





DAFTAR ISI

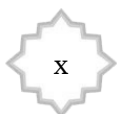
PRAKATA PENULIS.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDIDIKAN ISLAM DI WILAYAH BALI	1
BAB 2 LAYANAN PENDIDIKAN ISLAM.....	15
A. Konsep Layanan Pendidikan Islam	15
B. Dimensi Layanan Pendidikan Islam	22
C. Aspek Layanan Pendidikan Islam	27
D. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Layanan Pendidikan Islam.....	31
BAB 3 PARADIGMA DAN LAYANAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM KONTEKS MINORITAS.....	36
A. Paradigma Pendidikan Islam dalam Konteks Minoritas.....	36
1. Konsep Minoritas dan Desain Layanan Pendidikan Islam	36
2. Problematika Layanan Pendidikan Islam dalam Konteks Minoritas	42

3. Tantangan dan Hambatan Layanan Pendidikan Islam dalam Dimensi Minoritas .	47
B. Layanan Pendidikan Islam dalam Prespektif Pengaruh Minoritas, Kontak, dan Konstruksi Sosial.....	51
1. Layanan Pendidikan Islam dalam Perspektif Pengaruh Minoritas	51
2. Layanan Pendidikan Islam dalam Perspektif Kontak.....	61
3. Layanan Pendidikan Islam dalam Perspektif Konstruksi Sosial	69

BAB 4 EKSISTENSI SISWA MINORITAS MUSLIM DI DENPASAR BALI..... 74

BAB 5 AKTUALISASI LAYANAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SISWA MUSLIM MINORITAS DI DENPASAR BALI 90

A. Sistem Aktualisasi Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas di Denpasar Bali.....	91
1. Penanda Aktualisasi Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas di Denpasar Bali.....	91
2. Pemahaman Tentang Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas di Denpasar Bali.....	111
3. Argumen Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas di Denpasar Bali .	121



B. Sistem Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas di Denpasar Bali	129
1. Dasar Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas	129
2. Tujuan Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas di Denpasar Bali .	138
3. Sistem Pelayanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Minoritas Muslim di SMA/ SMK Denpasar, Bali	140

BAB 6 PRAKTIK LAYANAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SISWA MUSLIM MINORITAS DI DENPASAR BALI..... 149

A. Praktik Layanan Kurikulum Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas di Denpasar Bali	149
B. Praktik Layanan Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas di Denpasar Bali	154
C. Praktik Layanan Waktu dan Pembiasaan Pendidikan Islam di Denpasar Bali.....	164
D. Praktik Layanan Sarpras Pendidikan Islam bagi Siswa Minoritas Muslim Denpasar Bali ..	173
E. Praktik Layanan Kesiswaan bagi Siswa Minoritas Muslim di Denpasar Bali	176
F. Praktik Pembelajaran Pendidikan Islam bagi Siswa Minoritas Muslim di Denpasar Bali	179
G. Problematika Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas di Denpasar	

Bali.....	183
-----------	-----

BAB 7 MODEL LAYANAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SISWA MUSLIM MINORITAS DI DENPASAR BALI	195
1. <i>Desired Service</i> (Layanan yang Diinginkan)	197
2. <i>Sufficient Service</i> (Layanan yang Memadai)	201
3. <i>Predicted Service</i> (Layanan yang Diprediksi)	205
4. <i>Excellent Service</i> (Pelayanan Prima)	206
5. <i>Self Service</i> (Layanan Mandiri).....	209
DAFTAR PUSTAKA.....	215
BIOGRAFI PENULIS	223



BAB 1

PENDIDIKAN ISLAM DI WILAYAH BALI

Dengan lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 13.000 pulau, 1.331 suku, 652 bahasa daerah, 819 karya budaya dan 6 agama terdapat di Indonesia¹. Dengan modal keberagaman yang sangat kaya, Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk entitas sosial yang multikultural, termasuk dalam hal suku-bangsa, budaya dan agama atau kepercayaan. Umat Islam merupakan mayoritas diantara pemeluk agama lain seperti Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu.² Indonesia telah lama digambarkan sebagai negara dengan sejarah keragaman dan toleransi yang baik. Namun

¹ Ahmad Umar et al., “Does Opportunity to Learn Explain the Math Score Gap between Madrasah and Non-Madrasah Students in Indonesia?,” *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 41, no. 3 (September 30, 2022): 792–805, <https://doi.org/10.21831/cp.v41i3.40169>.

² Kompas Cyber Media, “Menag Sebut Mayoritas Muslim Indonesia Setuju dengan Pancasila,” KOMPAS.com, March 13, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/13/11584391/menag-sebut-mayoritas-muslim-indonesia-setuju-dengan-pancasila>.

bukan berarti beberapa masalah tidak ada, begitu pula masalah sosial, agama, budaya dan politik.³

Dalam konteks Bali, relasi antara komunitas Hindu dan muslim di Bali telah terekam secara apik dalam lintasan sejarah yang panjang. Sebagai sebuah hubungan antar manusia, ia kadang-kadang menjadi suatu kekuatan bagi keduanya, tetapi sisi lain, sebagai pengikut agama yang berbeda, ia menjadi suatu tantangan. Tantangan tersebut adalah bagaimana komunitas Muslim di Bali bisa menghormati tradisi keagamaan Hindu dan bagaimana pula komunitas Hindu menghormati komunitas Muslim. Penganut Hindu yang mayoritas (sekira 93 persen dari total jumlah penduduk Bali), acapkali “melibatkan” atau mengundang umat Islam untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan mereka, atau dalam kegiatan kemanusiaan yang seringkali tak dapat dipisahkan dengan peribadatan keagamaan mereka.⁴ Hal ini dilakukan sebagai tanda penghormatan Umat Hindu akan keberadaan Muslim di tanah leluhur mereka.

Suasana harmonis ini juga didukung oleh komitmen pemerintah untuk menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Komitmen Pemerintah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 29 (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

³ Beberapa persoalan yang menjangkiti Indonesia di antaranya kemiskinan, kesenjangan sosial, ketidakadilan sosial, intoleransi beragama, dan terkikisnya budaya lokal. Lihat Mochamad Syawie, "Kemiskinan dan kesenjangan sosial." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 16.3 (2011): 213-219; M. Enoch Markum, "Pengentasan kemiskinan dan pendekatan psikologi sosial." *Jurnal Ilmiah Psikologi* 1.1 (2009): 1-12.

⁴ Siti Raudhatul Jannah, "Kegalauan Identitas: Dilema Hubungan Muslimin dan Hindu di Bali." *Ulumuna* 16.2 (2012): 443-464.

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Di Bali, misalnya, jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 3.890,8 ribu jiwa dan tahun 2020 sebanyak 4.317,4 ribu jiwa.⁵ Adapun jumlah sekolah Islam di Bali tahun 2019-2020 hanya 46 yang terdiri dari 7 sekolah negeri dan 39 sekolah swasta.⁶ Kemudian, jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Provinsi, 2018/2019 dan 2019/2020 sebanyak 28.⁷ Hal ini tentu berbeda dengan di Jawa, Jawa Timur, misalnya, yang terdapat sebanyak 1.842 pada 2018-2019 dan 1.895 pada 2019-2020.⁸

Selain itu, dilansir dari data Kementerian Agama Provinsi Bali, jumlah penduduk yang beragama Islam pada tahun 2020 sebanyak 152.192, Hindu sebanyak 675.724, Kristen sebanyak 30.601, Budha 14.869, Katolik 14.827, dan Konghucu 212.⁹ Dari data tersebut, agama Islam masih tergolong minoritas dibanding jumlah total pemeluk Islam di negeri ini. Lebih dari itu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan sensus penduduk bahwa secara umum agama Islam adalah agama yang dianut oleh lebih dari 60 % penduduk di setiap provinsi kecuali provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Proporsi pemeluk Islam di Provinsi Bali hanya 13,37 persen.¹⁰ Lagi-lagi,

⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2021* (Jakarta: BPS Indonesia, 2020), 171.

⁶ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2021* ... 172.

⁷ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2021* ... 181.

⁸ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2021*.

⁹ Kementerian Agama Denpasar, Bali “Jumlah Umat Beragama di Kota Denpasar”, dalam <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/artikel/jumlah-umat-beragama-di-kota-denpasar>, diakses 25 Januari 2022.

¹⁰ Badan Pusat Statistik, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia* (Jakarta: BPS Indonesia, 2010), 11.

sebagaimana paparan data di muka, agama Islam masih tergolong minoritas di Bali dalam konteks penelitian ini.

Pada era pasca Reformasi, pasca tahun 1998, tatkala implementasi demokratisasi dan transparansi pada seluruh bidang menyebabkan munculnya politik identitas (*the rise of identity politics*) – yang semakin ekstensif.¹¹ Selain keragaman suku dan agama tersebut, masyarakat Indonesia juga beragam dari aspek latar belakang sosial-ekonomi, dan budaya. Berbagai keragaman ini ternyata menimbulkan dikotomi antara mayoritas dan minoritas. Kritik kepada dua istilah tersebut terkadang acap kali mengacu pada “angka statistik” yang rentan dipolitisasi dalam konteks berbangsa dan bernegara.¹² Penggunaan kedua term ini, dalam kesempatan yang lain, justru kontraproduktif dengan realitas masyarakat yang beragam. Bahkan, istilah mayoritas-minoritas dituduh sebagai *biang keladi* atas segregasi sosial dalam dinamika masyarakat.¹³

Secara terminologi, kata minoritas dipahami sebagai jumlah penduduk yang lebih kecil dibanding jumlah penduduk mayoritas di tingkat Nasional. Minoritas, dalam hal ini, tidak juga berarti secara kuantitas adalah terkecil atau termarginalkan dalam suatu lingkungan dan tidak diuntungkan dalam mata

¹¹ Raihani Raihani, ‘A Model of Islamic Teacher Education For Social Justice In Indonesia: A Critical Pedagogy Perspective’, *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 14, no. 1 (1 June 2020): 164, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.1.163-186>.

¹² Ahmad Najib Burhani, *Agama, Kultur (In)Toleransi, Dan Dilema Minoritas Di Indonesia*, *LIPi PRESS*, 2020, <https://e-service.lipipress.lipi.go.id/press/catalog/book/235>; Syamsul Arifin et al., “Minority Muslims and Freedom of Religion: Learning from Australian Muslimsâ€™ Experiences,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 2 (2019).

¹³ Ahmad Najib Burhani, “Treating Minorities with Fatwas: A Study of the Ahmadiyya Community in Indonesia,” *Contemporary Islam* 8, no. 3 (2014): 285–301.

rantai kehidupan.¹⁴ Dengan kata lain, minoritas acapkali dipersepsikan sebagai statistik atau mereka yang kuantitas berjumlah sedikit.¹⁵ Sungguhpun demikian, persepsi ini tidak sepenuhnya salah atau benar, justru pendefinisian semacam ini pernah dipakai Francesco Capotorti dalam Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas di United Nations.¹⁶ Menurutny, minoritas adalah sebuah kelompok, yang secara angka lebih rendah *ketimbang* populasi penduduk lain dalam suatu negara di mana populasi itu tidak dominan dan memiliki karakteristik etnis, agama, atau bahasa yang berbeda dari yang dimiliki penduduk lainnya dan menunjukkan meski hanya secara implisit, rasa solidaritas, diarahkan untuk melestarikan budaya, tradisi, agama atau bahasa mereka.”¹⁷

Simplifikasi nya, minoritas adalah mereka yang mengalami subordinasi dalam masyarakat meskipun jumlahnya besar. Dalam konteks Indonesia, sampai saat ini persoalan fundamental dengan kerangka hukum Indonesia untuk minoritas

¹⁴ Kelompok Minoritas dibagi menjadi beberapa, yaitu kelompok minoritas Ras b. Kelompok Minoritas Etnis c. Kelompok Minoritas Agama dan Keyakinan d. Kelompok Penyandang Disabilitas e. Kelompok Minoritas berdasarkan Identitas Jender dan Orientasi Seksual. Lihat Komnas HAM, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia: sebuah laporan awal* (Jakarta: Komnas Ham, 2016), 4-6.

¹⁵ Burhani, *Agama, Kultur (In)Toleransi, Dan Dilema Minoritas Di Indonesia*; John U Ogbu, “Minority Education in Comparative Perspective,” *The Journal of Negro Education* 59, no. 1 (1990): 45–57.

¹⁶ “OHCHR | SC Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights,” accessed October 8, 2021, <https://www.ohchr.org/en/hrbodies/sc/pages/subcommission.aspx>.

¹⁷ Ahmad Najib Burhani, “Torn between Muhammadiyah and Ahmadiyah in Indonesia: Discussing Erfaan Dahlan’s Religious Affiliation and Self-Exile,” *Indonesia and the Malay World* 48, no. 140 (2020): 60–77; M Najib Burhani, *Menemani Minoritas* (Gramedia Pustaka Utama, 2019).

adalah bahwa tidak ada kerangka hukum untuk minoritas.¹⁸ Memang, konstitusi di Indonesia memuat serangkaian perlindungan, termasuk kebebasan beragama dan perlindungan terhadap diskriminasi, namun perlindungan tersebut tidak berarti sampai diterjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, untuk memahami kerangka hukum bagi minoritas, tidak cukup dengan melihat hak-hak yang dinyatakan secara luas dalam konstitusi, kita perlu melihat Undang-Undang yang diperkenalkan untuk mengimplementasikannya, dan di situlah persoalannya menjadi lebih kompleks. Undang-Undang tentang keberpihakan negara terhadap minoritas sebetulnya sudah terakomodir di segala bidang, namun dalam konteks penelitian ini hanya dibatasi pada sektor pendidikan.

Dalam konteks nasional, UUD 1945 menjamin perlindungan HAM bagi para anggota kelompok minoritas. Secara kolektif, agama/keyakinan yang tertuang dalam tradisi yang mereka anut dan hak-hak tradisional nya diakui dan dihormati (Pasal 18B ayat 2). Demikian pula secara individual mereka dilindungi dan diakui sebagai warga negara dan sebagai penduduk Indonesia (Pasal 26). Pengakuan atas hak kewarganegaraan ini, berimplikasi pada keharusan bagi negara untuk menjamin berbagai macam hak-hak asasi mereka sebagai hak-hak konstitusional (BAB IX). Jaminan atas hak kelompok minoritas juga sudah tertera dalam UUD 45 pasal 28A hingga J.

¹⁸ “Indonesian Legal Discourse on Minorities: An Interview with Tim Lindsey,” <https://crs.ugm.ac.id> (blog), accessed October 8, 2021, <https://crs.ugm.ac.id/indonesian-legal-discourse-on-minorities-an-interview-with-tim-lindsey/>.

Secara khusus yang terkait dengan perlindungan hak minoritas terdapat pada 28A, 28C (ayat 2), 28E (ayat 2), dan 28I (ayat 2,3). Jaminan ini kemudian dituangkan dalam bentuk Undang-Undang.¹⁹ Salah satu Undang-Undang yang mengatur hak minoritas adalah UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU ini menjamin secara rinci berbagai hak-hak asasi warga negara, meskipun hak-hak minoritas tidak secara jelas dielaborasi.

Selain itu, di era pasca reformasi, persisnya era Gus Dur, ia mengeluarkan Keppres No. 6 tahun 2000 untuk mencabut Inpres No. 14 tahun 1967 yang melarang semua kegiatan dan bentuk ekspresi terkait Tionghoa termasuk perayaan Imlek dan aksara China. Kemudian tahun 2001, Kementerian Agama mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa Hari Raya Imlek sebagai hari raya [libur] Nasional.

Sejalan dengan keyakinan baru reformasi, berbagai konvensi internasional tentang HAM diratifikasi oleh Indonesia termasuk 2 kovenan terpenting yaitu KIHSP, serta KIHESB.²⁰ Selain itu, Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi berdasarkan Ras (CERD), Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Hak Anak (CRC), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), Konvensi Perlindungan Hak Buruh Migran dan keluarganya (ICMW), serta Konvensi Penyandang Disabilitas (ICRPD).

¹⁹ Komnas HAM, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia: sebuah laporan awal* (Jakarta; Komnas Ham, 2016), 17.

²⁰ Komnas HAM, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia: sebuah laporan awal* (Jakarta; Komnas Ham, 2016), 29.

Melalui ratifikasi ini, Indonesia secara resmi menjadi Negara Pihak yang terikat pada mekanisme pelaporan pada Komite Kerja pada masing-masing Kovenan atau Konvensi. Pemerintah Indonesia juga wajib melaporkan kemajuan upaya perlindungan dalam Tinjauan Universal Berkala (Universal Periodic Review) di Dewan HAM PBB.²¹

Dalam praksisnya, konsep kelompok minoritas juga dipahami dengan berbagai cara oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah. Kementerian Sosial, misalnya, memberikan definisi kelompok minoritas sebagai bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Seperti yang termaktub dalam Permensos No. 8 tahun 2012 menyebut, “[...] kelompok minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian. Kriteria kelompok minoritas sebagai berikut: a) gangguan keberfungsian sosial; b) diskriminasi; c) marginalisasi; dan d) berperilaku seks menyimpang.”²²

Dalam konteks Bali, undang-undang tentang perlindungan minoritas sebetulnya sudah ada meski tidak secara implisit, misalnya, Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah

²¹ Komnas HAM, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia: sebuah laporan awal* (Jakarta; Komnas Ham, 2016), 18.

²² Komnas HAM, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia: sebuah laporan awal*.

Kejuruan²³, salah satu isinya adalah peraturan ini bertujuan untuk menjamin PPDB dilaksanakan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.²⁴

Kemudian, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, yang salah satu isinya adalah PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.²⁵ Selanjutnya, PPDB berasaskan lima hal, salah satunya adalah non diskriminatif. Diskriminatif yang dimaksud adalah persyaratan warga negara yang berusia sekolah yang memenuhi dapat mengikuti proses pendaftaran sebagai calon peserta didik baru tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial.

²³ Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

²⁴ Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

²⁵ Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Bab II tentang Tujuan dan Azas, Pasal 2.

Dengan demikian, keberpihakan sekaligus komitmen negara dan pemerintah untuk menjamin hak-hak minoritas tidak perlu diragukan lagi, meskipun harus diakui dalam tataran implementasinya masih ditemui beberapa kendala, seperti ketidakadilan sosial. Raihani telah meriset tentang masalah ini di lingkungan sekolah yang berbeda dan menemukan bahwa tidak setiap siswa diperlakukan sama.²⁶ Misalnya, siswa dari agama minoritas mengalami diskriminasi dalam “mengakses” agamanya dan “dibiarkan begitu saja” praktik keagamaannya di sekolah. Dalam studi yang lain, Sri Mulyani, misalnya, menjelaskan bahwa sejarah hubungan Tionghoa dengan penduduk Aceh mengalami pasang surut. Hubungan tersebut terbentuk dan berubah dalam lingkup ruang dan durasi tertentu seiring dengan bentuk dialektika komunitas Tionghoa sebagai minoritas dan penduduk muslim Aceh sebagai mayoritas.²⁷ Selanjutnya, Warsah, meneliti bagaimana relasi antara keluarga minoritas Muslim dengan non-Muslim di Banjarasri, Kalibawang, Kulon Progo Yogyakarta, serta motivasi keberagaman agama pada keluarga muslim. Hasilnya menunjukkan akulturasi seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan membuat keluarga Muslim dan keluarga non-Muslim hidup berdampingan. Motivasi keagamaan minoritas Muslim untuk mempertahankan keimanannya bertumpu pada

²⁶ Raihani Raihani, *Creating Multicultural Citizens: A Portrayal of Contemporary Indonesian Education* (Routledengane, 2014); Lyn Parker and Chang-Yau Hoon, ‘Secularity, Religion and the Possibilities for Religious Citizenship’, *Asian Journal of Social Science* 41, no. 2 (2013): 150–74.

²⁷ Eka Srimulyani et al., “Diasporic Chinese Community in Post-Conflict Aceh: Socio-Cultural Identities, and Social Relations with Acehnese Muslim Majority,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (2018): 395–420.

motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Secara ekstrinsik terlihat dari kuatnya pengaruh pengurus masjid dalam berbagai kegiatan keagamaan untuk meningkatkan kesadaran beragama, dan kekompakan kelompok yang kokoh untuk memperkuat sekaligus melindungi motivasi keagamaan.²⁸

Beberapa studi di atas menunjukkan betapa keberadaan minoritas selalu dihadapkan pada kondisi yang perlu mendapatkan dukungan dari dalam komunitasnya itu sendiri. Mereka hidup dengan penuh ketidaknyamanan apabila prasyarat infrastruktur sosial tidak dapat terokestrasi secara baik. Mengutip Raihani, jika prasyarat infrastruktur sosial tidak dikelola dengan baik, maka konsekuensinya adalah terjadi *social injustice* (ketidakadilan sosial).²⁹ Ketidakadilan itu, menurut Raihani, terjadi hampir di semua lapisan sektor, baik sektor pendidikan, sosial-budaya, keagamaan, maupun politik.

Dalam konteks Bali, khususnya siswa minoritas muslim di SMA/ SMK baik negeri maupun swasta, siswa tersebut kurang mendapatkan layanan Pendidikan Islam dengan baik. Hal ini setidaknya berdasarkan studi pendahuluan peneliti ketika berada di lokus penelitian sehingga menemui kendala. Kendala tersebut salah satunya berupa kurikulum, sarana pra sarana maupun SDM. Peneliti juga mendapati bahwa aktualisasi layanan pendidikan Islam di beberapa SMA/ SMK Negeri sangatlah minim, seperti kurang mendapat perhatian dari manajemen

²⁸ Idi Warsah et al., “Muslim Minority in Yogyakarta: Between Social Relationship and Religious Motivation,” *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 7, no. 2 (2019): 367–98.

²⁹ Raihani, ‘A Model of Islamic Teacher Education For Social Justice in Indonesia’, 165.

sekolah, dan terlihat dari penjadwalan KBM PAI yang hanya diketahui oleh guru dengan siswa saja³⁰.

Istilah aktualisasi sendiri – mengikuti bahasa Hendrik De Smet – secara tradisional dilihat sebagai proses berikut analisis ulang sintaksis di mana status sintaksis baru memanifestasikan dirinya dalam perilaku sintaksis baru.³¹ Proses aktualisasi ini berjalan dinamis dan berlangsung dari satu lingkungan ke lingkungan lain atas dasar kesamaan hubungan antar lingkungan.

Dalam konteks ini, asumsi yang hendak penulis kembangkan adalah layanan pendidikan Islam bagi siswa minoritas muslim di Bali tidak sepenuhnya teraktualisasi secara baik dan berkeadilan sosial (*social justice*). Maksud dari redaksi “tidak sepenuhnya teraktualisasi secara baik” adalah kurang memenuhi standar kelayakan dalam pengajaran dan pendidikan sebagaimana yang ditetapkan pemerintah, misalnya standar kurikulum, penilaian, sumber daya manusia (tenaga pengajar), sarana pra sarana maupun output yang dihasilkan serta keadilan sosial.

Sedangkan maksud yang kedua kurang “berkeadilan sosial” (*social injustice*) adalah sekalipun di dunia pendidikan, ia juga tidak terlepas dari jeratan ketidakadilan sosial. Raihani, misalnya, telah membahas masalah ini di lingkungan sekolah yang berbeda dan menemukan bahwa tidak setiap siswa

³⁰ Alaika M. Bagus Kurnia PS, “Focus Group Discussion Bersama Peserta Didik SMA/ SMK Di Denpasar, Bali” (FGD Denpasar, Bali, Mei 2022).

³¹ Hendrik De Smet, “The course of actualization.” *Language* (2012): 601-633.

diperlakukan sama.³² Misalnya, siswa agama minoritas mengalami diskriminasi dalam akses terhadap ajaran agama mereka dan pengasingan dari praktik keagamaan mereka di sekolah. Yang dimaksud dengan minoritas di sini, menurut Raihani, bukan jumlah pemeluk agama yang lebih sedikit dalam konteks Indonesia secara keseluruhan, tetapi minoritas di tempat-tempat tertentu seperti umat Islam di Bali, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah atau bahkan dalam konteks sekolah yang lebih mikro.³³ Contoh lain dari bentuk ketidakadilan sosial adalah terciptanya citra pembeda aliran akademik tertentu.

Guna memperkuat asumsi penulis, kami menyajikan kasus menarik tentang minoritas Muslim di Bali yang pada dasarnya beragama Hindu, di mana identitas agama di Bali itu sendiri merupakan agama minoritas di negara-bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim.³⁴ Realitas sosial hubungan komunitas Muslim dengan komunitas Hindu di Bali tidak hanya diwarnai oleh kerja sama dan hubungan yang harmonis, namun di dalamnya berjaln kelindan persoalan-persoalan sosial antar kedua komunitas.³⁵ Persoalan tersebut sebenarnya telah ada sejak masa kerajaan-kerajaan di Bali dan berlangsung hingga masa kini. Pada tahun 1855 kehidupan rukun antara masyarakat

³² Raihani, "A model of Islamic teacher education for social justice in Indonesia: A critical pedagogy perspective." *Journal of Indonesian Islam* 14.1 (2020): 163-186.

³³ Raihani, "Education for multicultural citizens in Indonesia: Policies and practices." *Compare: A Journal of Comparative and International Education* 48.6 (2018): 992-1009.

³⁴ Lyn Parker, "Intersections of gender/sex, multiculturalism and religion: Young Muslim minority women in contemporary Bali." *Asian Studies Review* 41.3 (2017): 441-458.

³⁵ Indriana Kartini, "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali." *Masyarakat Indonesia* 37.2 (2017): 115-145.

Muslim dengan Hindu di Jembrana sempat terusik di masa pemerintahan I Gusti Ngurah Pasekan yang bersikap tidak adil terhadap orang-orang Islam, padahal masyarakat Muslim mempunyai andil besar menjadikan I Gusti Ngurah Pasekan sebagai penguasa dengan membantunya mengalahkan lawannya I Gusti Ngurah Made Rai.³⁶

Buku ini menjelaskan bagaimana keberlangsungan layanan Pendidikan Islam bagi siswa minoritas muslim di Denpasar, Bali. Sehingga akan menunjukkan beberapa sekolah menengah atas atau kejuruan di Denpasar, Bali beserta aktivitasnya yang dilakukan oleh beberapa komponen dan *stakeholders* terkait.

³⁶ Indriana Kartini, "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali", 34.

BAB 2

LAYANAN PENDIDIKAN ISLAM

A. Konsep Layanan Pendidikan Islam

Pendidikan sebagai salah satu sektor pelayanan publik pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik guna mengefektifkan amanat UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap warga negara baik di dalam maupun di luar negeri berhak memperoleh akses dan pelayanan terbaik dari pendidikan.³⁷ Layanan pendidikan sebagai salah satu *core society* sangat bermanfaat pada upaya peningkatan kualitas pelayanan menuju pelayanan prima. Layanan pendidikan merupakan jasa yang diberikan oleh pihak penyedia jasa atau sekolah kepada siswa. Kualitas layanan pendidikan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi dan ekspektasi siswa terhadap layanan pendidikan yang

³⁷ Suprpto, Suprpto. "Layanan Pendidikan Islam Bagi Anak-Anak Buruh Migran Indonesia Di Kota Kinabalu Sabah Malaysia." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2017): 423-424.

benar- benar mereka peroleh selama proses pendidikan yang di tempuh di sekolah.³⁸

Layanan sendiri diartikan sebagai *any primary or complementary activity that does not directly produce a physical product - that is, the non-goods part of the transaction between buyer (customer) and seller (provider)* atau kegiatan utama atau pelengkap yang secara tidak langsung menghasilkan fisik produk, yaitu benda-barang bagian dari transaksi antara pembeli (*customer*) dan penjual (*penyedia*).³⁹ Dalam arti layanan ini lebih menekankan pada bentuk fisik benda berwujud. Dengan kata lain, layanan adalah produk yang tidak berwujud yang ditawarkan untuk memuaskan pelanggan.

Dalam konteks keorganisasian, baik berplat merah atau hitam, layanan ini sangat penting untuk meningkatkan mutu dan kualitas serta kepuasan pelanggan. Terlebih sekolah sebagai penyedia jasa pendidikan harus berperan aktif untuk senantiasa berinovasi dan berkreasi agar tidak ketinggalan zaman dan memenuhi kebutuhan dan tantangan zaman. Dalam hal ini, mutu menjadi suatu keniscayaan. Dalam konteks pendidikan, salah satu cerminan mutu adalah ditunjang dengan adanya sarana pra sarana yang memadai, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan profesional, moralitas dan integritas yang tinggi, penggunaan teknologi mutakhir, kualitas pengajaran

³⁸ Yulista, Yulista, and Kusumantoro Kusumantoro. "Kualitas Layanan Pendidikan Di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Batang (Tahun Ajaran 2014/2015)." *Economic Education Analysis Journal* 4.1 (2015).

³⁹ Prasad, Sameer, and Sunil Babbar. "International operations management research." *Journal of operations management* 18.2 (2000): 209-247.

yang *up to date* dan tidak monoton, dan semua yang berkaitan dengan upgrading dalam konteks peningkatan mutu pendidikan.

Organisasi-organisasi yang menganggap serius pencapaian mutu, memahami bahwa sebagian besar rahasia mutu berakar dari mendengar dan merespon secara simpatik terhadap kebutuhan dan keinginan para pelanggan dan klien. Meraih mutu melibatkan keharusan melakukan segala hal dengan baik, dan sebuah institusi harus memposisikan pelanggan secara tepat dan proporsional agar mutu tersebut bisa dicapai.⁴⁰

Dalam sebuah ayat, Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.*⁴¹

⁴⁰ Ali Mudhofir, *Pendidik profesional: konsep, strategi, dan aplikasinya dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim*, 2020.

Ayat di atas bermakna bahwa setiap muslim berkewajiban untuk memberikan kualitas pelayanan (*quality service*) kepada orang lain. Dalam ayat yang lain disebutkan “Jawablah salam saudaramu dengan sepadan, atau lebih baik dari pemberian salamnya”. Dari sini, dapat dipahami bahwa memberikan pelayanan terbaik dari apa yang dimiliki adalah bagian daripada iman. Dengan demikian konsep memberikan pelayanan yang terbaik merupakan konsep Islam yang akan membawa kebaikan bagi umat Islam tersendiri.

Atas dasar ayat di atas, kemudian memunculkan teori pelayanan prima. Sejatinya, pelayanan prima merupakan terjemahan dari *excellent service*. Secara etimologi, *excellent service* berarti pelayanan yang sangat baik, atau pelayanan yang terbaik.⁴² Pelayanan prima dikembangkan berdasarkan konsep A3, yaitu *Attitude* (sikap), *Attention* (perhatian), dan *Action* (tindakan).⁴³ Ketiga konsep ini yang pada gilirannya akan melahirkan kepuasan *customer* (pelanggan) untuk datang kembali.

Di samping itu, menurut Daryanto dan Ismanto, pelayanan prima berdasarkan: (1) Sikap (*attitude*) merupakan pemberian pelayanan kepada para pelanggan dengan fokus pada perbaikan sikap terkait pelayanan prima seperti pelayanan dengan penampilan serasi, berpikiran positif, dan saling menghargai; (2) Perhatian (*attention*) mencakup tiga prinsip pokok yaitu

⁴² Atep Adya Barata, *Dasar-dasar pelayanan prima*. Elex Media Komputindo, 2003; lihat juga Nurmah Semil, *Pelayanan prima instansi pemerintah: kajian kritis pada sistem pelayanan publik di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

⁴³ Ismanto Setyobudi Daryanto, *Konsumen dan pelayanan prima* (Yogyakarta: Gava Media, 2014).

mendengarkan dan memahami secara sungguh – sungguh kebutuhan para pelanggan, mengamati dan mendengar perilaku para pelanggan, dan mencurahkan perhatian penuh pada para pelanggan. Dan (3) tindakan (*action*) terdiri dari mencatat pesanan pelanggan, mencatat kebutuhan pelanggan, menegaskan kembali kebutuhan pelanggan, mewujudkan kebutuhan pelanggan, serta menyatakan terimakasih dengan harapan pelanggan akan kembali untuk melakukan suatu pembelian.⁴⁴

Pertama, pelayanan prima berlandaskan *attitude* (sikap). Pelayanan ini mencakup tiga prinsip; melayani pelanggan berdasarkan *performance* (penampilan), berpikiran positif (*positive thinking*), dan berpikiran rasional dengan prinsip apresiasi. *Kedua*, pelayanan prima atas dasar *attention* (perhatian). Tidak jauh berbeda dengan yang pertama, jenis kedua ini berdasar tiga prinsip yang meliputi; mendengarkan dan memahami kebutuhan para pelanggan, mengamati dan mengapresiasi perilaku para pelanggan serta mencurahkan perhatian penuh kepadanya. Dan *ketiga*, pelayanan prima berdasarkan tindakan (*action*) meliputi lima prinsip: mencatat setiap pesanan para pelanggan, mencatat kebutuhan para pelanggan, menegaskan kembali kebutuhan para pelanggan, mewujudkan kebutuhan para pelanggan dan menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan mau kembali.⁴⁵

⁴⁴ Lihat Daryanto, Ismanto Setyobudi. "Konsumen dan pelayanan prima." *Cetakan I. Yogyakarta: Gava Media* (2014): 120.

⁴⁵ Lihat Daryanto, Ismanto Setyobudi. "Konsumen dan pelayanan prima." *Cetakan I. Yogyakarta: Gava Media* (2014): 120.

Dalam konteks ini, tidak dapat dimungkiri, berbicara pelayanan tentu berkelindan dengan jasa. Persoalan jasa ini tidaklah sesederhana yang dibayangkan dan dipikirkan. Sebab, jasa merupakan sesuatu fenomena yang rumit (*complicated*). Kata jasa mempunyai banyak arti dan ruang lingkup, dari pengertian yang paling sederhana sampai yang paling rumit, yaitu hanya berupa pelayanan dari seseorang kepada orang lain, mulai dari pelayanan yang diberikan oleh manusia, baik yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat, yang hanya bisa dirasakan sampai kepada fasilitas-fasilitas pendukung yang harus tersedia dalam penjualan jasa dan benda-benda lainnya.⁴⁶ Dalam dunia pendidikan, jasa yang diberikan akan berpengaruh pada kepuasan pelanggan atau penerima jasa.

Sebagai perbandingan, layanan menurut William J. Stanton adalah *service are those separately identifiable, essentially, intangible activities that provide want satisfaction and that are not necessarily tied to the sale of a product or another service. To produce a service may or may not require the use of tangible goods.*⁴⁷ Jasa adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi secara terpisah tidak berwujud, ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan. Jasa dapat dihasilkan dengan menggunakan benda-benda berwujud atau tidak.

Berdasarkan paparan di muka, layanan pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau aktifitas yang berkaitan

⁴⁶ Lihat Suprpto, Suprpto. "Layanan Pendidikan Islam Bagi Anak-Anak Buruh Migran Indonesia Di Kota Kinabalu Sabah Malaysia." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2017): 423-424.

⁴⁷ Verma, Harsh V. *Services marketing: Text and cases, 2/e*. Pearson Education India, 2011, 26.

dengan pendidikan yang menitikberatkan pada kebutuhan dan kepuasan pada pelanggan pendidikan. Jika realitasnya lebih dari yang diekspetasikan, maka layanan tersebut dapat disebut bermutu atau berkualitas. Dan jika sebaliknya, maka kualitas pendidikan tersebut jauh dari istilah memadai, jikalau sama antara realita dengan harapan, maka layanan tersebut memuaskan.

Kementerian Agama sebagai leading sector yang menggawangi Pendidikan Islam telah membuat sejumlah kebijakan dan program unggulan untuk meningkatkan kualitas dan mutu PAI agar senada dengan tantangan zaman. Dalam sambutannya Direktur PAI, Amrullah, menyampaikan target kinerja 2022 antara lain penguatan program mandatori dan program unggulan Direktorat Pendidikan Islam, yaitu:⁴⁸ (1) Penguatan moderasi beragama; (2) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; (3) Peningkatan kualitas penilaian pendidikan; (4) Peningkatan kualitas pendidikan profesi; (5) Pemenuhan distribusi tenaga pendidik; dan (6) Penguatan pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti.

Sebagai perbandingan, program unggulan kemenag tahun 2022-2024 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Layanan Pendidikan Islam yang ditawarkan oleh Kementerian Agama RI di bidang program pendidikan Islam yaitu: tahun 2010-2014, yaitu menetapkan 5 kebijakan yakni : (1) peningkatan kualitas

⁴⁸ Kanwil Kemenag DIY, "Enam Program Unggulan Direktorat PAI Kemenag RI", dalam <https://diy.kemenag.go.id/21426-enam-program-unggulan-direktorat-pai-kemenag-ri.html>, diakses 15 November 2022.

kehidupan beragama; (2) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (3) peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan; (4) peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan (5) perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pencapaian tujuan program Pendidikan Islam di bidang pendidikan agama di sekolah dilakukan melalui Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Islam pada sekolah adalah: 1) Tersedianya layanan Pendidikan Islam pada sekolah, 2) Meningkatnya mutu layanan Pendidikan Islam pada sekolah, dan 3) Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama peserta didik.

B. Dimensi Layanan Pendidikan Islam

Kualitas layanan (*service quality*) adalah ukuran bagaimana sekolah memberikan layanannya dibandingkan dengan harapan pelanggannya. Pelanggan (dalam hal ini, siswa, orang tua dan masyarakat) membeli layanan sebagai respons terhadap kebutuhan spesifik. Mereka secara sadar atau tidak sadar memiliki standar dan harapan tertentu tentang bagaimana penyampaian layanan sekolah memenuhi kebutuhan tersebut. Sekolah dengan kualitas layanan yang tinggi menawarkan layanan yang sesuai atau melebihi harapan pelanggannya.

Mengutip kerangka berpikir *service quality* (SERVQUAL), penulis membagi 5 dimensi layanan Pendidikan Islam sebagai berikut;⁴⁹

a. *Reliability* (Keandalan)

Dimensi ini merujuk pada kompetensi dan konsistensi sekolah dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada customer. Sudah barang tentu, proses ini melibatkan interaksi dan komunikasi dari pelanggan apapun itu. Dalam hal ini, pelanggan sudah sewajarnya memiliki sejumlah ekspektasi tertentu akan keandalan dalam “membeli” jasa pendidikan berikut outcome yang dihasilkannya. Atas dasar inilah, sekolah harus memiliki dimensi keandalan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanannya.

b. *Tangiblity* (Aset Fisik)

Ini adalah kemampuan organisasi untuk menggambarkan kualitas layanan kepada pelanggannya. Ada banyak faktor yang membuat sekolah memiliki kualitas yang sangat nyata, seperti penampilan aset fisiknya (gedung dan bangunannya), pakaian dan perilaku karyawannya (*performance*), kurikulumnya, dan departemen layanan pelanggannya. Dengan kata lain, kemampuan penyedia jasa dalam menunjukkan eksistensinya pada pihak eksternal.

Aset fisik ini meliputi tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan dan sarana komunikasi, dan lain-lain yang dapat

⁴⁹ Schneider, Benjamin, and Susan S. White. "Service quality: Research perspectives. Sage publications, 2004.

dan harus ada dalam proses jasa. Penilaian terhadap dimensi ini dapat diperluas dalam bentuk hubungan dengan konsumen lain pengguna jasa. Bukti fisik berupa gedung, ruangan, fasilitas dan sarana parkir serta peralatan penunjang lainnya untuk memberikan pelayanan jasa yang memadai, aman dan nyaman.

c. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (*responsive*) dan tepat kepada pelanggan, dengan menyampaikan informasi yang jelas. Hal ini merupakan dedikasi dan kemampuan pihak sekolah untuk menyediakan pelanggan dengan layanan yang cepat. Daya tanggap berarti menerima, menilai, dan dengan cepat membalas permintaan, umpan balik, pertanyaan, dan masalah pelanggan. Sebuah sekolah dengan kualitas layanan yang tinggi selalu merespon komunikasi pelanggan sesegera mungkin yang seringkali dapat menunjukkan nilai yang diberikan perusahaan pada kepuasan pelanggan. Membiarkan pelanggan menunggu tanpa alasan yang jelas, menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas jasa, kecuali apabila kesalahan ini ditanggapi cepat, maka bisa menjadi sesuatu yang berkesan dan menjadi pengalaman yang menyenangkan.

d. *Assurance* (Jaminan)

Kemampuan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada konsumen. Jaminan adalah keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki pelanggan dalam organisasi tertentu. Hal ini sangat

penting dengan layanan yang mungkin dianggap pelanggan berada di atas kemampuan mereka untuk memahami dan mengevaluasi dengan benar, yang berarti bahwa harus ada elemen kepercayaan tertentu dalam kemampuan organisasi penyedia untuk memberikan. Tenaga pendidik dan kependidikan harus berhati-hati untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan mereka jika mereka ingin mempertahankannya.

Dimensi jaminan atau assurance terdapat unsur-unsur sebagai berikut: a) Kompetensi (*competence*), keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki customer service dalam memberikan layanan kepada pelanggan. b) Kesopanan (*courtesy*), keramahan, perhatian dan sikap yang sopan. c) Kredibilitas (*credibility*), berkaitan dengan nilai-nilai kepercayaan, reputasi, prestasi yang positif dari pihak yang memberikan layanan.

e. *Empathy*

Perhatian secara individual yang diberikan kepada pelanggan dan berusaha untuk memahami keinginan dan kebutuhan, serta mampu menangani keluhan pelanggan secara baik dan tepat. Meliputi sikap kontak personel maupun perusahaan untuk memahami kebutuhan maupun kesulitan, konsumen, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi atau hubungan. Empati adalah bagaimana sebuah organisasi memberikan layanannya dengan cara yang membuat sekolah tampak berempati terhadap keinginan dan tuntutan pelanggannya. Pelanggan yang percaya

bahwa sekolah benar-benar peduli dengan kesejahteraan mereka cenderung lebih setia kepada sekolah itu.

Dimensi *emphaty* ini terdapat unsur-unsur lainnya yang terkait, yaitu sebagai berikut: a) *Acces* (akses), kemudian memanfaatkan dan memperoleh layanan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. b) *Communication* (komunikasi), kemampuan dalam komunikasi untuk penyampaian pesan, dan informasi kepada pelanggannya melalui berbagai media komunikasi, yaitu personal kontak, media publikasi/promosi, telepon, korespondensi, dan internet. c) *Understanding the customer* (pemahaman terhadap pelanggan), kemampuan untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan serta mampu menangani keluhan para pelanggannya.

Kelima dimensi ini harus ada dalam layanan Pendidikan Islam guna memberikan kepuasan pada pelanggan pendidikan, yakni: *Reliability* atau Keandalan, *Responsiveness* atau Daya Tanggap, *Assurance* atau Jaminan, *Emphaty* atau Empati, *Tangibles* atau bukti fisik. Sedangkan di pihak lain akan menampilkan pelayanan untuk dapat memberikan suatu kepuasan bagi pihak pelanggannya (*Customer Satisfaction*), yakni memberikan kepuasan bagi pelanggannya yang sekaligus menumbuhkan rasa aman, kepercayaan, adanya loyalitas tinggi terhadap suatu produk/ jasa.

C. Aspek Layanan Pendidikan Islam

Setidaknya ada 5 faktor yang memengaruhi kepuasan orang tua terhadap layanan pendidikan, diantaranya sebagai berikut:⁵⁰

a. Layanan pada Aspek Pembelajaran

Dalam aspek pembelajaran ada beberapa komponen pembelajaran, diantaranya: Dalam buku Oemar Hamalik dijelaskan komponen pengajaran meliputi tujuan pendidikan dan pengajaran, peserta didik/ siswa, tenaga kependidikan khususnya guru, perencanaan pengajaran, (strategi pembelajaran), media dan evaluasi pengajaran.⁵¹ Secara umum komponen tersebut meliputi: (1) Tujuan pembelajaran, (2) Materi Pembelajaran, (3) Metode Pembelajaran, (4) Media Pembelajaran, (5) Evaluasi Pembelajaran, (6) Peserta Didik/ Siswa, (7) Pendidik/ Guru.

b. Layanan Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata Manajemen. Istilah manajemen sendiri memiliki kesamaan dengan administrasi. Manajemen adalah suatu kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan pendidikan meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan

⁵⁰ Liana, Nurul Agustin. *Analisis faktor yang mempengaruhi kepuasan orang tua peserta didik terhadap layanan pendidikan di SDN Model Terpadu Kabupaten Bojonegoro*. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang, 2015

⁵¹ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

(*actuating*), pengawasan/ pengendalian (*controlling*). Menurut Nurul Agustina Liana, et.al., faktor yang memengaruhi kepuasan orang tua terhadap layanan pengelolaan diantaranya: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembelajaran, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta pembiayaan yang ada di sekolah.⁵²

c. Layanan Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah (TAS)

Adalah layanan yang diberikan pendidik dan tenaga administrasi juga menjadi faktor kepuasan orang tua terhadap sekolah/ lembaga. Faktor layanan ini meliputi sikap, respon, dan bahasa atau komunikasi yang digunakan pendidik dan tenaga administrasi terhadap orang tua peserta didik.

Layanan ini menjadi aspek keempat dalam pemenuhan kepuasan layanan terhadap orang tua. Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39, Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.⁵³ Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

⁵² Liana, Nurul Agustin. *Analisis faktor yang mempengaruhi kepuasan orang tua peserta didik terhadap layanan pendidikan di SDN Model Terpadu Kabupaten Bojonegoro*. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang, 2015

⁵³ Lihat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

d. Layanan pada Aspek Kompetensi Lulusan

Faktor layanan pada Aspek Kompetensi Lulusan memiliki nilai kepuasan yang paling rendah namun dapat dijadikan sekolah sebagai bahan acuan untuk dapat memperbaiki tingkat pelayanan yang diberikan. Faktor layanan ini diantaranya: sikap peserta didik di lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, penambahan pengetahuan peserta didik dalam bidang akademik, non akademik, serta keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk meningkatkan kualitas layanan aspek kompetensi lulusan dapat dilakukan dengan mengasah kemampuan soft skill dan hard skill peserta didik. Berbagai isu yang berkaitan dengan pemberian pelayanan yang harus diperhatikan organisasi antara lain adalah: a) kualitas komunikasi, apakah lembaga mampu menjalin komunikasi dan memahami kebutuhan pengguna layanan, b) spesifikasi kualitas layanan, apakah pemberian layanan menggunakan standar yang jelas, c) kualitas pemberian layanan, apakah terdapat adanya standar pemberian layanan dan apabila terdapat kesalahan dalam pemberian layanan akan diadakan perbaikan, d) kualitas sistem layanan dan SDM, apakah staf memiliki motivasi terlatih, terorganisir, dan didukung oleh sistem organisasi yang baik.⁵⁴

e. Layanan Sarana dan Prasarana

Sarana pendidikan adalah semua peralatan, bahan dan semua aset fisik maupun non fisik yang secara langsung

⁵⁴ Liana, Nurul Agustin. *Analisis faktor yang mempengaruhi kepuasan orang tua peserta didik terhadap layanan pendidikan di SDN Model Terpadu Kabupaten Bojonegoro*. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang, 2015.

digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Prasarana pendidikan menurut (Tim Penyusun Pedoman Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.⁵⁵

Dalam PP no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan pada bab VII tentang Standar Sarana dan Prasarana pada pasal 42 ayat 1 dan 2, sebagai berikut: a) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. b) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Kelima faktor inilah yang menjadi penentu kualitas layanan Pendidikan Islam dari suatu lembaga pendidikan. Faktor-faktor diatas telah diatur dalam SNP. SNP tersebut terdiri

⁵⁵ Yuliana, Lia, and Suharsimi Arikunto. "Manajemen Pendidikan." *Yogyakarta: Teras* (2008).

atas 8 standar antara lain: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pada pelanggan harus mampu mengelola sekolah dengan baik sesuai SNP yang ada.

D. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Layanan Pendidikan Islam

Untuk meningkatkan tingkat kualitas layanan Pendidikan Islam – dalam tataran tertentu adalah kepuasan pelanggan –, ada lima faktor yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah dan insan pendidikan.

Pertama, kualitas produk. Produk yang dimaksud adalah segala output yang dihasilkan dari pihak sekolah atau penyelenggara pendidikan. Dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai produk tangible, seperti siswa, profil lulusan dan sebagainya maupun produk intangible yang bersifat karakter, pembiasaan, tingkah laku, integritas, moralitas, dan etika. Mereka, para pelanggan yang terdiri dari siswa, wali siswa, dan masyarakat akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk atau jasa yang mereka gunakan berkualitas.

Kedua, kualitas Pelayanan. Pada industri jasa, adalah mutlak bahwa pelanggan akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang

pelanggan harapkan. Sekolah sebagai “industri” yang bergerak di sektor pendidikan tidak lebih juga dituntut untuk meningkatkan kualitas layanan. Kualitas layanan ini meliputi segala hal yang berhubungan dengan pendidikan, tak terkecuali PAI. Layanan Pendidikan Islam tidak boleh hanya begitu-begitu saja, akan tetapi harus ditopang dengan Sumber Daya Manusia (SDM), atau resources di sekolah tersebut agar pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik berkembang dengan baik sesuai fitrahnya.

Ketiga, Emosional Pelanggan atau chemistry. Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk atau jasa dengan merek tertentu, sehingga membuatnya mengalami tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk atau jasa, tetapi nilai sosial atau *self-esteem* yang membuat pelanggan menjadi puas terhadap merk tertentu. Para peserta didik, wali peserta didik dan masyarakat merasa akan diapresiasi dan dihargai ketika mereka tidak hanya sekadar mendapatkan layanan terbaik yang bersifat tangible, melainkan keramahmatan dan kesantunan dari pihak penyedia jasa (baca; sekolah). Hal inilah yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah selaku penyedia jasa.

Keempat, harga produk atau jasa. Tidak dapat dipungkiri, harga jasa yang ditawarkan oleh pihak sekolah menjadi pertimbangan tersendiri bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini tidak boleh luput dari pihak penyedia jasa. Sekolah yang mempunyai kualitas yang sama dengan produk lain, misalnya, tetapi ditetapkan pada harga yang lebih murah

akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggannya. Jadi, pelanggan tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk/jasa (pengorbanannya semakin kecil), cenderung puas terhadap produk/ jasa. Penyedia jasa harus berhasil membangun komitmen bersama seluruh stakeholder untuk pencapaian visi dalam perbaikan layanan guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang termasuk di dalamnya adalah memperbaiki cara berfikir, perilaku, kemampuan, dan pengetahuan yang ada.

Peningkatan kualitas berfokus pada mengidentifikasi, menerapkan, dan memelihara praktik instruksional dan organisasi terbaik yang memastikan layanan yang tepat kepada klien untuk hasil pendidikan yang positif. Kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan harus berpedoman pada beberapa prinsip: (a) Fokus pada klien: layanan harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan (baik pendidikan dan lainnya) dan harapan klien (pelajar) dan masyarakat; (b) Fokus pada sistem dan proses: penyedia harus memahami apa yang perlu dilakukan, langkah mana yang harus diambil dan urutannya; (c) Fokus pada penyedia: tenaga kependidikan (guru, kepala sekolah dll) membutuhkan dukungan dari sistem, seperti uraian tugas yang jelas, umpan balik yang jelas dan segera mengenai kinerja, peralatan dan perlengkapan, lingkungan kerja yang baik, pengakuan dan motivasi dalam bingkai pengawasan suportif reguler; (d) Fokus pada kerja sama tim: kualitas paling baik dicapai melalui pendekatan tim untuk pemecahan masalah dan peningkatan kinerja; (e) Komunikasi yang efektif: ini

memerlukan berbagi atau pertukaran informasi, ide, pengetahuan, emosi dan keterampilan antara orang-orang. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan kualitas penyampaian layanan pendidikan dan kepuasan pengguna; (f) Supervisi suportif rutin: ini sangat penting dalam meningkatkan kinerja dan kualitas layanan pendidikan. Agar supervisi lebih efektif, analisis situasi perlu dilakukan secara berkala di semua sekolah, dan identifikasi masalah didiskusikan dan ditangani dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk anggota masyarakat; dan (g) Penggunaan data: praktik berbasis bukti membutuhkan data yang benar dan terkini

Menurut Asma Asrar Qureshi dari International Islamic University, Islamabad, Pakistan dalam makalahnya tentang *“Impact of Quality-of-Service Delivery in Business Education”* (Dampak Kualitas Pelayanan dalam Pendidikan Bisnis), kualitas pendidikan (*Quality of Education* atau QoE) tidak hanya terkait dengan pengajaran di kelas saja tetapi juga memiliki kualitas layanan. Aspek kualitas layanan (*Quaity of Service* atau QoS) juga; pengajaran kelas selanjutnya dibagi menjadi dua sub proses: proses pengiriman kelas yang mendefinisikan bagaimana pengetahuan disampaikan kepada siswa dan proses stimulasi intelektual yang menjelaskan sejauh mana kualitas pengetahuan diberikan. Kualitas layanan (QoS) juga dikelompokkan ke dalam proses dukungan siswa yang mendefinisikan semua proses yang membantu dan memfasilitasi

siswa dan proses perawatan yang mendefinisikan pengembangan kepribadian siswa.⁵⁶

Asma Qureshi lebih lanjut menyoroti bahwa untuk ini, para pendidik biasanya menghadapi masalah dalam mengembangkan indikator pengukuran dan mengidentifikasi komponen pendidikan berkualitas. Untuk tujuan mendefinisikan kualitas, penulis bermaksud semua langkah dan tindakan yang memfasilitasi siswa untuk menyerap pengetahuan dengan cara yang ramah pengguna dan dalam lingkungan yang kondusif.

⁵⁶ Qureshi, Asma Asrar, and Usman Mahmood. "Impact of quality of service delivery in business education." *11th QMOD Conference. Quality Management and Organizational Development Attaining Sustainability From Organizational Excellence to SustainAble Excellence; 20-22 August; 2008 in Helsingborg; Sweden*. No. 033. Linköping University Electronic Press, 2008.

BAB 3

PARADIGMA DAN LAYANAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM KONTEKS MINORITAS

A. Paradigma Pendidikan Islam dalam Konteks Minoritas

1. Konsep Minoritas dan Desain Layanan Pendidikan Islam

Konsep “minoritas” berkembang dalam bahasa ilmu politik dengan bangkitnya nasionalisme di Eropa selama abad ke-19.⁵⁷ Konsep ini merujuk pada “minoritas nasional” di negara-bangsa yang berbeda. Pada tahun 1932 sosiolog Amerika Donald Young mengadopsi istilah tersebut untuk mencakup kelompok-kelompok di Amerika Serikat yang dibedakan oleh ciri-ciri biologis atau ciri-ciri nasional atau keduanya.⁵⁸ Kemudian “etnis minoritas” sering digunakan dalam wacana populer dan juga dalam ilmu sosial untuk merujuk pada

⁵⁷ Istilah “minoritas” telah berada dalam leksikon sosiologi setidaknya selama setengah abad. Seperti banyak konsep ilmu sosial lainnya, ini telah menjadi wacana populer selama bertahun-tahun tetapi penggunaannya tidak pernah terikat oleh definisi kamus. Variasi yang ditemukan dalam sosiologi terlampaui oleh yang digunakan secara populer, khususnya dalam lingkungan politik saat ini. Lihat Killian, Lewis M. “WHAT OR WHO IS A” MINORITY”?.” *Michigan Sociological Review* (1996): 18-31.

⁵⁸ Donald Young, “Research Memorandum on Minority Peoples in the Depression.” *Science and Society* 3.2 (1939).

kelompok yang sadar diri dan relatif tidak berdaya yang anggotanya menjadi sasaran diskriminasi. Pada 1960-an, perempuan dimasukkan sebagai “minoritas yang mayoritas”.⁵⁹

Edward Sagarin, dalam karyanya yang sudah menjadi klasik, *The Other Minorities*, menyarankan dimasukkannya kolektivitas yang dibedakan berdasarkan penyimpangan, kecacatan, dan viktimisasi. Saat ini istilah tersebut semakin banyak digunakan dalam bahasa populer untuk merujuk pada individu. Konotasi politik sebelumnya yang menekankan hubungan kekuasaan dikaburkan karena individu yang mengaku telah menjadi korban diperlakukan sebagai “minoritas”.⁶⁰ Istilah “minoritas” diartikan sebagai bagian dari penduduk yang beberapa ciri-cirinya berbeda dan umumnya mendapat perlakuan berbeda.⁶¹ Beberapa ciri-ciri yang berbeda tersebut bisa berupa bentuk fisik, seperti warna kulit dan bahasa.⁶² Menurut Theodorson, “minoritas adalah kelompok yang diakui berdasarkan ras, agama atau etnis, yang menderita kerugian akibat prasangka (prejudice) atau biasa dikenal dengan istilah diskriminasi”.⁶³

Dalam novel *The Outcast*, Madasari menulis bagaimana mayoritas memiliki persepsi negatif dan bagaimana mereka melakukan berbagai tindakan diskriminasi terhadap minoritas,

⁵⁹ Lihat Helen Mayer Hacker, "Women as a minority group." *Social forces* (1951): 60-69.

⁶⁰ Lewis M. Killian, "What or Who Is A " Minority"?. " *Michigan Sociological Review* (1996): 18-31.

⁶¹ Rizkika Agustini, Kasuwi Saiban, and Mufarrihul Hazin, "Problematisasi Pendidikan Islam di Daerah Minoritas Muslim." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21.02 (2021): 153-160.

⁶² Barton Meyers, "Minority group: An ideological formulation." *Social Problems* 32.1 (1984): 1-15.

⁶³ George A. Theodorson, "Minority peoples in the Union of Burma." *Journal of Southeast Asian History* 5.1 (1964): 1-16.

khususnya diskriminasi terhadap pemeluk agama tertentu.⁶⁴ Publikasi *The Other Minorities* pada tahun 1971, oleh Edward Sagarin mencerminkan perubahan definisi dalam budaya populer tentang siapa yang berhak atas “hak minoritas” (*minority rights*). Sagarin menunjukkan bahwa, setelah Donald Young mempromosikan istilah tersebut dalam Masyarakat Minoritas Amerika, sosiologi kelompok minoritas terkonsentrasi terutama pada kelompok etnis. Tapi, dia menyarankan, tema lain dikembangkan-kepedulian terhadap diskriminasi terhadap apa yang dia sebut “marjinal dan periferal”.⁶⁵

Dalam konteks ini, minoritas dimaksudkan sebagai: *pertama*, secara numerik jumlahnya lebih kecil dari sisa populasi lainnya dalam suatu negara. *Kedua*, posisinya tidak dominan dalam konteks negara. *Ketiga*, adanya perbedaan etnik, agama, dan budaya dengan populasi lainnya. Dan *keempat*, memiliki solidaritas agama, bahasa, tradisi, budaya, dan kepentingan untuk meraih persamaan di muka umum dengan populasi di luarnya.⁶⁶

Minoritas Muslim merupakan bagian penduduk yang berbeda dari penduduk lainnya karena anggota-anggotanya mengakui bahwa Nabi Muhammad saw menjadi utusan Allah yang terakhir serta meyakini bahwa ajaran Nabi saw adalah benar, namun sering mendapat perlakuan berbeda dari

⁶⁴ Okky Madasari, *The Outcast* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

⁶⁵ Lihat Edward Sagarin, ed. *The Other Minorities: Nonethnic Collectivities Conceptualized as Minority Groups* (Ginn, 1971).

⁶⁶ A Solikhin, “Islam, Negara, dan Perlindungan Hak-Hak Islam Minoritas”, *Journal of Governance*, 1(2) (2016).

kelompok-kelompok lain yang tidak mempunyai keyakinan seperti itu.⁶⁷ Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Ahmad al-Usairy. Menurutnya, minoritas Muslim ialah kelemahan dan tidak adanya peran, baik ekonomi, politik, maupun sosial, kaum muslim di suatu wilayah. Pendapat ini diperkuat oleh tulisan Indriana Kartini, yang mengutip pendapat Gerr, bahwa status minoritas Muslim tidak hanya berkaitan dengan jumlah komunitas Muslim yang lebih sedikit dibandingkan dengan seluruh populasi penduduk di suatu wilayah tertentu, tetapi terdapat beberapa asumsi lain terkait status minoritas, yakni dilihat dari aspek lain diantaranya: budaya, politik, sosial dan ekonomi.⁶⁸

Dalam konteks ini, paradigma layanan Pendidikan Islam, salah satunya harus tercermin dalam muatan kurikulum. Kurikulum PAI di wilayah minoritas harus lebih mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang notabene sebagai minoritas. Tidak hanya itu, dukungan dan peran penting pemerintah daerah terkait ikut menunjang keberhasilan pemerataan layanan Pendidikan Islam di seluruh daerah, tak terkecuali daerah minoritas seperti halnya Bali. Setidaknya ada enam layanan Pendidikan Islam pada aspek kurikulum di daerah minoritas sebagai berikut.

Pertama, Fleksibilitas. Fleksibilitas menitikberatkan pada pengembangan materi dan metodologi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Hal yang harus diperhatikan adalah

⁶⁷ Al-Usairy, *Sejarah Islam* (terjemahan Samson Rohman. Akbar Media, 2013).

⁶⁸ Indriana Kartini, "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali." *Masyarakat Indonesia* 37.2 (2017): 115-145.

bagaimana mendapatkan pilihan yang tepat agar terjadi komunikasi yang baik antara guru dan siswa, sehingga materi yang diberikan benar benar dapat ditangkap dan dipahami. Oleh sebab itu, guru harus memperhatikan keberadaan siswa dari segi kecerdasan, kemampuan dan pengetahuan yang telah dikuasainya, kemudian membuat pilihan bahan belajar dan metode-metode pembelajaran yang tepat dan sesuai.

Kedua, berorientasi pada tujuan, Kegiatan belajar mengajar harus berorientasi pada tujuan. Pemilihan kegiatan-kegiatan dan pengalaman belajar didasarkan pada ilmu pengetahuan dan pengembangan masyarakat. Oleh Karena itu, sebelum menentukan waktu dan bahan pelajaran terlebih dahulu ditetapkan tujuan yang harus dicapai oleh siswa dalam mempelajari suatu mata pelajaran.

Ketiga, efektifitas dan efisiensi. Struktur kurikulum PAI di wilayah minoritas pada dasarnya merupakan kebutuhan yang harus dirancang sedemikian rupa agar menghasilkan kualitas pembelajaran yang efektif dan efisien. Meski demikian, struktur kurikulum tersebut tidaklah sederhana yang dibayangkan, sehingga memerlukan keterampilan tersendiri dalam pengorganisasiannya agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien tanpa mengurangi capaian tujuan yang diharapkan.

Keempat, kontinuitas. Kurikulum PAI dikembangkan dengan pendekatan hubungan hirarki fungsional yang menghubungkan antar jenjang dan tingkatan. Oleh sebab itu, perencanaan kegiatan belajar mengajar harus dibuat secara optimal dan sistematis, sehingga kemungkinan terjadinya proses

peningkatan, perluasan serta pengalaman yang terus berkembang dari suatu pokok bahasan mata pelajaran.

Kelima, multikultural. Kebhinekaan dan pluralitas merupakan ciri yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, bahasa, kelas sosial, suku, dan budaya. Bagi orang Indonesia, keragaman ini menjadi kekayaan dan kebanggaan. Namun di sisi lain, keragaman merupakan tantangan besar yang harus dihadapi bangsa Indonesia.⁶⁹ Pada masa pasca Orde Baru, kegagalan untuk mengatasinya telah menimbulkan konflik seperti yang terjadi di Sambas Kalimantan Barat, Maluku, Poso di Sulawesi Selatan, Ambon, Aceh dan Papua berperan dalam pemeliharaan keharmonisan sosial dan politik di antara masyarakat. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari upaya untuk mengelola keragaman. Seperti yang dikatakan Muhammad Fahmi, pendidikan multikultural dikonseptualisasikan sebagai pendidikan yang menekankan pada kebutuhan untuk menumbuhkan dan menerapkan wawasan dan sikap multikultural di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Pada intinya adalah penerimaan keragaman budaya manusia.⁷⁰ Dalam implementasinya, pendidikan multikultural menuntut inklusivitas dan penghargaan terhadap keragaman. Kesadaran multikultural berperan penting dalam menciptakan toleransi, solidaritas, inklusivitas, dan pengakuan. Oleh karena itu,

⁶⁹ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 5.

⁷⁰ Fahmi, Muhammad, M. Ridwan Nasir, and Masdar Hilmy. "Islamic education in a minority setting: the translation of multicultural education at a local pesantren in Bali, Indonesia." *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 15.2 (2020): 345-364.

pendidikan multikultural akan membantu mahasiswa PBBI memahami, mengenal, dan menghargai keragaman budaya, suku, agama, dan lainnya dalam masyarakat. Pendidikan multikultural memungkinkan individu untuk merasakan, menghargai, dan berperilaku dalam sistem budaya tertentu yang berbeda dengan budayanya sendiri.

Keenam, pendidikan seumur hidup. Pendidikan merupakan kewajiban yang utama bagi umat Islam. Bahkan dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa pendidikan harus dijalani oleh setiap orang selama masa hidupnya. Selogan masyarakat dunia “education for all” yang ditetapkan UNESCO juga mengandung prinsip pembelajaran seumur hidup. Oleh sebab itu, materi yang diberikan di Madrasah Diniyah Takmiliyah, selain dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman keilmuan kepada siswa, juga harus dikembangkan sebagai pendorong utama bagi tumbuhnya semangat belajardiada henti dan untuk semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, Bali menjadi pusat pendidikan yang membuka akses pendidikan bagi masyarakat seluasluasnya dan berlangsung seumur hidup.

2. Problematika Layanan Pendidikan Islam dalam Konteks Minoritas

Seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang majemuk, artinya masyarakat yang tersusun atas berbagai identitas sosial, seperti identitas keagamaan, keetnisan, profesi, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan muncul pemikiran sosiologis terkait adanya masyarakat

majemuk ini, yakni konsekuensi – konsekuensi terhadap beberapa hal penting mengenai kehidupan sosial, diantaranya: stabilitas dan harmoni sosial. Hal yang pasti yaitu munculnya masalah dalam relasi mayoritas-minoritas. Contohnya umat Islam yang sulit mendirikan masjid di wilayah minoritas Muslim, atau umat Muslim minoritas yang tidak diperbolehkan menggunakan pengeras suara pada saat mengumandangkan adzan, dan lain sebagainya.⁷¹

Lebih spesifik dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan Islam di daerah Muslim minoritas, tentu juga ditemui berbagai permasalahan. Misalnya tidak adanya tempat ibadah muslim di sekolah, pada saat pelaksanaan shalat jumat, dalam beberapa kasus, kami mendapati siswa muslim tidak diberi kesempatan untuk shalat karena proses pembelajaran masih berlangsung. Bahkan ruang kelas khusus bagi siswa untuk mata pelajaran Pendidikan Islam juga tidak tersedia. Meski tidak semuanya mendapat perlakuan yang seperti itu, namun mayoritas dari sekolah yang kami teliti setidaknya mengonfirmasi adanya celah pendiskriminasian terhadap siswa muslim. Selanjutnya masalah terbesar dalam mengoptimalkan pembelajaran PAI yaitu kurangnya atau bahkan tidak adanya guru PAI di beberapa sekolah⁷², ada juga yang merangkap di banyak sekolah sehingga kualitas pembelajaran tidak efektif. Bahkan di suatu sekolah

⁷¹ Agustin, Rizkika, Kasuwi Saiban, and Mufarrihul Hazin. "Problematika Pendidikan Islam di Daerah Minoritas Muslim." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21.02 (2021): 156.

⁷² R Rusmayani. The Potrait of PAI and Budi Pekerti's Learning in Public School on Earth Minority. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3(1) (2019).

daerah minoritas Muslim ditemukan guru Pendidikan Islam yang bukan Muslim.

Selain itu para guru PAI di daerah minoritas Muslim itu sendiri juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang menjerat mereka. Wahib melakukan penelitian tentang pergulatan Pendidikan Islam yang ada di Bali. Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan bahwa para guru Pendidikan Islam di Bali juga menghadapi berbagai problem yang meliputi berbagai ranah kehidupan mereka, di antaranya sebagai berikut:⁷³

Di sekolah atau kelas tidak mendapatkan meja kerja sendiri, dianggap tidak ada, tidak pernah mendapatkan posisi struktural yang berarti, dilibatkan sebagai panitia hanya sekedar untuk peran-peran kecil. 2. Input siswa dengan kemampuan rendah 3. Situasi yang tidak mendukung, misalnya tidak adanya tempat mengajar yang memadai, mengajar di luar jam belajar, proses belajar mengajar mata pelajaran PAI yang bersamaan dengan latihan kesenian yang menggunakan musik dengan suara keras, dan lain-lain. 4. Tidak adanya mushalla 5. Saat tiba shalat jumat, proses pembelajaran masih tetap berlangsung 6. Problem sosial lainnya antara lain: realitas sosial masyarakat sekitar yang berlawanan dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan di sekolah, lingkungan masyarakat adat yang kolot, mengajar di berbagai sekolah untuk mengejar target jam kerja, atau memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah yang tidak memiliki guru PAI.

⁷³ Lihat A Wahib, "Pergulatan Pendidikan Islam di Kawasan Minoritas Muslim", *Walisongo*, 19(2): (2011).

Mengarifi problematika layanan Pendidikan Islam di daerah minoritas, Azyumardi Azra berpendapat bahwa hal ini tidak terlepas dari pemberlakuan otonomi atau desentralisasi pendidikan. Pemberlakuan otonomi atau desentralisasi pendidikan dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap Pendidikan Islam, termasuk madrasah dan pondok pesantren.⁷⁴ Hal ini terjadi karena desentralisasi pendidikan tidak melibatkan lembaga – lembaga pendidikan Islam termasuk madrasah atau pesantren.

Di sisi lain, lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut harus mengikuti perubahan tersebut. Terlebih bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam di daerah minoritas Muslim, kondisi tersebut tentu sangat tidak menguntungkan. Pemerintah daerah yang dikuasai oleh kelompok mayoritas non-Muslim pasti sangat kecil kemungkinannya memberikan perhatian terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam, sehingga kebijakan-kebijakannya akan sangat diskriminatif dan kurang bahkan tidak pernah menyentuh lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kebijakan – kebijakan tersebut semakin diskriminatif manakala Pemerintah daerah yang masih salah tafsir dalam memahami peraturan Mendagri yang sebetulnya tidak melarang Pemerintah daerah memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam (madrasah).⁷⁵ Modernisasi menuntut diferensiasi sistem pendidikan untuk mengantisipasi dan

⁷⁴ Azyumardi Azra, "Desentralisasi Pendidikan dan Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap pendidikan Islam." *Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan Madrasah* 4.1 (2000).

⁷⁵ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III* (Jakarta: Prenada Media, 2019).

mengakomodasi berbagai diferensiasi sosial, teknik, manajerial. Antisipasi dan akomodasi tersebut haruslah dijabarkan dalam bentuk kurikulum, tata kelola kelembagaan, manajemen sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana, dan seterusnya.

Terlebih lagi, Kementerian Agama selaku instansi pemerintah yang menggawangi layanan Pendidikan Islam itu sendiri juga kurang – untuk enggan mengatakan tidak – memiliki penganggaran memadai bagi penyelenggaraan kebutuhan guru PAI, sehingga sulit melakukan realisasi anggaran berdasarkan asas keadilan dan pemerataan, serta terjadi perlakuan yang berbeda antara madrasah negeri dan swasta, antara madrasah perkotaan dan madrasah pedesaan, dan antara madrasah di daerah mayoritas Muslim dan madrasah di daerah minoritas Muslim.⁷⁶

Di samping permasalahan diskriminasi, masalah besar lain yang dihadapi madrasah pasca diberlakukannya otonomi daerah yaitu peran atau partisipasi masyarakat. Bagi masyarakat mayoritas nonmuslim, Pendidikan Islam tidak hanya dijadikan sebagai bukan kebutuhan mereka, tetapi juga dipandang membahayakan keyakinan mereka sehingga harus dijauhi dan dihindari, khususnya bagi mereka yang masih berpegang teguh pada keyakinan agama mereka. Hal ini berimbas dari sisi input siswa, lembaga pendidikan Islam akan sangat sulit memperoleh siswa dari kalangan nonMuslim.

⁷⁶ Azra, *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*.

3. Tantangan dan Hambatan Layanan Pendidikan Islam dalam Dimensi Minoritas

Pasca-reformasi, tata relasi hubungan kekuasaan yang sentralistik luluh lantak. Negara sentral (baca: Orde Baru) dengan kekuasaannya yang hampir mutlak hancur dalam tataran simbol kekuasaan sentralistik. Kekuasaan akhirnya menyebar dalam institusi-institusi negara di tingkat provinsi, kabupaten, kelurahan, dan juga tingkat desa. “Negara lokal” desa Pakraman di Kota Denpasar Bali pun tertimpa rembusan kekuasaan ini. Semangat otonomi daerah sebagai salah satu wadah untuk membangun civil society di Denpasar semakin kuat, sehingga desa Pakraman seolah-olah menjadi reinkarnasi dari negara baru bagi masyarakat Bali. Mereka menempatkan desa Pakraman sebagai benteng pertahanan terakhir budaya Bali. Beragam gerakan dan program-program dibuat untuk melestarikan tradisi dari kepunahan. Pemerintah dan masyarakat Bali mulai memopulerkan jargonnya “Ajeg Bali”. Bahwa Bali harus kembali ke barak, artinya bahwa Bali harus dibangun berdasarkan kultur Bali, dan kultur Bali dibangun bernafas Hindu.⁷⁷

Keinginan Bali untuk mengatur perda-perda yang bernuansa “syariat” Hindu mulai diberlakukan,⁷⁸ walaupun

⁷⁷ Kunawi Basyir, "Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 8.1 (2013): 15-16.

⁷⁸ Menurut Peraturan Daerah No. 3 tahun 1991, secara umum jenis pariwisata dalam pengembangannya didasarkan pada kebudayaan Bali yang bernafaskan agama Hindu dengan menjaga keselarasan hubungan antar-pariwisata dan masyarakat serta kebudayaannya. Demikian juga Gubernur Bali I Made Mangku Pastika berkali-kali mengungkapkan bahwa dengan adat, budaya, dan agama yang satu, yaitu agama Hindu

demikian perda-perda tersebut tetap memberikan peluang pada agama-agama lain untuk hidup berdampingan, karena kultur ini merupakan kultur yang telah dibangun Bali sejak adanya kerajaan-kerajaan kecil di Bali seperti kerajaan Waturenggong di Klungkung dan Kerajaan Badung di Denpasar.⁷⁹ Pada masa-masa kerajaan inilah istilah *menyama braya* (aku adalah engkau, dan engkau adalah aku) dipopulerkan. Namun karena adanya modernisasi dan hegemoni politik Orde Baru, tradisi tersebut sedikit demi sedikit tidak begitu menonjol pada masyarakat Bali. Dengan demikian, salah satu “Ajeg Bali” yang harus diangkat kembali adalah “*menyama braya*”.

Budaya *menyama braya* merupakan salah satu budaya yang meneguhkan toleransi antarumat beragama di Kota Denpasar Bali. Konsep kunci yang dipegang teguh oleh umat Hindu sebagai pedoman dalam meneguhkan kerukunan antarumat beragama adalah “Tat Twam Asi” dan “Yama Niyama Brata”.⁸⁰ “Tat Twam Asi” yang berarti aku adalah engkau, sedangkan “Yama Niyama Brata” yang berarti engkau adalah aku. Menurut masyarakat Bali, apabila kita menyayangi dan mengasihi diri sendiri, maka kita harus berkata dan berbuat kepada orang lain sebagaimana berbuat pada diri kita sendiri. Apabila prinsip-prinsip ini bisa kita jalankan, maka kedamaian hidup di dunia ini akan bisa diwujudkan. Melalui penerapan

adalah modal dasar untuk mewujudkan keamanan berlandaskan adat, budaya, dan agama. Lihat juga Basyir, "Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali", 1-27.

⁷⁹ Lihat Bimas Islam Kemenag, *Islam di Bali; Sejarah Masuknya Agama Islam ke Bali* (Denpasar: Dirjen Bimas Islam Provinsi Bali, 2009).

⁸⁰ Arjawa, I. G. P., and Bagus Suka. "The Social Integration of Hindu and Muslim Communities: The Practice of *menyama-Braya* in Contemporary Bali." *Studia Islamika* 28.1 (2021): 149-178.

konsep tersebut, lahirilah beberapa konsep operasional dalam kebudayaan Bali seperti ngupoin, mapitulun,⁸¹ mejenukan,⁸² ngejot,⁸³ dan lain-lain. Semua itu merupakan salah satu bentuk jalinan kerukunan antarumat beragama di Denpasar Bali.

Komunitas keturunan Muslim Bugis di Denpasar dan Kabupaten Badung di Bali telah mempraktekkan *menyama-braya* (persaudaraan) dengan rekan-rekan mereka yang beragama Hindu. Hal ini telah menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka dan memastikan bahwa perbedaan agama tidak menjadi titik ketegangan. *Menyama-braya* mengharuskan orang-orang dari agama yang berbeda saling membantu melalui berbagai kegiatan antaragama, seperti kunjungan kelompok, kunjungan kelompok tari, dukungan dan penjangkauan komunal, dan sebagainya. Praktik-praktik ini telah melahirkan stabilitas dan harmoni sosial.⁸⁴

⁸¹ Ngupoin, mapitulung adalah membantu tetangga, teman, dan kerabat dalam hal persiapan upacara. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Denpasar seperti ketika akan diadakan upacara-upacara baik pernikahan, upacara adat maupun upacara yang lain umat Islam dan Hindu saling membaur untuk membantu menyelesaikan acara yang akan dilaksanakan, mulai dari keamanan sampai pada masalah perlengkapan. Sedangkan perbedaan antara ngupoin dengan mapitulung adalah kalau ngupoin biasanya digunakan dalam hal orang yang punya hajatan. Sedangkan mapitulung digunakan ketika akan mengadakan upacara keagamaan. Lihat Basyir, Kunawi. "Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 8.1 (2013): 16-17.

⁸² Majenukan artinya ikut menyelesaikan acara, baik acara hajatan maupun acaraacara ritual keagamaan yang ada di Bali. Lihat Basyir, Kunawi. "Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 8.1 (2013): 16-17.

⁸³ Ngejot adalah membagikan makanan (daging) kepada tetangga dan kerabat terdekat yang ada di sekitarnya. Tradisi ini biasanya dijalankan menjelang hari Raya Nyepi bagi umat Hindu, dan menjelang hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam. Lihat Basyir, Kunawi. "Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 8.1 (2013): 16-17.

⁸⁴ Arjawa, I. G. P., and Bagus Suka. "The Social Integration of Hindu and Muslim Communities: The Practice of *menyama-Braya* in Contemporary Bali." *Studia Islamika* 28.1 (2021): 149-178.

Sejatinya kultur Bali tidak mendiskriminasikan kelompok atau golongan tertentu, hanya saja memang diakui tradisi Ajeg Bali cukup bisa dijadikan “tameng” bagi warga Bali yang tidak menyukai golongan tertentu tumbuh subur di Bali. Terlebih pasca tragedi Bom Bali 1 dan 2 yang merusak citra Islam sebagai agama pembawa pesan damai. Di sinilah tantangan dan sekaligus hambatan yang harus menjadi perhatian bersama para stakeholders terkait layanan Pendidikan Islam di daerah minoritas muslim, layaknya Bali.

B. Layanan Pendidikan Islam dalam Prespektif Pengaruh Minoritas, Kontak, dan Konstruksi Sosial

1. Layanan Pendidikan Islam dalam Perspektif Pengaruh Minoritas

Pertama, teori pengaruh minoritas (*minority influence*). Istilah pengaruh minoritas (*minority influence*) merujuk pada bentuk pengaruh sosial yang dikaitkan dengan paparan posisi minoritas yang konsisten dalam suatu kelompok. Pengaruh minoritas umumnya baru dirasakan setelah jangka waktu tertentu, dan cenderung menghasilkan penerimaan pribadi terhadap pandangan yang diungkapkan oleh minoritas. Beberapa penelitian tentang pengaruh sosial sampai tahun 1970-an terutama berkaitan dengan pengaruh mayoritas.⁸⁵ Serge Moscovici (1976, 1980, 1985), misalnya, merupakan tokoh yang paling menonjol dalam penelitian pengaruh minoritas, mengemukakan bahwa pengaruh mayoritas bukanlah satu-satunya proses pengaruh dalam kehidupan sosial.⁸⁶ Minoritas tidak hanya menjadi target tetapi juga sumber pengaruh dalam situasi kelompok. Perubahan sosial, seperti yang telah diamati dalam sejarah (lihat contoh Galileo, Darwin, Freud, atau gerakan hak-hak sosial), seringkali merupakan hasil dari pertanyaan

⁸⁵ Allen, V. L. (1965). Situational factors in conformity. In L. Berkowitz (Ed.), *Advances in Experimental Social Psychology* (Vol. 2, pp. 133–175). New York: Academic Press; Asch, S. E. (1951). Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgments. In H. Guetzhaw (Ed.), *Groups, Leadership, and Men* (pp. 177–190). Pittsburgh, PA: Carnegie Press.

⁸⁶ Moscovici, Serge, and Gabriel Mugny. "Minority influence." *Basic group processes*. Springer, New York, NY, 1983. 41-64; Gardikiotis, Antonis. "Minority influence." *Social and personality psychology compass* 5.9 (2011): 679-693.

minoritas tentang norma-norma dan menghadapi apa yang diterima begitu saja.⁸⁷

Meski demikian, minoritas dapat menjadi agen inovasi dan perubahan sosial bagi ikatan masyarakat jika mengajukan ide-ide alternatif dan orisinal. Mereka, bahkan, dapat menciptakan konflik sosial (*social conflict*) dengan mengajukan proposisi alternatif terhadap persepsi masyarakat yang *established*. Minoritas biasanya merupakan kelompok kecil yang mempertanyakan norma-norma sosial. Ikatan minoritas mempengaruhi pemikiran, sikap, dan perilaku orang dengan menjadi konsisten dan fleksibel dalam negosiasi mereka dengan anggota mayoritas.⁸⁸ Pengaruh mereka acapkali laten (yaitu, terbukti pada tindakan tertunda, tidak langsung, dan privasi) *ketimbang* konkrit. Mereka mempengaruhi jumlah, dan kualitas, pemrosesan kognitif pesan mereka (dipicu oleh tuntutan elaborasi yang berbeda dari situasi pengaruh).

Mengikuti Serge Moscovici, bahwa setiap teori tentang mekanisme pengaruh minoritas harus mempertimbangkan dua fakta berikut. *Pertama*, seperti yang telah dijelaskan di muka, pengaruh minoritas tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan

⁸⁷ Gardikiotis, "Minority influence", 679-693' Studi Anne Maass menunjukkan bahwa orang cenderung mengalah pada mayoritas di depan umum (kepatuhan publik dalam paradigma konformitas), sementara menerima posisi minoritas secara pribadi (penerimaan pribadi dalam paradigma pengaruh minoritas). Lihat Maass, Anne, and Russell D. Clark. "Hidden impact of minorities: Fifteen years of minority influence research." *Psychological Bulletin* 95.3 (1984): 428.

⁸⁸ *Minority is a group of people of the same race, culture, or religion who live in a place where most of the people around them are of different race, culture, or religion*. Lihat Stephen Bullons, et. all (eds.), *Collins Build Learner's Dictionary* (London: Harper Collins Publishers, 1996), 698; Ahmad Imam Mawardi, *FIQH MINORITAS Fiqh Al-Aqalliyyât dan Evolusi Maqâshid al-Syarî'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 42.

satu jenis kekuasaan (atau ketergantungan) atau lainnya, karena alasan yang kuat bahwa minoritas tidak memilikinya.⁸⁹ Mereka tidak memiliki sarana kontrol atau alat kekuasaan yang memadai, dan mereka tidak memiliki sumber daya sosial yang memungkinkan mereka untuk memaksakan pandangan mereka, selain membuat mereka diketahui (dan mereka biasanya hanya memiliki akses terbatas atau tidak sama sekali ke media informasi). Oleh karena itu, penjelasan yang menjelaskan pengaruh mayoritas tidak dapat diterapkan dalam konteks ini.

Fakta kedua yang harus diperhatikan adalah kita terbiasa berpikir bahwa sumber pengaruh berhutang pengaruhnya justru pada fakta bahwa ia dihormati, disukai, dan kompeten, dan seterusnya. Namun, pada mulanya minoritas tidak memiliki citra sosial yang positif. Ia dipandang menyimpang, tidak kompeten, tidak masuk akal, tidak menarik, dan tidak kreatif, apalagi memiliki kuasa (*power*).⁹⁰ Minoritas berakar dalam konteks ketegangan dan konflik sosial, dan seluruh kompleksitas konteks normatif ini harus diperhitungkan untuk menjelaskan pengaruh mereka.⁹¹ Hanya setelah proses sosial yang mengarah pada peningkatan hambatan terhadapnya dan pemaksaan (sampai batas tertentu atau lainnya) inovasinya, minoritas akan mencapai titik di mana ia bahkan dapat dilihat sebagai menarik.

⁸⁹ Moscovici, Serge Ed, Angelica Ed Mucchi-Faina, and Anne Ed Maass. *Minority influence*. Nelson-Hall Publishers, 1994, 46.

⁹⁰ Moscovici, Serge Ed, Angelica Ed Mucchi-Faina, and Anne Ed Maass.

⁹¹ Mugny, G., & Papastamou, S. *L'influence du social dan l'influence sociale*. In S. Moscovici, G. Mugny, & E. Van Avermaet, *Perspectives on minority influence*. Cambridge: Cambridge University Press-L.E.P.S., 1983.

Juga penting untuk dicatat bahwa isi dari proposisi minoritas tidak dapat digunakan sebagai penjelasan. Ini bukan karena isinya tidak penting, atau karena kebaruan dan orisinalitasnya tidak menarik.⁹² Jelas faktor kebaruan dan orisinalitas mutlak diperlukan. Namun, itu sangat jarang, bahkan dalam sains di mana sebagian besar teori harus “berjuang” dan menggunakan sarana persuasi untuk menegaskan diri mereka sendiri. Para ilmuwan yang mengajukannya berada dalam situasi minoritas, seperti yang disaksikan oleh Heisenberg salah satu pencipta mekanika kuantum:⁹³ “Maka, secara keseluruhan, adalah mungkin untuk menyimpulkan dalam retrospeksi bahwa pada abad ini telah terjadi dua revolusi besar dalam ilmu pengetahuan kita, yang telah menggeser dasar-dasar fisika dan dengan demikian mengubah seluruh bangunan subjek. Kita sekarang harus bertanya bagaimana perubahan radikal seperti itu terjadi, atau untuk menempatkannya dalam istilah yang lebih sosiologis, meskipun juga cukup menyesatkan bagaimana sekelompok kecil fisikawan mampu membatasi yang lain untuk perubahan ini dalam struktur ilmu pengetahuan dan pikiran? Tak perlu dikatakan bahwa yang lain pada awalnya menolak perubahan, dan terikat untuk melakukannya”.⁹⁴

Bukti konkrit dari minoritas yang mempengaruhi mayoritas adalah gerakan hak pilih di tahun-tahun awal abad ke-

⁹² Moscovici, Serge Ed, Angelica Ed Mucchi-Faina, and Anne Ed Maass. *Minority influence*. Nelson-Hall Publishers, 1994, 46.

⁹³ Heisenberg, W. *Across the frontiers*. New York: Harper Torchbooks, 1975, 157.

⁹⁴ Heisenberg, W. *Across the frontiers*. New York: Harper Torchbooks, 1975, 157.

20.⁹⁵ Sekelompok hak pilih yang relatif kecil berargumen kuat untuk pandangan yang awalnya tidak populer bahwa perempuan harus diizinkan untuk memilih. Kerja keras para pemilih, dikombinasikan dengan keadilan kasus mereka, akhirnya membuat mayoritas menerima pandangan mereka. Studi konformitas melibatkan kelompok minoritas yang menyesuaikan diri dengan mayoritas. Moscovici (1976, 1980) berpendapat di sepanjang garis yang berbeda. Ia mengklaim bahwa Asch (1951) dan yang lainnya terlalu menekankan gagasan bahwa mayoritas dalam suatu kelompok memiliki pengaruh besar terhadap minoritas. Menurutnya, minoritas juga bisa mempengaruhi mayoritas.⁹⁶

Sebenarnya Asch setuju dengan Moscovici. Ia juga merasa bahwa pengaruh minoritas memang terjadi, dan berpotensi menjadi masalah yang lebih krusial untuk dipelajari – dan alasan mengapa beberapa orang mungkin mengikuti pendapat minoritas dan menolak tekanan kelompok.⁹⁷ Dalam konteks ini, Moscovici membuat perbedaan antara kepatuhan (*compliance*) dan konversi (*conversion*). Kepatuhan adalah Suatu kondisi (misalnya Asch) di mana para peserta secara terbuka beradaptasi dengan norma-norma kelompok namun secara pribadi menolaknya. Sedangkan, konversi melibatkan bagaimana minoritas dapat mempengaruhi mayoritas. Dalam arti, meyakinkan mayoritas bahwa pandangan minoritas benar. Hal

⁹⁵ Moscovici, Serge, and Gabriel Mugny. "Minority influence." Basic group processes. Springer, New York, NY, 1983. 41-64.

⁹⁶ Larsen, Knud S. "The Asch conformity experiment: Replication and transhistorical comparison." *Journal of Social Behavior and Personality* 5.4 (1990): 163.

⁹⁷ Moscovici, Serge, and Gabriel Mugny. "Minority influence", 41-64.

ini dapat dicapai dengan beberapa cara yang berbeda (misalnya konsistensi, fleksibilitas).⁹⁸

Konversi berbeda dengan kepatuhan karena biasanya melibatkan penerimaan publik dan pribadi terhadap pandangan atau perilaku baru (yaitu internalisasi). Moscovici berpendapat bahwa pengaruh mayoritas cenderung didasarkan pada kepatuhan publik (*public compliance*).⁹⁹ Hal ini merupakan kasus pengaruh sosial normatif. Dalam hal ini, kekuatan angka itu penting - mayoritas memiliki kekuatan (*power*) untuk memberi apresiasi dan hukuman dengan persetujuan dan ketidaksetujuan. Dan karena ini kemudian memunculkan tekanan sosial pada minoritas untuk menyesuaikan diri. Karena mayoritas acapkali tidak peduli tentang apa yang minoritas pikirkan tentang mereka, pengaruh minoritas jarang didasarkan pada pengaruh sosial normatif. Sebaliknya, didasarkan pada pengaruh sosial informasional – memberi ide-ide segar dan baru, informasi baru yang mengarahkan mereka untuk merevis kembali pandangan mereka.

Selain itu, pengaruh minoritas melibatkan penerimaan pribadi (yaitu internalisasi)- mengubah mayoritas dengan meyakinkan mereka bahwa pandangan minoritas itu benar. Setidaknya, terdapat empat faktor utama yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari minoritas untuk memiliki pengaruh atas mayoritas, yaitu gaya perilaku (*behavioral style*),

⁹⁸ Moscovici, Serge, and Gabriel Mugny.

⁹⁹ Moscovici, Serge, and Gabriel Mugny.

gaya berpikir (*style of thinking*), fleksibilitas (*flexibility*), dan identifikasi (*identification*).

Pertama, Gaya perilaku (*behavioral style*). Terdiri dari 4 komponen: (1) Konsistensi: Minoritas harus konsisten dalam berpendapat, (2) Keyakinan akan kebenaran ide dan pandangan yang mereka presentasikan, (3) Tampak tidak memihak, (4) Menolak tekanan sosial dan pelecehan (*resisting social pressure and abuse*). Moscovici (1969) menyatakan bahwa aspek yang paling penting dari gaya perilaku adalah konsistensi dengan orang yang memegang posisi mereka.¹⁰⁰ Konsisten dan tidak berubah dalam suatu pandangan akan lebih mempengaruhi mayoritas daripada jika minoritas tidak konsisten dan berubah-ubah pikirannya. Moscovici (1969) menyelidiki gaya perilaku (konsisten / tidak konsisten) pada pengaruh minoritas dalam studi biru-hijaunya. Dia menunjukkan bahwa minoritas yang konsisten lebih berhasil daripada minoritas yang tidak konsisten dalam mengubah pandangan mayoritas.¹⁰¹

Konsistensi sangat penting dimiliki oleh minoritas guna mengimbangi kelompok oposisi yang konsisten sehingga kelompok mayoritas kembali mempertimbangkan kelompok minoritas dalam setiap keputusannya. *Kedua*, Konsistensi memberi kesan bahwa minoritas yakin bahwa mereka benar dan berkomitmen pada sudut pandang mereka. Juga, tatkala

¹⁰⁰ Moscovici, Serge, Elisabeth Lage, and Martine Naffrechoux. "Influence of a consistent minority on the responses of a majority in a color perception task." *Sociometry* (1969): 365-380; Moscovici, Serge, and Claude Faucheux. "Social influence, conformity bias, and the study of active minorities." *Advances in experimental social psychology*. Vol. 6. Academic Press, 1972. 149-202.

¹⁰¹ Moscovici, Serge, Elisabeth Lage, and Martine Naffrechoux. "Influence of a consistent minority on the responses of a majority in a color perception task", 365-380.

mayoritas dihadapkan dengan seseorang dengan kepercayaan diri dan dedikasi untuk mengambil pendirian populer dan menolak untuk mendukungnya, mereka mungkin menganggap bahwa dia ada benarnya. Secara tidak langsung, minoritas yang konsisten mengganggu norma-norma yang sudah mapan dan menciptakan ketidakpastian, keraguan, dan konflik. Hal ini dapat menyebabkan mayoritas menganggap serius pandangan minoritas. Oleh karena itu, mayoritas akan lebih cenderung mempertanyakan pandangan mereka sendiri.¹⁰²

Untuk mengubah pandangan mayoritas, minoritas harus mengajukan posisi yang jelas dan harus mempertahankan dan mengadvokasi posisinya secara konsisten. Dalam konteks ini, terdapat dua bentuk konsistensi yang dapat dirujuk oleh kelompok minoritas, yaitu (1) Konsistensi Diakronis (*diachronic Consistency*)— yaitu konsistensi dari waktu ke waktu – mayoritas mendukung senjatanya, tidak mengubah pandangannya, (2) konsistensi sinkronis (*synchronic consistency* – yaitu konsistensi antara anggotanya – semua anggota setuju dan saling mendukung.¹⁰³

Kedua, Gaya Berpikir (style of thinking). Gaya berpikir kelompok minoritas tidak boleh dianggap remeh. Mengikuti teori pengaruh minoritas, bahwa mereka dapat menjadi agen inovasi dalam memainkan setiap keputusan yang ada. Bahkan, mereka mampu memantik konflik sosial jika kelompok

¹⁰² Moscovici, Serge, and Claude Faucheux. "Social influence, conformity bias, and the study of active minorities", 149-202

¹⁰³ Moscovici, Serge, and Gabriel Mugny. "Minority influence", 41-64.

mayoritas berani mengusik dan mempersulitnya hingga pada taraf dan gradasi tertentu.¹⁰⁴

Smith, misalnya, menjelaskan bahwa minoritas dapat mendominasi gaya berpikir dan meneguhkan argumentasi mereka secara saintifik guna mempengaruhi mayoritas.¹⁰⁵ Jika minoritas bisa mendapatkan dominasi untuk mendiskusikan dan memperdebatkan argumen yang diajukan minoritas, kemungkinan pengaruh mereka akan lebih kuat.¹⁰⁶

Ketiga, Fleksibilitas dan Kompromi. Sejumlah peneliti mempertanyakan apakah konsistensi saja cukup bagi minoritas untuk mempengaruhi mayoritas.¹⁰⁷ Mereka berpendapat bahwa kuncinya adalah bagaimana mayoritas menafsirkan konsistensi. Jika minoritas yang konsisten dilihat sebagai tidak fleksibel, kaku, tanpa kompromi dan dogmatis, mereka tidak akan mengubah pandangan mayoritas. Namun, jika mereka tampak fleksibel dan berkompromi, mereka cenderung dianggap tidak terlalu ekstrem, lebih moderat, kooperatif, dan masuk akal. Akibatnya, mereka akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengubah pandangan mayoritas jika mereka memiliki

¹⁰⁴ Baker, Sara M., and Richard E. Petty. "Majority and minority influence: Source-position imbalance as a determinant of message scrutiny." *Journal of personality and social psychology* 67.1 (1994): 5.

¹⁰⁵ Smith, Christine M., R. Scott Tindale, and Bernard L. Dugoni. "Minority and majority influence in freely interacting groups: Qualitative versus quantitative differences." *British Journal of Social Psychology* 35.1 (1996): 137-149.

¹⁰⁶ Nemeth, Charlan, and John Rogers. "Dissent and the search for information." *British Journal of Social Psychology* 35.1 (1996): 67-76.

¹⁰⁷ De Vries, Nanne K., et al. "Majority and minority influence: A dual role interpretation." *European review of social psychology* 7.1 (1996): 145-172; Nemeth, Charlan J., et al. "The liberating role of conflict in group creativity: A study in two countries." *European journal of social psychology* 34.4 (2004): 365-374; Perez, Juan A., Stamos Papastamou, and Gabriel Mugny. "'Zeitgeist' and minority influence—where is the causality: A comment on Clark (1990)." *European Journal of Social Psychology* 25.6 (1995): 703-710.

fleksibilitas dan kompromi dalam gradasi tertentu sejauh menyangkut aspirasi mereka.¹⁰⁸ Beberapa peneliti, Nemeth, misalnya, telah melangkah lebih jauh dan menyarankan bahwa bukan hanya penampilan fleksibilitas dan kompromi yang penting tetapi fleksibilitas dan kompromi yang sebenarnya.¹⁰⁹

Keempat, Identifikasi. Orang cenderung mengidentifikasi diri dengan orang yang mereka lihat mirip dengan diri mereka sendiri. Misalnya, pria cenderung mengidentifikasi diri dengan pria, orang Asia dengan orang Asia, remaja dengan remaja, dan sebagainya. jika mayoritas mengidentifikasikan diri dengan minoritas, maka mereka cenderung menganggap serius pandangan minoritas dan mengubah pandangan mereka sendiri sejalan dengan pandangan minoritas. Sebagai contoh, satu penelitian menunjukkan bahwa minoritas gay, misalnya, yang memperdebatkan hak-hak gay memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap mayoritas lurus daripada minoritas lurus yang memperdebatkan hak-hak gay.¹¹⁰ Mayoritas non-gay diidentifikasi dengan minoritas non-gay. Mereka cenderung melihat minoritas gay sebagai berbeda dari diri mereka sendiri, sebagai kepentingan diri sendiri dan peduli dengan mempromosikan tujuan khusus mereka sendiri.¹¹¹

¹⁰⁸ Mugny, Gabriel, and Stamos Papastamou. "When rigidity does not fail: Individualization and psychologization as resistances to the diffusion of minority innovations." *European Journal of Social Psychology* 10.1 (1980): 43-61.

¹⁰⁹ Peterson, Randall S., and Charlan J. Nemeth. "Focus versus flexibility majority and minority influence can both improve performance." *Personality and Social Psychology Bulletin* 22.1 (1996): 14-27.

¹¹⁰ Clark III, Russell D., and Anne Maass. "Social categorization in minority influence: The case of homosexuality." *European Journal of Social Psychology* 18.4 (1988): 347-364.

¹¹¹ Clark III, Russell D., and Anne Maass. "Social categorization in minority influence: The case of homosexuality", 347-364.

Dari paparan di atas, sebagian besar penelitian tentang topik ini mengaitkan pengaruh minoritas dengan perubahan sosial dan inovasi. Minoritas telah dianggap sebagai penantang stabilitas sosial, dan dinamika mereka telah dipertimbangkan dalam kaitannya dengan mekanisme di mana perubahan sosial terjadi dan norma-norma yang mapan dimodifikasi dan berkembang dalam masyarakat manusia. Dalam penelitian ini, kami mencoba memperluas sudut pandang tersebut dengan argumen bahwa itu hanya mewakili satu sisi dari bahasan yang jauh lebih kompleks. Kami mempertimbangkan kondisi di mana minoritas menghasilkan perubahan sosial serta kondisi di mana mereka, sebaliknya, cenderung mempertahankan *status quo*. Lebih dari itu, kami menggunakan pendekatan integratif yang berbeda - yaitu, identitas sosial, dominasi sosial, dan sistem pembenaran - mungkin berkontribusi untuk memperluas kerangka teoritis pengaruh minoritas.

2. Layanan Pendidikan Islam dalam Perspektif Kontak

Teori kedua, yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah teori kontak. Teori Kontak merupakan salah satu teori klasik yang berfungsi menjelaskan fenomena relasi antar kelompok, terutama yang terkait dengan konflik antar kelompok. Teori ini pertama kali diintrodusir oleh Gordon Allport pada tahun 1954 di tengah banjirnya aksi rasialis dan konflik antar

kelompok etnis yang mendera Amerika Serikat.¹¹² Melalui teori ini, Allport menawarkan sebuah gagasan yang kemudian menjadi salah satu konsep terpenting dalam psikologi sosial khususnya tentang relasi antarkelompok.¹¹³ Menurutny, salah satu cara mengurangi aksi rasialis dan konflik antar etnis adalah dengan menginputkan beberapa kelompok yang berbeda (mungkin satu, dua orang) untuk terlibat dalam kontak. Dengan melibatkan mereka, maka prasangka yang menjadi sumber utama aksi rasialis dan semacamnya dapat diminimalisir – bahkan direduksi hingga titik nihil.

Teori kontak sendiri telah banyak digunakan dalam penelitian yang mendiskusikan fenomena relasi antar kelompok, tidak terkecuali dalam penelitian ini. Secara umum, konsep dasar teori ini adalah bagaimana mereduksi atau meminimalisir prasangka dan diskriminasi antar kelompok dengan cara melibatkan kelompok yang berbeda berpartisipasi aktif di dalamnya.¹¹⁴ Asumsinya, jikalau individu terlibat di dalamnya maka akan terjadi kontak dan interaksi sehingga gradasi prasangka yang mulanya tinggi menjadi berkurang, yang pada gilirannya akan terbina sebuah jalinan yang positif – atau dalam bahasa Durkheim –, kohesi sosial. Teori ini, juga meyakini

¹¹² Vezzali, Loris, and Sofia Stathi, eds., *Intergroup contact theory: Recent developments and future directions* (Routledge, 2016); Dovidio, John F., Samuel L. Gaertner, and Kerry Kawakami. "Intergroup contact: The past, present, and the future." *Group processes & intergroup relations* 6.1 (2003): 5-21.

¹¹³ Zuma, Buhle. "Contact theory and the concept of prejudice: Metaphysical and moral explorations and an epistemological question." *Theory & Psychology* 24.1 (2014): 40-57; Afandi, Ichlas Nanang, Faturochman Faturochman, and Rahmat Hidayat. "Teori Kontak: Konsep dan Perkembangannya." *Buletin Psikologi* 29.2 (2021): 178-186.

¹¹⁴ Afandi, Ichlas Nanang, Faturochman Faturochman, and Rahmat Hidayat. "Teori Kontak: Konsep dan Perkembangannya." *Buletin Psikologi* 29.2 (2021): 178-186.

bahwa masuknya unsur-unsur individu yang berbeda ke dalam sebuah kontak tertentu akan meningkatkan kualitas relasi di antara mereka.¹¹⁵ Kemudian, kontak antar kelompok yang berjaln kelindan disebut dengan *intergroup contact theory* atau *intergroup contact hyphotesis* yang proposisinya bahwa peningkatan kontak antar dua kelompok yang berlainan identias sosial akan mengubah persepsi masing-masing yang tadinya negatif menjadi positif, yang tadinya kurang akrab menjadi akrab, dan seterusnya.¹¹⁶

Menurut Allport, ada empat ciri positif dari situasi kontak yaitu (a) status yang sama di antara kelompok-kelompok (*equal status between the groups*), (b) tujuan bersama (*common goals*), (c) kerja sama antarkelompok (*intergroup cooperation*), dan (d) dukungan otoritas, hukum, atau kustom (*the support of authorities, law, or custom*).¹¹⁷

Pertama, status kelompok yang setara dalam situasi tertentu (*equal group status in the situation*). Status kelompok yang setara dalam situasi status yang sama seringkali sulit untuk didefinisikan dan para peneliti menggunakan istilah tersebut

¹¹⁵ Pettigrew, Thomas F., and Linda R. Tropp. "A meta-analytic test of intergroup contact theory." *Journal of personality and social psychology* 90.5 (2006): 75; Laursen, Finn. *Eu enlargement*. Bruxelles, Belgium, Peter Lang Verlag, 2013.

¹¹⁶ Laursen, Finn. *Eu enlargement*. Bruxelles, Belgium, Peter Lang Verlag, 2013; Afandi, Ichlas Nanang, Faturochman Faturochman, and Rahmat Hidayat. "Teori Kontak: Konsep dan Perkembangannya." *Buletin Psikologi* 29.2 (2021): 178-186; Al Ramiah, Ananthi, and Miles Hewstone. "Intergroup contact as a tool for reducing, resolving, and preventing intergroup conflict: Evidence, limitations, and potential." *American Psychologist* 68.7 (2013): 527.

¹¹⁷ Dovidio, John F., Peter Glick, and Laurie A. Rudman, eds. *On the nature of prejudice: Fifty years after Allport*. John Wiley & Sons, 2008, 264-266.

dengan cara yang berbeda.¹¹⁸ Yang terpenting adalah bahwa kedua kelompok merasakan status yang setara (*equal status*) dalam situasi tersebut.¹¹⁹ Beberapa peneliti menekankan bahwa kelompok harus memiliki status yang sama dalam situasi kontak.¹²⁰ Namun, penelitian menunjukkan bahwa status yang setara dalam situasi tersebut efektif dalam mempromosikan sikap antarkelompok yang positif (*positive intergroup attitudes*) bahkan ketika kelompok-kelompok tersebut pada awalnya berbeda statusnya.¹²¹

Kedua, tujuan bersama (*common goals*). Kontak yang efektif biasanya melibatkan upaya aktif menuju tujuan yang di-sharing-kan oleh kelompok. Tim sepakbola atau tim olahraga beregu, misalnya, menjadi bukti untuk itu.¹²² Dalam upaya untuk menang, tim yang terdiri dari anggota kelompok yang berbeda harus bekerja sama dan saling mengandalkan untuk mencapai

¹¹⁸ Riordan, C. (1978). Equal-status interracial contact: A review and revision of the concept. *International Journal of Intercultural Relations*, 2, 161–85.

¹¹⁹ ohn, E. G. (1982). Expectation states and interracial interaction in school settings. *Annual Review of Sociology*, 8, 209–35; Riordan, C. & Ruggiero, J. (1980). Producing equal-status interracial interaction: A replication. *Social Psychology Quarterly*, 43, 131–6; Robinson, J. W. & Preston, J. D. (1976). Equal status contact and modification of racial prejudice: A reexamination of the contact hypothesis. *Social Forces*, 54, 911–24; Dovidio, John F., Peter Glick, and Laurie A. Rudman, eds. On the nature of prejudice: Fifty years after Allport, 265.

¹²⁰ Brewer, M. B. & Kramer, R. M. (1985). The psychology of intergroup attitudes and behavior. *Annual Review of Psychology*, 36, 219–43; Foster, D. & Finchilescu, G. (1986). Contact in a “non-contact” society: The case of South Africa. In M. Hewstone & R. Brown (eds.), *Contact and conflict in intergroup encounters* (pp. 119–36). Oxford: Blackwell.

¹²¹ Patchen, M. (1982). Black–white contact in schools. West Lafayette, IN: Purdue University Press; Schofield, J. W. & Eurich-Fulcer, R. (2001). When and how school desegregation improves intergroup relations. In R. Brown & S. L. Gaertner (eds.), *Blackwell handbook of social psychology: Intergroup processes* (pp. 475–94). Malden, MA: Blackwell.

¹²² Patchen, M. (1982). Black–white contact in schools. West Lafayette, IN: Purdue University Press; Chu, D. & Griffey, D. (1985). The contact theory of racial integration: The case of sport. *Sociology of Sport Journal*, 2, 323–33.

tujuan bersama.¹²³ Pertimbangan ini mengarah pada karakteristik ketiga dari kontak antarkelompok yang efektif.

Ketiga, kerjasama antar kelompok (*Intergroup cooperation*). Pencapaian tujuan bersama harus menjadi upaya yang saling bergantung berdasarkan kerjasama *ketimbang* kontestasi. Sherif mendemonstrasikan prinsip ini dalam studi lapangan *Robbers' Cave* mereka yang terkenal.¹²⁴ Para peneliti ini dengan cerdas merancang penghalang untuk tujuan bersama sebagaimana piknik terencana yang hanya bisa diatasi dengan kerja sama kedua kelompok. Kerjasama antar kelompok yang kemudian berlangsung mendorong berkembangnya hubungan positif antar kelompok.¹²⁵ Kerjasama antar kelompok di sekolah memberikan lebih banyak bukti.¹²⁶ Dipandu oleh pendapat Allport, pendekatan "jigsaw" Elliot Aronson menyusun ruang kelas sehingga beragam kelompok siswa berusaha secara kooperatif untuk menggapai tujuan bersama.¹²⁷ Penerapan

¹²³ Dovidio, John F., Peter Glick, and Laurie A. Rudman, eds. On the nature of prejudice: Fifty years after Allport, 265.

¹²⁴ Sherif, M., Harvey, O. J., White, B. J., Hood, W. R., & Sherif, C. W. (1961). Intergroup conflict and cooperation: The Robbers Cave experiment. Norman, OK: University of Oklahoma Book Exchange.

¹²⁵ Dovidio, John F., Peter Glick, and Laurie A. Rudman, eds. On the nature of prejudice: Fifty years after Allport, 265.

¹²⁶ Brewer, M. B. & Miller, N. (1984). Beyond the contact hypothesis: Theoretical perspectives on desegregation. In N. Miller & M. B. Brewer (eds.), Groups in contact: The psychology of desegregation (pp. 281–302). Orlando: Academic Press; Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Maruyama, G. (1984). Goal interdependence and interpersonal-personal attraction in heterogeneous classrooms: A meta-analysis. In N. Miller & M. B. Brewer (eds.), Groups in contact: The psychology of desegregation (pp. 187–212). Orlando: Academic Press; Schofield, J. W. (1989). Black and White in school: Trust, tension, or tolerance? New York: Teachers College Press; Slavin, R. E. (1983). Cooperative learning. New York: Longman.

¹²⁷ Aronson, E. & Patnoe, S. (1997). The jigsaw classroom: Building cooperation in the classroom (2nd ed.). New York: Addison Wesley Longman; Stephan, W. G. & Stephan, C. W. (2000). An integrated threat theory of prejudice. In S. Oskamp (ed.), Reducing prejudice

langsung teori kontak ini telah membawa hasil positif bagi anak-anak di seluruh dunia, termasuk di Australia,¹²⁸ Jerman,¹²⁹ Jepang,¹³⁰ dan Amerika Serikat.¹³¹ Tidak hanya bagi masyarakat dunia, teori sosial kontak telah berhasil membawa masyarakat Indonesia menuju corak keragaman yang harmonis dan multikultural, selain kultur Indonesia yang mendukung atmosfer harmonis, inklusif dan toleransi. Di Bali, misalnya, manifestasi teori kontak sosial telah membantu memulihkan trauma masyarakat Bali pasca bom Bali 1 dan 2 serta berhasil merekonsiliasi masyarakat Hindu Bali dengan kelompok muslim sehingga kembali apa yang disebut Durkheim sebagai kohesi sosia (*social cohesion*).¹³²

and discrimination (pp. 23–46). Hillside, NJ: Erlbaum; Dovidio, John F., Peter Glick, and Laurie A. Rudman, eds. On the nature of prejudice: Fifty years after Allport, 265.

¹²⁸ Walker, I. & Crogan, M. (1998). Academic performance, prejudice, and the jigsaw classroom: New pieces to the puzzle. *Journal of Community and Applied Social Psychology*, 8, 381–93.

¹²⁹ Eppler, R. & Huber, G. L. (1990). Wissenserwerb im Team: Empirische Untersuchung von Effekten des Gruppen-Puzzles. [Knowledge acquisition in a team: Empirical investigation of the effects of group puzzles.] *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 37, 172–8.

¹³⁰ Araragi, C. (1983). The effect of the jigsaw learning method on children's academic performance and learning attitude. *Japanese Journal of Educational Psychology*, 31, 102–12.

¹³¹ Aronson, E. & Patnoe, S. (1997). *The jigsaw classroom: Building cooperation in the classroom* (2nd ed.). New York: Addison Wesley Longman.

¹³² McKean, Philip Frick. "Tourism, culture change, and culture conservation in Bali." *Changing identities in modern Southeast Asia* (1976): 237–248; Kestenberg-Amighi, Janet. "Contact and Connection: A Cross-Cultural Look at Parenting Styles in Bali and the United States." *Zero to Three* (J) 24.5 (2004): 32–39; Arjawa, I. Gst Pt Bagus Suka, and Zulkifli Zulkifli. "The Social Integration of Hindu and Muslim Communities: The Practice of "Menyama-Braya" in Contemporary Bali." *Studia Islamika* 28.1 (2021): 149–178; Sures, J. S. "Culture contact and social change through tourism: Crossroads of an international village on Bali (Indonesia)." Unpub-lished Ph. D. thesis, University of California, San Diego (1994); Fahmi, Muhammad, M. Ridwan Nasir, and Masdar Hilmy. "Islamic education in a minority setting: the translation of multicultural education at a local pesantren in Bali, Indonesia." *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 15.2 (2020): 345–364; Basyir, Kunawi. "Membangun kerukunan antarumat beragama berbasis budaya lokal Menyama Braya di Denpasar Bali." *Religio Jurnal Studi Agama-agama* 6.2 (2016): 186–206; Basyir,

Keempat, dukungan otoritas, hukum, atau tradisi (*support of authorities, law, or custom*). Kontak antarkelompok juga akan memiliki efek yang lebih positif jika ditunjang oleh dukungan eksplisit dari otoritas dan lembaga sosial. Sanksi otoritas (*authority sanction*) menetapkan norma-norma penerimaan dan pedoman tentang bagaimana anggota kelompok yang berbeda harus berinteraksi satu sama lain. Penelitian lapangan telah menunjukkan pentingnya sanksi otoritas dalam militer,¹³³ bisnis,¹³⁴ dan pengaturan agama.¹³⁵ Secara lebih luas, pengesahan undang-undang hak-hak sipil telah berperan dalam membangun norma-norma antiprasangka dalam masyarakat Amerika kontemporer - seperti yang diprediksi Allport dalam bab 29-nya ("Haruskah Ada Hukum?" atau *Ought There to be a Law?*).¹³⁶

Menggabungkan prinsip-prinsip ini, formulasi Allport telah memandu penelitian tentang kontak antarkelompok (*intergroup contact*) selama setengah abad terakhir. Dan minat pada potensi kontak antarkelompok untuk mengurangi prasangka terus tumbuh selama bertahun-tahun. Para peneliti telah mengejar studi tentang kontak antarkelompok

Kunawi. "The 'Acculturative Islam' as a Type of Home-Grown Islamic Tradition: Religion and Local Culture in Bali." *Journal of Indonesian Islam* 13.2 (2019): 326-349.

¹³³ Landis, D., Hope, R. O., & Day, H. R. (1984). Training for desegregation in the military. In N. Miller & M. B. Brewer (eds.), *Groups in contact: The psychology of desegregation* (pp. 258–78). Orlando: Academic Press.

¹³⁴ Morrison, E. W. & Herlihy, J. M. (1992). Becoming the best place to work: Managing diversity at American Express travel related services. In S. E. Jackson and associates (eds.), *Diversity in the workplace: Human resources initiatives* (pp. 203–26). New York: Guilford.

¹³⁵ Parker, J. H. (1968). The interaction of Negroes and Whites in an integrated church setting. *Social Forces*, 46, 359–66.

¹³⁶ Allport, G. W. (1954/1979). *The nature of prejudice*. Cambridge, MA: Perseus Books.

menggunakan berbagai pendekatan penelitian, termasuk studi lapangan, misalnya, Deutsch & Collins,¹³⁷ dan lain sebagainya. Memang, literatur penelitian tentang kontak antarkelompok telah berkembang secara substansial selama setengah abad terakhir, baik dalam jumlah studi kontak yang dilakukan dan jangkauan kelompok yang diperiksa.

Ringkasnya, teori kontak sosial mengatakan bahwa orang-orang hidup bersama dalam masyarakat sesuai dengan kesepakatan yang menetapkan aturan moral dan politik perilaku. Beberapa orang percaya bahwa jika kita hidup sesuai dengan kontrak sosial, kita dapat hidup secara moral dengan pilihan kita sendiri dan bukan karena makhluk ilahi membutuhkannya. Seperti penjelasan di muka, tidak hanya bagi masyarakat dunia, teori sosial kontak telah berhasil membawa masyarakat Indonesia menuju corak keragaman yang harmonis dan multikultural, selain kultur Indonesia yang mendukung atmosfir harmonis, inklusif dan toleransi. Di Bali, misalnya, manifestasi teori kontak sosial telah membantu memulihkan trauma masyarakat Bali pasca bom Bali 1 dan 2 serta berhasil merekonsiliasi masyarakat Hindu Bali dengan kelompok muslim sehingga kembali apa yang disebut Durkheim sebagai kohesi sosia (*social cohesion*).¹³⁸

¹³⁷ Deutsch, M. & Collins, M. (1951). *Interracial housing: A psychological evaluation of a social experiment*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

¹³⁸ McKean, Philip Frick. "Tourism, culture change, and culture conservation in Bali." *Changing identities in modern Southeast Asia* (1976): 237-248; Kestenberg-Amighi, Janet. "Contact and Connection: A Cross-Cultural Look at Parenting Styles in Bali and the United States." *Zero to Three* (J) 24.5 (2004): 32-39; Arjawa, I. Gst Pt Bagus Suka, and Zulkifli Zulkifli. "The Social Integration of Hindu and Muslim Communities: The Practice of" *Menyama-Braya*" in *Contemporary Bali*." *Studia Islamika* 28.1 (2021): 149-178; Scures, J. S. "Culture contact and social change through tourism: Crossroads of an international village

3. Layanan Pendidikan Islam dalam Perspektif Konstruksi Sosial

Teori kelima, adalah konstruksi sosial-nya Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Berger dan Luckmann memperkenalkan istilah konstruksi sosial (*social construction*) ke dalam ilmu-ilmu sosial dan dipengaruhi oleh karya Alfred Schütz. Konsep sentral mereka adalah bahwa orang-orang dan kelompok-kelompok yang berinteraksi dalam suatu sistem sosial menciptakan, dari waktu ke waktu, konsep-konsep atau representasi mental dari tindakan masing-masing, dan bahwa konsep ini kemudian menjadi habitus dalam peran timbal balik yang dimainkan oleh para aktor dalam hubungannya satu sama lain. Ketika peran-peran ini tersedia bagi anggota masyarakat lainnya untuk masuk dan bermain, interaksi timbal balik dapat dikatakan sebagai *institutionalized* (dilembagakan).¹³⁹ Dalam prosesnya, proses ini berjalan *embedded* dalam masyarakat. Pengetahuan dan konsepsi (dan keyakinan) masyarakat tentang realitas apa yang menjadi tertanam dalam struktur kelembagaan masyarakat. Oleh karena itu, realitas dapat dikatakan dikonstruksi secara sosial.

on Bali (Indonesia)." Unpub-lished Ph. D. thesis, University of California, San Diego (1994); Fahmi, Muhammad, M. Ridlwan Nasir, and Masdar Hilmy. "Islamic education in a minority setting: the translation of multicultural education at a local pesantren in Bali, Indonesia." *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 15.2 (2020): 345-364; Basyir, Kunawi. "Membangun kerukunan antarumat beragama berbasis budaya lokal Menyama Braya di Denpasar Bali." *Religio Jurnal Studi Agama-agama* 6.2 (2016): 186-206; Basyir, Kunawi. "The 'Acculturative Islam' as a Type of Home-Grown Islamic Tradition: Religion and Local Culture in Bali." *Journal of Indonesian Islam* 13.2 (2019): 326-349.

¹³⁹ Peter L Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (Penguin Uk, 1991), 45.

Untuk dapat melihat sejauh mana realitas sosial, Berger dan Luckmann mencirikannya dengan intersubjektivitas di mana mengacu pada koeksistensi berbagai realitas dalam konteks ini.¹⁴⁰ “*Compared to the reality of everyday life, other realities appear as finite provinces of meaning, enclaves within the paramount reality marked by circumscribed meanings and modes of experience*” (Dibandingkan dengan realitas kehidupan sehari-hari, realitas-realitas lain muncul sebagai domain makna yang terbatas, ruang-ruang di dalam realitas tertinggi yang ditandai oleh makna-makna terbatas dan cara-cara pengalaman).

Hal ini tentu berbeda dengan realitas lain, seperti mimpi, konstruksi teoretis, keyakinan agama atau mistik, dunia artistik dan imajiner, dan sebagainya. Sementara individu dapat mengunjungi realitas lain (seperti menonton film), mereka selalu dibawa kembali ke realitas sehari-hari (setelah film berakhir). Individu memiliki kapasitas untuk merefleksikan realitas ini, termasuk ke dalam realitas sosial sehari-hari mereka sendiri. Jenis refleksi ini sering disebut sebagai refleksivitas (*reflexivity*). Sungguhpun demikian, refleksivitas harus mengacu pada beberapa “*source material*” (bahan sumber) atau berakar pada intersubjektivitas. Dengan demikian, Ketika agen menjalankan kapasitas refleksif mereka, mereka membawa masa lalu yang terdiri dari pengalaman sosial yang terakumulasi atau terendapkan ke dalam stok pengetahuan yang memberikan panduan yang diperlukan guna menjalani kehidupan mereka dan menafsirkan realitas sosial mereka”.

¹⁴⁰ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality*, 122.

Dalam konteks ini, Berger memandang bahwa realitas realitas sosial memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi objektif dan subjektif. Dalam artian, masyarakat adalah mereka yang berada di luar diri manusia sebagai kenyataan objektif (*objective reality*), sedangkan individu dipandang sebagai kenyataan subjektif dalam masyarakat (*subjective reality*). Dengan kata lain, manusia adalah pencipta realitas sosial itu sendiri yang melalui serangkaian proses eksternalisasi (*externalized*), objektivasi dan kemudian institusionalisasi. Eksternalisasi merupakan penyesuaian diri dengan sosial-budaya sebagai produk manusia di mana penyesuaian itu akan membentuk individu yang mencerminkan realitas subjektif melalui proses internalisasi.¹⁴¹ Konsekuensinya, guna memahami realitas sosial perlu mengoneksikan realitas objektif dan subjektif yang mana Berger menyebutnya dengan proses institusionalisasi atau realitas sosial itu perlu dilembagakan dalam masyarakat. Termasuk realitas sosial dalam penelitian ini adalah adanya layanan Pendidikan Islam bagi siswa minoritas muslim di SMA/SMK di Denpasar, Bali yang berjalan secara sporadis, meski kerukunan antar umat beragama terjalin dengan harmonis.

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, menyebutkan bahwa individu merupakan aktor aktif yang membentuk realitas sosial yang objektif melalui dialektik yang berjalan secara simultan dalam proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.¹⁴² Teori ini mengindikasikan bahwa terdapat

¹⁴¹ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality*, 78.

¹⁴² Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality*, 5; Nurul Himatil 'Ula and Senata Adi Prasetya, 'Performative Analysis of Rajah Syekh Subakir In Tawing Village, Trenggalek

proses menarik keluar (*externalized*), sehingga seakan-akan hal tersebut berada di luar (objektif). Proses ini dilanjutkan dengan proses penarikan kembali ke dalam (*internalized*), sehingga sesuatu yang berada di luar seakan-akan berada dalam diri atau kenyataan subjektif. Pemahaman akan realitas yang dianggap objektif pun terkonfigurasi, melalui proses eksternalisasi dan objektifikasi individu menjadi bagian dari produk sosial, sehingga dapat dikatakan, setiap individu memiliki pengetahuan dan identitas sosial sesuai dengan peran institusional yang terbentuk atau yang diperankannya. Eksternalisasi adalah ekspresi diri manusia ke luar baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Proses ini merupakan bentuk pengaktualisasian diri untuk menunjukkan eksistensi individu dalam masyarakat. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai produk manusia (*society is a human product*).¹⁴³

Tahap kedua dari teori konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) adalah objektivasi. Ia didefinisikan sebagai hasil dari proses eksternalisasi yang berupa realitas objektif. Apa yang diekspresikan oleh manusia lantas menjadi kredo yang berdiri sendiri. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai realitas yang objektif (*society is an objective reality*) atau proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi.¹⁴⁴ Tahap ketiga adalah internalisasi.

Perspective Of Living Qur'an', *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 21, no. 2 (29 July 2020): 313–30, <https://doi.org/10.14421/qh.2020.2102-04>.

¹⁴³ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*.

¹⁴⁴ Berger and Luckmann.

Internalisasi adalah penyerapan kembali realitas objektif ke dalam kesadaran subjektif manusia. Melalui internalisasi, manusia beradaptasi terhadap perubahan yang dilakukannya sendiri. Masyarakat kini berfungsi sebagai pelaku performatif bagi kesadaran individu. Agar tidak teralienasi, manusia harus mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat tempat ia berada (*man is a social product*).¹⁴⁵

Dalam hal ini, proses internalisasi dilakukan salah satunya melalui pelembagaan atau institusionalisasi. Seperangkat nilai dan pengetahuan dalam proses ini menjadi *guidance* (pedoman) dalam melakukan pemaknaan terhadap tindakan di mana tindakan itu adalah bagian inheren sehingga apa yang disebut sebagai kesadaran (*awareness*), sesungguhnya adalah apa yang terefleksi dari tindakan. Layanan Pendidikan Islam bagi siswa minoritas muslim di Bali salah satunya dapat dibaca melalui teori ini. Layanan Pendidikan Islam tersebut bukanlah kepura-puraan belaka, melainkan ada realitas sosial yang melingkupinya, sehingga dalam hal ini untuk memahami dan menganalisis layanan tersebut, teori konstruksi sosial Peter Berger menjadi pilihan dalam penelitian ini.

¹⁴⁵ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*.

BAB 4

EKSISTENSI SISWA MINORITAS MUSLIM DI DENPASAR BALI

Hampir tidak ada yang membantah bahwasannya Bali telah menikmati reputasinya sebagai representasi wilayah yang multikultural dengan segenap destinasi wisata serta kearifan lokalnya yang khas. Kearifan lokal masyarakat Bali dapat dijadikan landasan untuk memperkuat pelaksanaan program pendidikan yang berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter bangsa. Bahkan, Pendidikan karakter bangsa yang diperkuat dengan kearifan lokal masyarakat Bali yang berbasis nilai diyakini mampu mencetak generasi muda Bali yang berkarakter Indonesia. Manifesto kearifan lokal (*local wisdom*) sangat berperan dalam mewujudkan situasi sosial yang harmonis yang salah satunya dapat dilakukan melalui integrasi sosial.¹⁴⁶ Integrasi merupakan suatu kondisi di mana masyarakat mampu saling menghargai perbedaan, kompleksitas situasi sosial dan meminimalisir perbedaan melalui praktik kehidupan

¹⁴⁶ Arjawa, I. Gst Pt Bagus Suka, and Zulkifli Zulkifli. "The Social Integration of Hindu and Muslim Communities: The Practice of "Menyama-Braya" in Contemporary Bali." *Studia Islamika* 28.1 (2021): 149-178.

sosial.¹⁴⁷ Menyama-braya, misalnya, salah satu bentuk kearifan lokal Bali yang bersifat kohesif sejauh ini bisa merukunkan sesama warga Bali yang sangat multikultural.¹⁴⁸ Jenis kehidupan sosial ini tidak terjadi sesekali; sebaliknya, hal tersebut sudah mendarah daging.

Namun sebelum itu semua, secara historis telah melalui serangkaian ujian dan trial and error yang panjang dan berliku. Pasca-reformasi, misalnya, tata relasi hubungan kekuasaan yang sentralistik luluh lantak. Di era Orde Baru dengan kekuasaannya yang hampir otoriter hancur dalam tataran simbol kekuasaan sentralistik. Kekuasaan akhirnya menyebar dalam institusi-institusi negara di tingkat provinsi, kabupaten, kelurahan, dan juga tingkat desa. Terlebih, ketika terjadi tragedi bom meledak di Sari Club di Jalan Legian, Kuta, Bali pada 12 Oktober 2002, gelombang kesedihan melanda kehidupan masyarakat Bali. Pemboman oleh ekstremis Muslim menghancurkan perdamaian itu dalam banyak hal yang tidak semuanya ter-*capture* oleh orang luar (*outsider*). Bom tersebut berdampak pada berbagai lapisan masyarakat Bali, mulai dari keuangan dan politik hingga agama, pendidikan, budaya dan filosofis. Bagi masyarakat Bali

¹⁴⁷ Condorelli, Rosalia. "Cultural differentiation and social integration in complex modern societies reflections on cultural diversity management strategies from a sociological point of view." *Sociology Mind* 8.4 (2018): 261; Arjawa, I. Gst Pt Bagus Suka, and Zulkifli Zulkifli. "The Social Integration of Hindu and Muslim Communities: The Practice of" *Menyama-Braya*" in *Contemporary Bali*." *Studia Islamika* 28.1 (2021): 149.

¹⁴⁸ Jati, Wasisto Raharjo. 2013. "Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konlik Keagamaan." *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21(2): 397; Suryawan, I Nyoman. 2016. "Adaptasi Etnik Bugis Mempertahankan Eksistensinya Dalam Era Globalisasi Di Kampung Islam Kepaon, Denpasar Selatan." *Seminar Nasional Riset Inovatif* 4: 562–72; Suryawan, Nyoman. 2017. "Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial dalam Integrasi Antara Etnik Bali dan Etnik Bugis di Desa Petang, Badung, Bali." *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 7(1): 17–32.

seolah-olah keseimbangan yang halus dan harmonis antara yang baik dan yang jahat telah dihancurkan.¹⁴⁹

Dalam cara orang Bali melihat alam semesta, kebaikan dan kejahatan selalu hidup berdampingan. Di seluruh seni, agama, dan filsafat Bali, selalu ada referensi tentang gagasan keseimbangan alam semesta yang mengakui keberadaan kedua kekuatan, *rwa bhineda*. Tidak seperti konsep Barat yang dominan dan simplistik tentang perlunya mengalahkan kejahatan dan membagi dunia antara orang baik dan penjahat, pandangan orang Bali adalah bahwa roh jahat itu ada dan Anda harus berurusan dengan mereka, menenangkan mereka, mengalihkan perhatian mereka atau mengkonversi mereka menjadi semangat yang baik, tetapi Anda tidak pernah mengalahkan mereka. Ketika ketidakseimbangan terjadi dan kejahatan menguat di dunia, Anda harus menciptakan lebih banyak kebaikan untuk mendapatkan kembali keseimbangan, dan kebaikan, upacara kuil dan kewajiban keagamaan kepada masyarakat harus ditingkatkan sebagai tanggapan.¹⁵⁰

Respons beberapa orang Bali terpelajar terhadap situasi baru ini dibahas secara rinci dalam buku Leon Rubin dan I Nyoman Sedana yakni “Perjuangan Intelektual Hindu Bali”, yang diterbitkan pada tahun 1993. Disini Leon Rubin dan I Nyoman Sedana hanya menyoroti perkembangan utama dalam hubungan ini. Pertama-tama Rubin dan Nyoman ingin menunjukkan bahwa agama tradisional Bali, pada

¹⁴⁹ Rubin, Leon, and I. Nyoman Sedana. *Performance in Bali*. Routledge, 2007, 1.

¹⁵⁰ Rubin, Leon, and I. Nyoman Sedana. *Performance in Bali*. Routledge, 2007, 1.

kenyataannya, adalah varian lokal dari Hinduisme. Hal ini memungkinkan orang Bali untuk menggarisbawahi bahwa tidak seperti penduduk pulau-pulau lain di Indonesia, mereka bukanlah penganut beberapa agama suku tetapi agama dunia yang sama kedudukannya dengan Islam dan Kristen. Dengan kata lain, pejabat pemerintah, kebanyakan Muslim atau Kristen, harus menanggapi secara serius. Selain itu mereka berpendapat bahwa terlepas dari pernyataan banyak sarjana Barat, Hindu adalah agama monoteistik. Guru dan pemikir Bali Sri Reshi Anandakusuma (1912-1992) menyatakan bahwa hal ini digarisbawahi oleh keyakinan agama, '*Om sat, ekam ewa adwitiyam*' (Tuhan yang mengatur segalanya, yang menetapkan segalanya, yang abadi, tak terbatas dan mahatahu, pada kenyataannya Dia adalah satu, tanpa sedetik pun). Orang Bali berhasil membujuk pemerintah pusat tentang hal ini pada tahun 1958.¹⁵¹

Respon penting kedua adalah bahwa beberapa pemikir besar Bali modern mulai lebih menekankan aspek emosional dan mistik dari keyakinan mereka. Mereka menganggap bahwa agama tradisional mereka terlalu ritualistik. Dalam hal ini beberapa dari mereka terinspirasi oleh para pemikir Hindu India seperti Mahatma Gandhi (1869-1948), Sivananda (1887-1963) dan Sathya SaiBaba (lahir 1926). Ilmu pengetahuan dan teknologi modern diterima dengan cara yang sangat positif. Ini telah memberikan pengaruh besar pada pandangan realitas umat Hindu Bali modern. Dalam hubungan ini mereka memiliki

¹⁵¹ Rubin, Leon, and I. Nyoman Sedana. *Performance in Bali*. Routledge, 2007, 1-2.

pendahulu dalam pemikir India terkenal seperti Vivekananda (1863-1902), Gandh, ivananda dan Sarvepalli Radhakrishnan (1888-1975), yang ide-idenya merupakan inspirasi besar bagi mereka.¹⁵²

Secara konseptual-teoritis, momen adatasi diri komunitas Muslim (dan agama-agama lain) dan Hindu di Denpasar memperlihatkan jikalau kedua (termasuk beberapa) komunitas tersebut beririsan dengan tradisi keagamaan masing-masing. Momentum semacam ini, bagi umat Hind merujuk pada kitab suci Veda dan Bhagawadgita, yaitu pada Reg Veda X, 191: 2,¹⁵³ Reg Veda X, 191: 4.¹⁵⁴ Sedangkan bagi umat Islam, kitab suci al-Qur'an menjadi dasar rujukan kerukunan antar umat beragama seperti yang termaktub dalam QS. al-Hujurât [49]: 13 dan QS. al-Kâfirûn [109]: 6.¹⁵⁵

Guna tetap mempertahankan kultur Bali, masyarakat Bali merasa memerlukan otonomi daerah khusus dalam rangka membangun civil society sehingga desa Pakraman¹⁵⁶ seolah-olah

¹⁵² Rubin, Leon, and I. Nyoman Sedana. *Performance in Bali*. Routledge, 2007, 1-2.

¹⁵³ Ayat tersebut berbunyi, "Berkumpul-kumpullah, bermusyawarahlah satu sama lain, satukanlah semua pikiranmu, Dewa pada zaman dulu senantiasa dapat bersatu." Departemen Agama RI, *Bhagawadgita* (Jakarta: Bimas Hindu, 1988), 135; Basyir, Kunawi. "Membangun kerukunan antarumat beragama berbasis budaya lokal Menyama Braya di Denpasar Bali." *Religio Jurnal Studi Agama-agama* 6.2 (2016): 189.

¹⁵⁴ Ayat tersebut berbunyi, "Samakanlah tujuanmu, samakanlah hatimu, samakanlah pikiranmu, semoga kau hidup bahagia bersama mereka". Lihat Departemen Agama RI, *Bhagawadgita*, 147; Basyir, Kunawi. "Membangun kerukunan antarumat beragama berbasis budaya lokal Menyama Braya di Denpasar Bali", 189.

¹⁵⁵ Basyir, Kunawi. "Membangun kerukunan antarumat beragama berbasis budaya lokal Menyama Braya di Denpasar Bali", 189.

¹⁵⁶ Desa Pakraman merupakan salah satu desa tradisional yang namanya digali dari nilai kearifan lokal Bali. Lihat Anak Agung Gede Raka, "Antara Desa Adat dan Desa Pakraman", dalam <https://www.balipost.com/news/2019/01/29/67424/Antara-Desa-Adat-dan-Desa....html>, diakses 6 April 2022.

menjadi reinkarnasi dari negara baru bagi masyarakat Bali.¹⁵⁷ Mereka menempatkan desa Pakraman sebagai benteng pertahanan terakhir budaya Bali. Berbagai gerakan dan program dibuat guna melestarikan tradisi dari kepunahan akibat gempuran arus modernisasi dan industrialisasi. Di sisi lain, pemerintah dan masyarakat Bali mulai menggemakan jargon, “*Ajeg Bali*”.¹⁵⁸ Bahwa Bali harus kembali “barak”, dalam arti Bali harus dibangun kembali berdasarkan kultur Bali dan kultur Bali dibangun bernafas Hindu.¹⁵⁹

Dalam konteks demikian, Bali mulai membuat aturan seperti perda atau perbu yang bernuansa Hindu sentris,¹⁶⁰ meskipun perda-perda tersebut tetap memberikan peluang pada

¹⁵⁷ Basyir, Kunawi. "Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 8.1 (2013): 15.

¹⁵⁸ Wacana “Ajeg Bali” (ajeg dalam bahasa Bali berarti tegak) muncul ke permukaan berkaitan dengan terjadinya pergeseran tata norma yang menafsirkan kembali kepribadian masyarakat Bali. Sementara itu, dalam perkembangannya, konsep Ajeg Bali merupakan konsekuensi dari perubahan sosial dan ekonomi di Bali di mana trol atas kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Perubahan ini berkaitan erat dengan membanjirnya investasi domestik dan asing yang kebanyakan mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan lingkungan adat.¹⁵⁸ Salah satu diskusi Ajeg Bali adalah mendorong masyarakat Bali untuk menafsirkan kembali identitas ke-Bali-an mereka dan memperkuat independensi etnis masyarakat Hindu Bali. Dengan kata lain, konsep Ajeg Bali dapat diinterpretasikan sebagai upaya merekonstruksi identitas Bali berdasarkan tradisi, kultur dan agama Hindu Bali. I Nyoman Dharmaputra menegaskan bahwa Ajeg Bali mengilustrasikan keinginan kuat akan independensi kultural dan politik masyarakat Bali termasuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang kerap kali mendikte pemerintah daerah. Lihat Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali." *Masyarakat Indonesia* 37.2 (2017): 139; Ramstedt, Martin. "Menafsirkan kembali tata norma Bali pasca-Orde Baru." *Kegalauan identitas: agama, etnisitas dan kewarganegaraan pada masa pasca-Orde Baru*. Grasindo, 2011. 41-72.

¹⁵⁹ Basyir, Kunawi. "Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali", 15

¹⁶⁰ Menurut Peraturan Daerah No. 3 tahun 1991, secara umum jenis pariwisata dalam pengembangannya didasarkan pada kebudayaan Bali yang bernafaskan agama Hindu dengan menjaga keselarasan hubungan antar-pariwisata dan masyarakat serta kebudayaannya. Demikian juga Gubernur Bali I Made Mangku Pastika berkali-kali mengungkapkan bahwa dengan adat, budaya, dan agama yang satu, yaitu agama Hindu adalah modal dasar untuk mewujudkan keamanan berlandaskan adat, budaya, dan agama. Basyir, Kunawi. "Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 8.1 (2013): 16.

agama-agama lain untuk hidup berdampingan, sebab kultur ini sejatinya telah dibangun Bali sejak adanya kerajaan-kerajaan kecil di Bali seperti kerajaan Waturenggong di Klungkung dan Kerajaan Badung di Denpasar.¹⁶¹ Pada masa-masa kerajaan inilah istilah *menyama braya* (aku adalah engkau, dan engkau adalah aku) bergema dan populer. Namun karena adanya arus modernisasi dan hegemoni politik Orde Baru, tradisi tersebut perlahan-lahan tidak begitu menonjol pada masyarakat Bali.

Denpasar, selaku ibukota Bali, terkhusus Kampung Wanasari atau Kampung Jawa,¹⁶² orang-orang Islam dari Jawa telah bermukim sejak abad ke-19, dipelopori oleh seseorang bernama Iskandar di mana makamnya masih ada hingga sekarang. Demikian halnya dengan orang-orang India dari Gujarat juga bermukim di kampung tersebut. Pada awal abad ke-20, orang-orang di luar Bali mulai berdatangan seperti masyarakat Jawa, Madura, Sunda dan Sasak yang bermukim di Kampung Jawa karena faktor ekonomi.¹⁶³ Kampung Jawa ini dapat dikatakan sebagai miniatur Indonesia yang dihuni oleh Muslim dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa,

¹⁶¹ Pada masa berdirinya kerajaan-kerajaan Nusantara, kerajaan Badung sedang mengalami konflik dengan kerajaan Mengwi. Kerajaan Badung memperoleh bantuan keamanan (tentara Muslim dari kerajaan Bugis), dan kerajaan Badung berhasil memukul mundur kerajaan Mengwi. Fenomena ini merupakan salah satu cikal-bakal Muslim di Kepaon Kota Denpasar. Lihat dalam "Umat Islam Sudah Datang ke Bali semenjak Abad ke-15 M", Bali Pos, 2 Desember 2001; Basyir, Kunawi. "Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 8.1 (2013): 16.

¹⁶² Pada tahun 1960-an, Kampung Jawa namanya diganti oleh Camat pada waktu I Gusti Ngurah Sumarma, untuk menghindari kesan kesukuan menjadi Kampung Wanasari. Lihat Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali." *Masyarakat Indonesia* 37.2 (2017): 115-145.

¹⁶³ Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali." *Masyarakat Indonesia* 37.2 (2017): 127.

Sumatera, Kalimantan, Bugis, Sumbawa dan suku-suku lainnya.¹⁶⁴

Jean-François Guérmonprez, sebagaimana dikutip Kartini mengungkapkan bahwa entitas Hindu Bali (*the Javanized Hindu-Balinese*) dikonstruksi oleh orang-orang Barat dalam upaya mencari "little India" sebagai tempat di mana agama Hindu bisa bertahan.¹⁶⁵ Guérmonprez memandang konstruksi Hinduisme sebagai "ilusi indosentris". Sebagai contoh, orang-orang Bali baru mengetahui kalau identitas mereka adalah Hindu pasca diinformasikan oleh guru-guru kolonial mereka. Hal senada juga diungkapkan Picard bahwa Hindunisasi Bali juga tidak lain untuk memenuhi agenda politik dari penguasa kolonial, yaitu digunakan sebagai benteng atau antitesa menghambat penyebaran Islam dan kemungkinan munculnya nasionalisme.¹⁶⁶ Di sisi lain, rezim kolonial juga khawatir bahwa Kristenisasi dapat membawa runtuhnya seluruh kultur "Hindu Bali".¹⁶⁷ Karenanya, rezim kolonial lebih menghendaki – untuk enggan mengatakan mengedepankan – pelestarian kultur Hindu Bali dengan mengesampingkan perkembangan Islam maupun Kristen (termasuk juga nasionalisme) demi tujuan politik kolonial.

¹⁶⁴ Segara, I. Nyoman Yoga. "Kampung Sindu: Jejak Islam dan Situs Kerukunan di Keramas, Gianyar, Bali." *Jurnal Lektur Keagamaan* 16.2 (2018): 315-346.

¹⁶⁵ Guérmonprez, Jean-François. "La religion balinaise dans le miroir de l'hindouisme." *Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient* (2001): 271-293; Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali." *Masyarakat Indonesia* 37.2 (2017): 127.

¹⁶⁶ Picard, Michel. "The discourse of kebalian: transcultural constructions of Balinese identity." *Staying local in the global village: Bali in the twentieth century* (1999): 21-23.

¹⁶⁷ Hauser-Schäublin, Brigitta. ""Bali Aga" and Islam: Ethnicity, Ritual Practice, and "Old-Balinese" as an Anthropological Construct." *Indonesia* 77 (2004): 30; Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali." *Masyarakat Indonesia* 37.2 (2017): 127.

Jikalau kita telusuri historisitas sejak masa pra-kolonial, akan kita dapati interaksi antara Muslim dengan Hindu Bali. Sebagaimana diungkapkan Hauser-Schäublin yang dikutip Kartini bahwa apa yang terlihat dan tampak mengemuka saat ini sebagai dua agama berbeda, dua kultur berbeda dan dua identitas serta etnisitas berbeda, sesungguhnya di masa lampau dipersepsikan bukan sebagai entitas berbeda melainkan sebagai varian dalam praktik ritual yang berlainan dari satu desa ke desa lain dan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.¹⁶⁸ Sumber awal di era kolonial menyebutkan bahwa apa yang kini disebut “etnisitas”, bukanlah sebuah isu atau wacana di antara masyarakat Bali. Bloemen Waanders, misalnya, seperti yang dikutip Kartini, menyebutkan kesulitan yang ia hadapi tatkala melakukan sensus karena para penguasa dan punggawa di Bali tidak pernah melakukan hal tersebut dan tidak ditemukan pula kategori etnis di kalangan masyarakat.¹⁶⁹

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa Muslim telah bermukim di Bali berabad lamanya dan hidup damai berdampingan dengan masyarakat Hindu. Dialektika dan dinamika mayoritas-minoritas kelompok religius tersebut diwarnai dalam bingkai mutualisme. Realitas sosial demikian ini telah merambah pada berbagai sektor, seperti kebudayaan,

¹⁶⁸ Hauser-Schäublin, Brigitta. "" Bali Aga" and Islam: Ethnicity, Ritual Practice, and" Old-Balinese" as an Anthropological Construct." *Indonesia* 77 (2004): 36; Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali", 127.

¹⁶⁹ van Bloemen Waanders, P. L. *Aanteekeningen omtrent de zeden en gebruiken der Balinezen, inzonderheid die van Boeleleng*. Lange, 1859; Kern, H. "Oudjavaansche eedformulieren op Bali gebruikelijk." *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië* 20.3/4de Afl (1874): 211-228; Hauser-Schäublin, Brigitta. "" Bali Aga" and Islam: Ethnicity, Ritual Practice, and" Old-Balinese" as an Anthropological Construct", 36.

pendidikan, perekonomian, politik, pertanian, arsitektur, dan pengobatan tradisional yang berkelindan sejak masa kerajaan silam.¹⁷⁰

Di bidang kebudayaan, kerjasama antara umat Hindu dan Muslim dapat ditelusuri pada akhir abad ke-19 di Jembrana yang ditandai dengan *seka* (perkumpulan) tari dan nyanyi di bawah pimpinan Pan Nyoling.¹⁷¹ Pan Nyoling diketahui sebagai seorang tokoh Islam yang disegani di desa Mertasari yang masih menggunakan nama Bali. Para anggota perkumpulan ini tidak hanya terdiri dari orang-orang Bali Hindu, namun juga orang-orang Islam yang melakukan pertunjukan keliling di desa-desa sekitarnya.¹⁷² Mengikuti Kartini, demikian halnya dengan istilah-istilah perkawinan yang menggunakan istilah Hindu setempat, seperti "*kedungluh*"¹⁷³, "*morong*",¹⁷⁴ "*makedeng ngad*",¹⁷⁵ dan berbagai istilah lainnya.¹⁷⁶ Termasuk juga urutan nama depan anak-anak masyarakat Bali seperti Wayan (anak

¹⁷⁰ Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali." *Masyarakat Indonesia* 37.2 (2017): 128.

¹⁷¹ Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali." ... 130-131.

¹⁷² Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali."

¹⁷³ Istilah ini digunakan apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan kemudian tinggal di rumah sang istri. Lihat Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali", 131.

¹⁷⁴ Istilah ini digunakan apabila perkawinan berlangsung antara dua keluarga, di mana keluarga yang satu memberi laki-laki saja, keluarga yang lain memberi perempuan saja. Lihat Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali", 131.

¹⁷⁵ Istilah ini digunakan apabila perkawinan berlangsung antara dua keluarga di mana masing-masing keluarga tidak hanya mengambil perempuan namun juga memberi perempuan (tukar kawin). Lihat Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali", 131.

¹⁷⁶ Lihat selengkapnya pada Hemamalini, Kadek, and Untung Suhardi. "Dinamika Perkawinan Adat Bali." *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan* 14.27 (2016): 36-47; Windia, Wayan P. "Pernikahan 'Pada Gelahang.'" *Jurnal Bali Membangun Bali* 1.3 (2018): 219-226.

pertama), Made/Nengah (anak kedua), Komang/Nyoman (anak ketiga), dan Ketut (anak keempat).¹⁷⁷

Kemudian, pada bidang keagamaan – sebagaimana penuturan Kartini –, terdapat Pelinggih Ratu Mekah pada salah satu pura di kawasan Kubutambahan (Pura Kerta Negara Loka) dan kawasan Kuta. Kemudian dikenal juga istilah nyelam dalam sajian orang-orang Hindu, serta istilah *nyama selam* (saudara Islam) dalam hubungan-hubungan sosial di Bali.¹⁷⁸ Juga, di Buleleng terdapat pura yang sangat besar yang mana di atas pura tersebut ada dua tempat raja. Di tempat tersebut tertulis raja Mekkah dan Madinah yang hingga saat ini umat Islam tidak dibenarkan membuat upacara di sana. Ada pula sebuah tempat pemujaan di sana yang disucikan, tetapi dalam upacaranya Al-Quran diletakkan begitu saja di depan pemujaan dan disucikan oleh umat Hindu.¹⁷⁹

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa keharmonisan dan kedamaian yang terjalin erat di antara masyarakat Hindu Bali dengan Muslim tidak menimbulkan gesekan sosial yang berarti. Gesekan (baca: problematika) sosial tersebut sebenarnya bukanlah hal baru di masa kerajaan-kerajaan Bali dan berlangsung hingga sekarang. Pada tahun

¹⁷⁷ Dalam tradisi masyarakat Bali Hindu, sebutan anak kelima kembali ke sebutan anak pertama (Wayan), sementara dalam masyarakat Bali Muslim di Pegayaman, sebutan anak kelima tetap menggunakan sebutan urutan terakhir (Ketut). Murtadho, Muhamad. "WISATA RELIGI DI BALI." *Dialog* 38.1 (2015): 13-28; Temaja, Gede Bagus Wisnu Bayu, and Gede Bagus Wisnu Bayu. "Sistem Penamaan Orang Bali." *Dalam Jurnal Humanika* 24.2 (2017); Bandana, I. G. W. S. "Sistem Nama Orang Bali: Kajian Struktur dan Makna." *Aksara* 27.1 (2015): 1-11.

¹⁷⁸ Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali", 132.

¹⁷⁹ Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali." *Masyarakat Indonesia* 37.2 (2017): 131-132.

1855, misalnya, kehidupan harmonis tersebut sempat terusik di era pemerintahan I Gusti Ngurah Paekan yang mendiskriminasi orang Islam. Padahal, masyarakat Muslim memiliki andil – untuk enggan mengatakan “saham – besar menjadikan I Gusti Ngurah Pasekan sebagai penguasa dengan membantunya mengalahkan rivalnya I Gusti Ngurah Made Rai.¹⁸⁰

Beberapa persoalan tersebut di antaranya dalam hal sulitnya pembangunan masjid dan tanah pemakanan. Dalam pengamatan Kartini, kendala ini antara lain disebabkan oleh penetrasi paradigma Hindu “*Tri Hita Karana*”¹⁸¹ yang menimbulkan potensi konflik asimetris, terutama konsep *palemahan* yang dalam pemahaman Hindu adalah hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Sebenarnya secara konseptual *Tri Hita Karana* adalah baik karena menjunjung tinggi keseimbangan alam, manusia dan Tuhan. Namun, tidak sedikit pula dalam pemaknaannya seringkali dijadikan sebagai justifikasi atau dalih untuk melegalkan dan melegitimasi warga Hindu dalam penggunaan tanah adat. Persoalan ini dapat dijumpai di beberapa wilayah Bali, seperti

¹⁸⁰ Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali." *Masyarakat Indonesia* 37.2 (2017): 134.

¹⁸¹ Tri Hita Karana yang memuat tiga unsur yaitu parhyangan, pawongan, dan palemahan merupakan tema penelitian yang menarik, baik dari segi teologi, sosiologi, antropologi, maupun ekologi. Hal ini mendefinisikan bahwa dalam sejarah pemikiran manusia berkembang tiga tema besar yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga saat ini, yaitu alam, Tuhan, dan manusia. Misalnya, prinsip alam, prinsip moral dan prinsip agama banyak mewarnai teori-teori sosial, antara klasik, modern, dan kontemporer. Lihat Peters, Jan Hendrik. *Tri Hita Karana*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2013; Roth, Dik, dan Gede Sedana. "Reframing Tri Hita Karana: Dari 'Budaya Bali' Menjadi Politik." *Jurnal Antropologi Asia Pasifik* 16.2 (2015): 157-175; Sukarma, I. Wayan. "Tri Hita Karana theoretical basic of moral Hindu." *International journal of linguistics, literature and culture* 2.3 (2016): 102-116.

Denpasar, Badung, Buleleng, dan Jembrana.¹⁸² Namun demikian, persoalan ini dapat dipecahkan atau cenderung lebih mudah diselesaikan ketika berada di daeran pemukiman baru meski tanpa ijin lebih dahulu. Sebagai solusinya, masyarakat Muslim melakukan berbagai pendekatan kepada tokoh Bali agar mereka dapat membangun atau memanfaatkan bangunan sebagai tempat ibadah (masjid).¹⁸³

Persoalan tersebut ternyata tidak berhenti pada aspek tempat ibadah, melainkan juga berdampak pada sektor pendidikan. Warga Muslim di Buleleng, misalnya, merasakan adanya pembatasan dalam mengembangkan pendidikan Islam. Mengutip Kartini, pembangunan masjid Jabal Nur di kawasan pemukiman baru, misalnya, dalam perkembangannya warga Muslim kemudian mendirikan majelis ta'lim dan pengajian anak-anak (TPA). Namun kegiatan tersebut mendapat tantangan dari umat Hindu setempat, bahkan masjid tersebut tidak boleh digunakan lagi dengan alasan tidak ada izin kuat karena dianggap bahwa daerah tempat berdirinya masjid tersebut merupakan bagian dari wilayah desa pakraman (desa adat) yang memiliki otoritas yang besar dalam masyarakat Hindu.¹⁸⁴ Dalam kasus ini terjadi benturan hukum antara desa dinas dengan desa adat. Di satu sisi warga Muslim telah mendapat izin pembangunan masjid dari kelurahan setempat, namun di sisi lain desa adat yang disebut pakraman itu, merasa tidak memberikan

¹⁸² Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali", 135.

¹⁸³ Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali." *Masyarakat Indonesia* 37.2 (2017): 135.

¹⁸⁴ Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali", 135-136.

izin untuk membangun masjid baru sehingga merasa berhak untuk membongkar masjid tersebut. Setelah melalui pendekatan dengan masyarakat adat, masjid tersebut akhirnya tidak jadi dibongkar.¹⁸⁵ Sementara masyarakat Muslim di Jembrana dan di desa Pegayaman Buleleng, tidak menemukan kesulitan berarti dalam membangun masjid mengingat jumlah mereka yang cukup besar dan memiliki identitas dan power yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸⁶

Tidak hanya itu, sampai-sampai lembaga pendidikan Islam sebut saja Pesantren Bali Bina Insani (BBI) Tabanan Bali agar tetap sintas dan eksis hingga hari ini, mereka harus mengakomodasi pengajar nonmuslim sebagai strategi adaptasi daripada pendidikan multikultural di Bali.¹⁸⁷ Bahkan, ada cerita dari pengasuh BBI, sebagaimana dijelaskan Fahmi, ia rela menolak bantuan sekitar 3 Milyar dari instansi pemerintahan pusat demi meredam resistensi masyarakat Hindu dan lebih memilih “mengalah” demi lembaga pesantrennya tetap sintas dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar.¹⁸⁸ Kasus serupa lainnya adalah seorang guru Muslim pernah

¹⁸⁵ Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali." *Masyarakat Indonesia* 37.2 (2017): 136.

¹⁸⁶ Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali." *Masyarakat Indonesia* 37.2 (2017): 136.

¹⁸⁷ Fahmi, Muhammad, M. Ridwan Nasir, and Masdar Hilmy. "Islamic education in a minority setting: the translation of multicultural education at a local pesantren in Bali, Indonesia." *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 15.2 (2020): 345-364; Fahmi, Muhammad. Pendidikan multikultural sebagai strategi adaptasi Pesantren Bali Bina Insani di daerah minoritas muslim Tabanan Bali. Diertasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

¹⁸⁸ Muhammad, M. Ridwan Nasir, and Masdar Hilmy. "Islamic education in a minority setting: the translation of multicultural education at a local pesantren in Bali, Indonesia." *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 15.2 (2020): 345-364; Fahmi, Muhammad. Pendidikan multikultural sebagai strategi adaptasi Pesantren Bali Bina Insani di daerah minoritas muslim Tabanan Bali. Diertasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

terpilih sebagai guru terbaik se-kabupaten Jembrana dan diusulkan untuk berkompetisi di tingkat provinsi Bali. Namun dengan alasan tidak ada dana, akhirnya guru tersebut batal dikirim ke Denpasar mewakili Jembrana. Hal ini dirasakan aneh bagi warga Muslim setempat.¹⁸⁹ Kendala lain bagi siswa sekolah, khususnya siswa SMA, yang harus mendapat izin untuk melaksanakan sholat Jum'at. Kalaupun diberikan izin, muncul dilema lainnya karena pada jam sholat Jum'at ada pelajaran penting yang harus diikuti oleh siswa. Namun di sekolah lainnya seperti di SMP 2 Loloan tidak ada masalah karena bagi siswa yang masuk pagi, di hari Jum'at pulang jam 12, sementara siswa yang masuk siang, masuknya setelah sholat Jum'at.¹⁹⁰

Terlepas dari semua itu, harus diakui bahwa komposisi masyarakat Bali yang semakin plural dan multikultural merupakan modal dasar untuk membangun pola keberagaman yang akan membawa sebuah tatanan sosial yang dinamis. Fenomena seperti itu terjadi di kampung Jawa, kampung Kepaon Denpasar, yang sebagian besar penduduknya berasal dari suku Jawa dan Madura di kampung Jawa, serta suku Makasar dan Bugis di kampung Kepaon.¹⁹¹ Mereka yang hidup di tengah-tengah komunitas Hindu telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, yaitu proses interaksi sosial antarkomunitas Islam dengan Hindu berjalan harmonis, dan nyaris tidak pernah dijumpai konflik yang berarti

¹⁸⁹ Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali", 138.

¹⁹⁰ Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali." *Masyarakat Indonesia* 37.2 (2017): 138.

¹⁹¹ Basyir, Kunawi. "Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 8.1 (2013): 5.

sebagaimana yang dijumpai di daerah-daerah lain di Indonesia. Kondisi harmonis tersebut terjadi karena antar pemeluk agama memiliki kesadaran toleransi dan paradigma multikulturisme yang meniscayakan pemahaman bahwa elemen-elemen sosial-budaya bangsa harus bersifat inklusif dan berani berdialog satu sama lain.¹⁹² Bahkan, masyarakat harus membiarkan elemen-elemen sosial-budaya saling berdialektika, dialog bahkan “bertikai dan berkontestasi” di tingkat epistemologis yang fluid, melting dan tidak represif. Dalam konteks inilah, eksistensi Islam (dan Muslim) termasuk siswa Muslim minoritas di Bali bisa mendapat perlakuan adil dan setara serta berhak mendapatkan layanan Pendidikan Islam yang memadai.

¹⁹² Masdar Hilmy, *Islam Profetik: Substansiasi Nilai-nilai Agama dalam Ruang Publik* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 194.

BAB 5

AKTUALISASI LAYANAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SISWA MUSLIM MINORITAS DI DENPASAR BALI

Beberapa item dalam sub bab ini akan dibahas mengenai aktualisasi layanan Pendidikan Islam bagi peserta didik muslim di SMA/ SMK umum di Denpasar, Bali, peneliti akan memaparkan hasil analisis dari beberapa item dibawah ini. Namun perlu ada beberapa pengertian yang dijadikan pengantar dari pembahasan bab dibawah ini. Sebagaimana makna dari aktualisasi, secara sederhana Abraham Maslow mengartikan sebagai suatu kebutuhan dan pencapaian tertinggi manusia¹⁹³ sehingga bentuk ikhtiar dari layanan Pendidikan Islam yang ditujukan kepada pelanggan atau *customer* muslim yang berada ditengah-tengah mayoritas Hindu di lingkungan sekolah umum.

Demikian perlu adanya suatu gambaran bagaimana peserta didik nonmuslim yang melakukan proses pembelajaran agamanya ditengah-tengah mayoritas muslim, seperti di Jawa,

¹⁹³ Siti Muazaroh and Subaidi Subaidi, “Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah),” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (2019): 17–33. Lihat juga Hendro Setiawan, “Manusia Utuh. Sebuah Kajian Atas Pemikiran Abraham Maslow.” (Penerbit PT Kanisius, 2014).

Sumatera dan atau di Kalimantan. Mereka mencoba menyesuaikan diri, melakukan pembelajaran di ruang berbeda, dan atau bahkan berada pada jam non efektif sehingga perlu atas jawaban peraturan perundang-undangan yang tertuang pada pasal 31 tahun 1945¹⁹⁴ mengenai bagaimana negara memenuhi hak setiap warga untuk mendapatkan Pendidikan yang sesuai dengan keyakinan dalam keberagamaannya.

Dalam pemenuhan tersebut tentunya harus melalui upaya penyetaraan, meskipun secara kebutuhan disesuaikan dengan kuantitas berdasarkan agama atau keyakinan yang dianutnya. Sangat tidak seimbang apabila ditengah-tengah warga sekolah menganut agama Islam, akan tetapi sekolah membangun gereja atau tempat ibadah lain yang jumlahnya sangat sedikit sehingga perlu dalam hal ini bagaimana aktualisasi pelayanan Pendidikan Islam bagi peserta didik muslim yang berada di Denpasar, Bali.

A. Sistem Aktualisasi Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas di Denpasar Bali

1. Penanda Aktualisasi Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas di Denpasar Bali

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai penanda aktualisasi layanan Pendidikan Islam bagi siswa muslim minoritas di Denpasar Bali di antaranya ketersediaan guru,

¹⁹⁴ Ahmad SYAUQI, "Analisa Implementasi Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 Tentang Pemenuhan Anggaran Pendidikan 20 Persen" (PhD Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2009).

layanan sarana prasarana, layanan administrasi, layanan waktu, dan layanan kurikulum (perencanaan hingga evaluasi).

Pertama, ketersediaan guru yang cukup. Sebagaimana amanat Undang-Undang, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Salah satu amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), misalnya, dalam meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia Indonesia adalah meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Lebih-lebih guru PAI atau guru agama, tentu merupakan kebutuhan yang tak terbantahkan. Ketersediaan guru PAI atau guru agama yang cukup merupakan kunci utama bagi keberlangsungan proses pembelajaran.

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 1 dijelaskan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ketersediaan guru yang memadai, merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pembangunan pendidikan di Indonesia, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam rangka pemenuhan ketersediaan guru yang memadai tersebut,

pemerintah masih dihadapkan pada dua permasalahan pokok yang sangat mendasar. Pertama, pemenuhan kebutuhan tenaga guru yang belum sesuai dengan kebutuhan daerah, dan kedua adalah peningkatan kualitas profesional yang belum memenuhi standar minimal.¹⁹⁵ Karena guru merupakan titik sentral dari peningkatan kualitas pendidikan yang bertumpu pada kualitas proses pembelajaran. Oleh sebab itu peningkatan profesionalisme guru merupakan suatu keharusan.

Dalam konteks Bali, harus diakui guru PAI masih sangat minim.¹⁹⁶ Minimnya ketersediaan guru PAI di Bali dikonfirmasi oleh Mahmudi selaku kepala bidang (disebut: Kabid) Dirjen Pendis Kemenag Provinsi Bali. Ia menyebutkan bahwa jumlah guru di kota Denpasar perkiraan 480 guru yang menyebar di semua jenjang.¹⁹⁷ Hal ini juga ditambahkan secara rigid melalui data yang diberikan oleh Ninik, dari 66 SMA/ SMK Umum¹⁹⁸, tidak semua guru Pendidikan Islam di kota Denpasar terdata secara lengkap pada *database* daftar guru PAI SMA/ SMK yang dikelola oleh Kementerian Agama Kota Denpasar. Dari data yang penulis kumpulkan, terdapat 11 daftar guru PAI SMA/ SMK Umum, sehingga dapat dipastikan jumlah guru yang

¹⁹⁵ Intan Dewi Fortuna, “Profesionalisme Guru dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas”, *kompasiana.com*, dalam <https://www.kompasiana.com/intandf/5bede42643322f0bec423bf2/profesionalisme-guru-dalam-mewujudkan-pendidikan-berkualitas>, diakses 18 Oktober 2022.

¹⁹⁶ Setidaknya ada tiga provinsi yang masih kekurangan guru agama termasuk guru PAI yaitu Bali, Nusa Tenggara dan Papua.

¹⁹⁷ Mahmudi, “Wawancara Dengan Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Pkl. 10. 00 Sampai 12.00 WITA Di Kantor Kepala Bidang Pendidikan Islam Kemenag Provinsi Bali,” February 16, 2022.

¹⁹⁸ Pusat Data Denpasar Kota, “Identitas Sekolah SMA/ SMK Di Wilayah Kota Denpasar,” 2021.

terdaftar dan ber-*homebase* sebagai guru SMA/ SMK terdapat 11 dan 55 guru belum terlacak pada *database*.

Selain itu, dari 66 SMA/ SMK yang tersebar di kota Denpasar, hanya terdapat 11 guru PAI saja. Ninik juga menerangkan, ada juga sekolah yang sudah mengusulkan untuk pengadaan guru PAI pada kita, namun sekolah yang mengusulkan (disebut: SMA/ SMK Negeri) tidak menganggarkan nya dan atau bahkan tidak adanya anggaran untuk pengadaan guru di lingkungan kementerian agama Denpasar. Juga demikian terkadang ada sekolah yang secara fakta dilapangan tidak ada sama sekali guru PAI sehingga yang mengisi waktu PAI di kelas adalah guru yang beragama Hindu dan peserta didik hanya ditugaskan untuk mengisi LKS.¹⁹⁹ Demikian juga kondisi guru PAI SMA/ SMK di Denpasar, peneliti juga mendapatkan informasi dari M. Zaini, bahwasanya jumlah guru PAI terdapat 23 guru yang mengampu di SMA/ SMK. Namun juga tidak semuanya ber-Satminkal (*homebase*) di SMA/ SMK baik di swasta maupun negeri.

Dalam hal ini, Amin Haedari selaku Direktur PAI Sekolah Umum Kementerian Agama, berkomentar terkait kebutuhan akan pengangkatan PNS Guru Agama di Kementerian Agama. Berdasarkan data terbaru, saat ini guru PAI di seluruh Indonesia sekitar 198 ribu. Jauh dari itu, ternyata kebutuhan guru PAI jauh lebih banyak. Kalkulasinya, menurut Amin, sudah termasuk sekolah dengan lebih dari satu guru PAI. Selain itu, alokasi

¹⁹⁹ Ninik Surani, “Wawancara Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Oleh Ninik Surani Pada Pkl. 13.00 Sampai 15.30 WITA” (Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Denpasar, February 16, 2022).

pengangkatan guru PAI menjadi kendala utama. Inilah yang merupakan penyebab utama kekurangan guru PAI di Indonesia.²⁰⁰

Dalam pada itu, beberapa tahun terakhir, Kementerian Agama, tidak memiliki alokasi semacam itu. Karena itu, tidak mengherankan jika selama ini kekurangan guru PAI terbantuan dengan hadirnya guru honorer. Harus diakui, guru honorer sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Di sisi lain, hampir 90 persen guru PAI honorer merupakan hasil rekrutmen dan inisiatif pemerintah daerah. Hanya 10 persennya yang ditangani Kementerian Agama setempat. Tak jarang pula ada guru satu mata pelajaran yang harus merangkap mengajar PAI.²⁰¹ Sayangnya, guru PAI honorer tidak bisa langsung diangkat sebab mereka harus melalui tahapan sertifikasi. Menurut Amin, para guru PAI harus mendapat surat ketetapan (SK) dari dinas pendidikan setempat.²⁰² Persoalannya kemudian, status mereka sebagai honorer pemerintah daerah tidak memungkinkan mendapatkan SK tersebut.

Di lain itu, Amin juga menyampaikan keprihatinannya atas nasib guru PAI honorer yang gajinya dibayarkan sesuai kemampuan sekolah karena tak mendapat alokasi APBN. Tahun

²⁰⁰ Fuji Pratiwi, "Jumlah Guru PAI Minim", *Republika.com*, (29 Maret 2014), dalam <https://www.republika.co.id/berita/n2nmpu/jumlah-guru-pai-minim>, diakses 18 Oktober 2022.

²⁰¹ Fuji Pratiwi, "Jumlah Guru PAI Minim", *Republika.com*, (29 Maret 2014), dalam <https://www.republika.co.id/berita/n2nmpu/jumlah-guru-pai-minim>, diakses 18 Oktober 2022.

²⁰² Fuji Pratiwi, "Jumlah Guru PAI Minim", *Republika.com*.

ini rencananya Kemenag akan kembali melakukan pengangkatan guru agama. Bali, Nusa Tenggara Timur dan Papua merupakan tiga provinsi yang sangat kekurangan guru PAI, meski sebenarnya wilayah Jawa pun masih kekurangan guru PAI. Selain tidak terpenuhinya kebutuhan pendidikan agama bagi siswa, Amin mengakui banyak dampak lain yang ditimbulkan, termasuk kebingungan siswa saat harus bertanya tentang pelajaran agama. Dalam keadaan tersebut, peran ulama, civil society, ormas keagamaan dan seluruh stakeholders terkait sangat diharapkan. Mereka, menurut Amin, dapat menambal kekurangan pendidikan agama di sekolah formal.²⁰³

Hal senada juga disampaikan Helmy al-Djufry, Wakil Sekjen Pelajar Islam Indonesia (PII) Helmy al-Djufry, menyampaikan bahwa siswa muslim di Bali kurang mendapatkan layanan materi pendidikan agama akibat minimnya guru PAI. Mau tidak mau, suka tidak suka, siswa Muslim ini, kata Al-Djufry, harus belajar secara mandiri untuk mengatasi kurangnya pengajaran dari guru agama. Al-Djufry juga menduga adanya larangan jilbab di 40 sekolah di Bali merupakan dampak dari tak memadainya jumlah guru agama Islam.

Senada dengan Al-Djufry, Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama pun juga mengatakan, kekurangan guru agama terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bukan saja di Bali, di daerah-daerah pelosok juga terjadi. Biasanya, satu guru mengajar untuk semua pelajaran. Saat ini, pensiunan guru agama

²⁰³ Fuji Pratiwi, "Jumlah Guru PAI Minim", *Republika.com*.

berjumlah 2.000 orang per tahun. Tapi, perekrutan guru agama bahkan tak sampai setengahnya. Jumlahnya hanya 300 guru agama per tahun. Ini termasuk guru agama lainnya, bukan hanya Islam.²⁰⁴

Kedua, sarana pra sarana. Dalam pendidikan, sarana dan prasarana sangat penting karena sangat dibutuhkan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Selain kemampuan guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, dukungan dari sarana pembelajaran sangat penting dalam membantu guru.

Fasilitas pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah (site, building, equipment, and furniture). Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik. Manajemen yang dimaksud meliputi: (1) Perencanaan, (2) Pengadaan, (3) Inventarisasi, (4) Penyimpanan, (5) Penataan, (6) Penggunaan, (7) Pemeliharaan, dan (8) Penghapusan.²⁰⁵

Guna mewujudkan dan mengatur hal tersebut pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan, pasal 1 ayat (8) mengemukakan

²⁰⁴ Fuji Pratiwi, "Jumlah Guru PAI Minim", *Republika.com*, (29 Maret 2014), dalam <https://www.republika.co.id/berita/n2nmpu/jumlah-guru-pai-minim>, diakses 18 Oktober 2022.

²⁰⁵ Rosnaeni, "Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan"; lihat juga Indrawan, Irjus. *Pengantar manajemen sarana dan prasarana sekolah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

standar sarana dan prasarana adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olah raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.²⁰⁶ pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa; (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.²⁰⁷

Jadi, secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Dalam konteks layanan sarana prasarana (sarpras) di SMA/SMK di Bali, peneliti mendapati beberapa temuan di antaranya sebagai berikut. Pada tahap pertama, peneliti melakukan observasi dan wawancara di lingkungan SMKN 1 Denpasar. Selama kegiatan observasi dan wawancara didampingi oleh Margiyanto selaku guru PAI sehingga peneliti

²⁰⁶ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional, 2005.

²⁰⁷ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional, 2005.

menemukan beberapa dokumentasi sarana dan prasarana yang ada di dalamnya. Sebelumnya Margiyanto mengajak peneliti untuk melihat bagaimana kondisi tempat wudhu untuk keperluan sholat dan pembiasaan keagamaan di dalam sekolah. Margiyanto selaku guru PAI menerangkan, sebelumnya kondisi wudhu tersebut tidak seperti ini dan hanya ada satu saluran air saja sehingga ketika istirahat siang, para peserta didik mengalami *crowded* (dibaca: antri) yang lama antara satu peserta didik dengan yang lain. Serta sempat ada komplain dari salah satu guru kepada Margiyanto secara langsung sehingga atas komplain tersebut, Margiyanto meneruskannya kepada wakil kepala sarana dan prasarana agar mendapatkan perhatian dan renovasi tempat wudhu yang cukup layak.²⁰⁸

Di samping itu, tepat tahun 2019 (sebelum pandemi covid-19 merebak), penulis mendapati SMKN 1 Denpasar sudah memiliki tempat wudhu yang cukup layak, dengan 4 saluran air. Kemudian penunjang pembiasaan keagamaan tersebut juga didukung oleh pengadaan tempat sholat atau musholla. Yang berada diantara dua kelas, terdapat lorong sehingga dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan sholat, kajian dan ibadah lainnya.²⁰⁹ Sebagaimana pernyataan Margiyanto “kita wajib mensyukuri dengan jumlah kuantitas komunitas muslim

²⁰⁸ Margiyanto Margiyanto, “Wawancara Dengan Margiyanto Selaku Guru SMKN 1 Denpasar Dan SMAN 7 Denpasar” (MGMP Guru PAI Denpasar, February 17, 2022).

²⁰⁹ Alaika M. Bagus Kurnia PS, “Observasi Penelitian Di SMKN 1 Denpasar” (SMK Negeri 1 Denpasar, February 18, 2022).

di sekolah ini yang sangat banyak nomer dua setelah hindu, namun kita sudah diberikan tempat ibadah yang seperti ini”.²¹⁰

Di sisi lain, dari keempat lokus sekolah yang peneliti teliti (SMKN 1 Denpasar, SMAN 7 Denpasar, SMKN 2 Denpasar, SMAN 2 Denpasar) terdapat beberapa kesamaan. SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 2, dalam hal ini, memiliki kesamaan. Guru difasilitasi dan diberikan tempat yang memadai untuk mengajar di kelas dan dilaksanakan pada jam efektif mengingat jumlah ruang kelasnya banyak. Juga tempat ibadahnya seperti musholla juga didapati dalam kondisi ada dan layak, meskipun mengecil di dalamnya. Sedangkan tempat belajarnya sebagaimana di SMK Negeri 1 Denpasar, yaitu di satu kelas besar dan dilaksanakan di luar jam efektif.

Di lain sisi, terkait pelaksanaan pembelajaran, terdapat sekolah yang tetap melaksanakan kegiatan PBM dengan menempatkan jam mata pelajaran PAI didalam jam efektif. Moh. Zaini selaku guru PAI di lingkungan SMKN 2 Denpasar menambahkan, bahwasanya ia mengajar jam mata pelajaran PAI pada jam efektif dikarenakan kondisi sekolah tersebut masih tersedia kelas kosong untuk ditempati sebagai perpindahan kelas PAI (*moving class system*). Namun ada juga yang melaksanakan kelas pembelajaran PAI di luar jam efektif sekolah sebagaimana yang dilakukan Margiyanto di SMA Negeri 7 Denpasar, dan Nur Kholis yang juga mengampu di SMA Negeri 4 Denpasar²¹¹.

²¹⁰ Margiyanto, “Wawancara Dengan Margiyanto Selaku Guru SMKN 1 Denpasar Dan SMAN 7 Denpasar.”

²¹¹ Margiyanto. Hal tersebut juga terjadi pada Nur Kholis, “Wawancara Dengan Nurkholis Sebagai Guru PAI Di SMA Negeri 4 Denpasar” (SMA Negeri 4 Denpasar, February 22, 2022).

Ketiga, layanan administrasi. Administrasi Pendidikan memiliki tujuan di antaranya agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan komponen instrumental dari proses pendidikan yang meliputi banyak hal diantaranya komponen siswa, pegawai guru, sarana/prasarana, organisasi, pembiayaan, tatausaha dan hubungan sekolah dan masyarakat, agar terlaksananya proses pendidikan yang efektif yang menunjang tercapainya tujuan dan sasaran pendidikan di sekolah.²¹² Dalam konteks ini, sebagaimana pengambilan data sebelumnya, guru PAI di SMK Negeri 2 Denpasar ketika dilakukan wawancara mengenai kesiapan mengajar, M. Zaini menunjukkan file dan persiapan pembelajaran dengan baik dan semua perangkat perencanaan pembelajaran sudah tersedia dengan lengkap, seperti silabus, program tahunan, program semester, RPP, hingga perangkat evaluasi. Namun, ketika pelaksanaan observasi, M. Zaini sebagai pengampu mata pelajaran tidak memunculkan tampilan tujuan pembelajaran hingga indikator ketercapaian peserta didik sehingga peneliti pada saat berada di kelas tidak menyaksikannya. Demikian dengan perangkat administratif yang biasanya dibawa oleh guru di setiap kelas, peneliti tidak mendapatkannya.²¹³

Dalam pada itu, peneliti mencoba menelusuri respon siswa perihal layanan administrasi di sekolah. Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan, peneliti mendapat beberapa temuan di

²¹² Ananda, Dina, Muhammad Thohir, and Rusmawati Rusmawati. "Efektivitas Pelayanan Administrasi Pendidikan di MAN 1 Hulu Sungai Utara." *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam* 4.1 (2022): 114-123.

²¹³ Muhammad Zaini, "Observasi Mata Pelajaran PAI Kelas X di SMK Negeri 2 Denpasar" (SMK Negeri 2 Denpasar, Mei 2022).

antaranya; tentang doa pagi. Dari beberapa peserta didik yang kami ajak untuk berdiskusi, terdapat banyak kesamaan, hingga perbedaan. Persamaan tersebut adalah cara berdoa yang dilakukan oleh peserta didik Hindu dengan muslim. Mereka menyatakan kegiatan doa pagi sebelum KBM dimulai dilakukan secara terpusat dari sekolah, yang dipandu dengan tata cara agama Hindu sehingga mereka yang beragama Islam mencoba menyelesaikan doanya masing-masing dengan duduk di tempatnya, kemudian berdiri karena prosesi doa yang dilakukan oleh umat Hindu adalah dengan berdiri.²¹⁴

Sedangkan perbedaannya adalah dinyatakan oleh Galih dan Nur sebagai siswa muslim di SMA Negeri 7 Denpasar, ia mendapati banyak siswa yang berdoa secara muslim, namun selepas berdoa, mereka tidak ikut untuk berdiri dan diam, melainkan dengan duduk di tempat saja. Namun apabila ada instruksi untuk berdiri, maka selepas menyelesaikan doa sebelum belajar, ia akan ikut berdiri dan diam sebagai penghormatan dan bentuk toleransinya.²¹⁵ Di samping itu, peneliti mencoba menelusuri kembali, apakah guru PAI juga memberikan tulisan berupa catatan kecil atau buku panduan doa sebelum belajar yang diberikan kepada peserta didiknya, untuk dibaca secara mandiri, namun ketika dikonfirmasi dikatakan belum ada. Guru PAI yang hadir pun juga menyatakan belum pernah memberikan amaliyah doa pagi sebelum pembelajaran

²¹⁴ Alaika M. Bagus Kurnia PS, "Lampiran Absensi Focus Group Discussion Penelitian Disertasi Aktualisasi Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Minoritas Muslim Di Denpasar Bali" (FGD Denpasar, Bali, Mei 2022).

²¹⁵ Kurnia PS, "Focus Group Discussion Bersama Peserta Didik SMA/ SMK Di Denpasar, Bali."

dimulai kepada peserta didik. Namun, di sisi lain pada saat jam KBM yang dilaksanakan, maka akan dimulainya dengan membaca doa pagi dengan bacaan *raditu billahi rabba wabil islamina dina wabimuhammadin nabiyya* sampai akhir, dan dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek pilihan.²¹⁶ Namun di SMK Negeri 1 dan SMA Negeri 7 hanya melakukan doa pagi tanpa membaca surat-surat pendek.

Selanjutnya, mengenai materi mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti yang diberikan oleh guru. Sebagaimana pada saat FGD, banyak peserta didik yang tidak mengetahui materi apa sajakah yang sudah diberikan dan disampaikan oleh guru sehingga pada proses pembelajaran nya, dapat dipastikan guru tidak menyampaikan maksud dan tujuan materi apa yang akan disampaikan dan tepatnya tema apa yang akan dipelajari oleh peserta didik.

Dari realitas di atas, bahwa layanan administrasi yang dilakukan oleh beberapa SMA/SMK di Bali kurang terorganisir secara rapi dan bersifat mandiri sesuai kebijakan sekolah masing-masing.

Keempat, layanan waktu. Layanan waktu pembelajaran dalam hal ini adalah jam pelajaran PAI. PAI di dalam kurikulum Indonesia masuk pada kelompok mata pelajaran wajib. Dan oleh karena itu, alokasi jam pelajaran PAI setiap minggu nya adalah 3 jam di mana per jamnya berdurasi 45 menit. PAI sebagai bagian Kelompok Mata pelajaran Wajib merupakan bagian dari pendidikan umum yaitu pendidikan bagi semua warganegara

²¹⁶ Kurnia PS.

bertujuan memberikan pengetahuan tentang bangsa, sikap sebagai bangsa, dan kemampuan penting untuk mengembangkan kehidupan pribadi peserta didik, masyarakat dan bangsa.

Dalam konteks PAI di bali, kegiatan belajar mengajar (KBM) PAI dan Budi Pekerti dilaksanakan dalam dua waktu, yaitu di dalam dan di luar jam efektif. Luar jam efektif yaitu pelaksanaannya dilakukan setelah pulang sekolah.²¹⁷ Dalam hal ini, SMA Negeri 2 Denpasar dan SMK Negeri 2 Denpasar memiliki kesamaan. Mereka (baca: para guru) diberikan tempat untuk mengajar di kelas dan dilaksanakan pada jam efektif karena jumlah ruang kelas nya yang banyak. Juga tempat ibadahnya seperti musholla juga didapati dalam kondisi ada dan layak, meskipun mengecil di dalamnya. Sedangkan tempat belajarnya sebagaimana di SMK Negeri 1 Denpasar, yaitu di satu kelas besar. Dan dilaksanakan diluar jam efektif.

Di lain sisi, terkait pelaksanaan pembelajaran, terdapat sekolah yang tetap melaksanakan kegiatan PBM dengan menempatkan jam mata pelajaran PAI di dalam jam efektif. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Moh. Zaini selaku guru PAI di lingkungan SMKN 2 Denpasar. Zaini menambahkan, ia mengajar jam mata pelajaran PAI pada jam efektif karena

²¹⁷ Kegiatan belajar non efektif dilaksanakan pkl. 13.00 WITA dengan rincian kegiatan, shalat *zJuhur* berjama'ah, kemudian dilanjutkan memasuki kelas masing-masing dengan juga membawa media kotak infaq sebagai bentuk media pembelajaran sedekah, yang dikoordinir oleh coordinator kelas yang sudah dibentuk pada pertemuan awal, dengan didampingi oleh guru mata pelajaran PAI. Namun waktu kegiatan belajar tersebut juga bersamaan dengan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga hak untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler tereduksi oleh KBM PAI dan Budi Pekerti. Lihat juga di Zaini, "Observasi Mata Pelajaran PAI Kelas X Di SMK Negeri 2 Denpasar."

kondisi sekolah tersebut masih tersedia kelas kosong untuk ditempati sebagai perpindahan kelas PAI (*moving class system*). Namun ada juga yang melaksanakan kelas pembelajaran PAI diluar jam efektif sekolah sebagaimana yang dilakukan Margiyanto di SMA Negeri 7 Denpasar, dan Nur Kholis yang juga mengampu di SMA Negeri 4 Denpasar.²¹⁸ Dengan demikian, alokasi waktu 3 jam perminggu bersifat tentatif dikarenakan beberapa hal di antaranya, konteks Bali yang dominan beragama Hindu, kebijakan sekolah dan stakeholders terkait, lingkungan, peserta didik dan keluarganya, masyarakat dan sebagainya.

Kelima, layanan kurikulum (perencanaan hingga evaluasi). Terkait layanan ini sekurangnya terdapat tiga paradigma; kurikulum sebagai substansi atau perencanaan mengajar, kurikulum sebagai sistem dan kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai substansi berarti kurikulum diposisikan sebagai ruh proses belajar mengajar (PBM). Tanpa kurikulum bagaimana mungkin PBM dapat diselenggarakan. Selanjutnya, kurikulum sebagai sistem menyangkut sistem kurikulum yang merupakan bagian dari sistem persekolahan dan sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Dan kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang kajian kurikulum, yang merupakan bidang kajian para ahli kurikulum, pendidikan dan pengajaran.²¹⁹

²¹⁸ Margiyanto, "Wawancara Dengan Margiyanto Selaku Guru SMKN 1 Denpasar Dan SMAN 7 Denpasar." Hal tersebut juga terjadi pada Kholis, "Wawancara Dengan Nurkholis Sebagai Guru PAI Di SMA Negeri 4 Denpasar."

²¹⁹ Ali Mudlofir. *Desain Pembelajaran Inovatif: dari Teori ke Praktik-Rajawali Pers*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Mengacu dari ketiga paradigma tersebut, maka kurikulum merupakan rancangan pendidikan, yang berisi serangkaian proses kegiatan belajar siswa. Dengan demikian secara implisit kurikulum memiliki tujuan yaitu tujuan pendidikan. Selain itu, terdapat banyak faktor yang berkelindan dengan pelaksanaan pendidikan, seperti halnya pendidik, peserta didik, orang tua/wali peserta didik dan lingkungan masyarakat.

Sebagaimana aktivitas pembelajaran yang dilakukan sebagaimana mestinya, efektivitas pembelajaran agar terarah dan memiliki ukuran keberhasilan, maka perencanaan pembelajaran menjadi desain awal sebelum menjalankan aktivitas pembelajaran. Sebagaimana rumah tidak akan pernah tampak indah dan kokoh secara konstruksi, ketika ia tidak didesain dan direncanakan secara matang.²²⁰ Demikian pula kemampuan mengatur dan menjaga lingkungan kelas yang baik. Sehingga dalam proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif, aktif, menyenangkan dan dapat terkenang dalam setiap aktivitas diluar kelasnya sehingga perlu diperhatikan, Ligia Fernanda, dkk²²¹ menetapkan tiga prinsip yang harus dipegang bagi para guru sebagai bentuk mengendalikan proses pembelajaran yang baik, yaitu persiapan pembelajaran (perencanaan); organisasi kelas antara lain; kontrak belajar, komitmen belajar, penyampaian materi, hingga penugasan

²²⁰ Bararah, "Efektifitas Perencanaan Pembelajaran Dalam Pembelajaran Pendidikan Islam Di Sekolah."

²²¹ Ligia Fernanda Espinosa Cevallos and Sandy T. Soto, "EFL Classroom Management," *MEXTESOL Journal* 44, no. 2 (2020): 1–11.

sampai dengan refleksi materi; dan perlu menguasai manajemen waktu pembelajaran.

Terakhir adalah evaluasi. Dalam evaluasi pembelajaran, acuan yang perlu diperhatikan secara khusus antara lain, keterpaduan, koherensi, pedagogis, serta akuntabilitas.²²² Dari beberapa acuan khusus tersebut, perlu bagi para pendidik menyiapkan ketiga kerangka pembelajaran dimulai dari perencanaan, proses hingga evaluasi. Sebagaimana deskripsi bagaimana guru PAI SMA/ SMK di Denpasar melakukan pelayanan proses pembelajaran PAI sebagai berikut;

Deskripsi aktivitas pembelajaran PAI di SMA/ SMK Negeri di wilayah Denpasar, pada saat peninjauan FGD MGMP Guru PAI kota Denpasar, mereka mengungkapkan bagaimana kondisi aktivitas pembelajaran PAI di sekolahnya masing-masing, dimulai dari persiapan perangkat pembelajaran, nyaris semua guru PAI hanya mengandalkan perangkat pembelajaran seperti Silabus, RPP, Program Tahunan (Progt), Program Semester (Progmes) adalah hasil rumusan dari MGMP PAI Provinsi Bali sehingga tidak ada pengembangan perencanaan pembelajaran didalamnya. Hal ini disebabkan oleh jumlah SDM guru PAI yang kurang.²²³ Namun terdapat salah satu guru PAI yang dituntut oleh sekolah untuk mengembangkan RPP nya dengan format yang berbeda. Karena menurutnya, sekolah

²²² Hidayat and Asyafah, "Konsep Dasar Evaluasi Dan Implikasinya Dalam Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Islam Di Sekolah."

²²³ Ninik Surani et al., "Focus Group Discussion (FGD) Dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) PAI Kota Denpasar Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Ruang Bidang Pendidikan Islam Bersama Kepala Bidang Pendidikan Islam Kota Denpasar" (FGD MGMP PAI Kota Denpasar, February 17, 2022).

tersebut adalah sekolah rujukan atau sekolah penggerak sebagaimana pada kurikulum Merdeka Belajar yang digagas oleh Kemendikbud,²²⁴ yaitu mewujudkan visi dan misi pendidikan di Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar secara holistik, yaitu mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi), nonkognitif (karakter), juga dibimbing oleh SDM yang unggul.²²⁵

Harus diakui, minimnya kuantitas guru PAI di Bali berdampak pada jumlah guru PAI yang tergabung dalam wadah musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) PAI.²²⁶ Hal ini juga menyebabkan kurangnya produktifitas administrasi pembelajaran, yang dalam hal ini adalah perangkat pembelajaran, seperti RPP, Prota, Promes, Silabus, dan lain sebagainya. Para guru PAI di Denpasar Bali ketika pada fase pembahasan penyusunan perencanaan pembelajaran, hanya ditemui guru 2 guru PAI yang murni menyusun perencanaan pembelajaran PAI. *Pertama*, penyusunan yang dijadikan rujukan untuk perencanaan pembelajaran PAI bermula dari ketua MGMP PAI kota Denpasar, yaitu M. Zaini. Hal ini sebagaimana dibuktikan pada saat pengumpulan file perangkat pembelajaran.²²⁷ *Kedua* adalah pernyataan dari guru SMA Negeri 4 Denpasar. Nurkholis menyatakan, bahwa karena SMA

²²⁴ Surani et al., "Focus Group Discussion (FGD) Dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajara) PAI Kota Denpasar".

²²⁵ fahrian Firdaus Syafi'i, "Merdeka Belajar: Sekolah Penggerak," In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, 2022.

²²⁶ Surani et al., "Focus Group Discussion (FGD) Dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajara) PAI Kota Denpasar Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Ruang Bidang Pendidikan Islam Bersama Kepala Bidang Pendidikan Islam Kota Denpasar."

²²⁷ Bagian TU SMK Negeri 2 Denpasar, "Dokumentasi Perangkat Pembelajaran SMK Negeri 2 Denpasar" (SMK Negeri 2 Denpasar, February 22, 2022).

Negeri 4 Denpasar adalah sekolah penggerak, maka *template* atau format perangkat pembelajarannya berbeda.²²⁸ Hal ini juga dibenarkan oleh peneliti sendiri, karena tidak ada konfirmasi kembali mengenai penyeteroran perangkat pembelajaran PAI.

Jadi dalam hal ini peneliti berkesimpulan bahwasannya perangkat pembelajaran dimulai dari Program Tahunan, Program Semester, Silabus, RPP disusun oleh satu orang, dan dipakai untuk semua SMA/ SMK Negeri di Kota Denpasar. Sebagaimana Zaini juga menyebutkan,” Benar, saya yang menyusun semua perangkat pembelajaran PAI, dan itu adalah gambaran dari musyawarah kami”.²²⁹ Tidak berhenti di situ, permasalahan ketidakproduktifitasnya guru PAI juga melalui penuturan M. Zaini, karena keterbatasan SDM, dan rata-rata guru PAI SMA/ SMK Negeri tidak hanya mengajar di satu tempat. Mereka sangat mobile (baca: berpindah-pindah) dan mengajar PAI lintas sekolah bahkan lintas kabupaten selain Denpasar. Hal ini disebabkan begitu minimnya ketersediaan SDM guru PAI di Bali. Hal ini juga disampaikan ketika peneliti menghadiri FGD MGMP PAI di kantor kementerian agama kota Denpasar.²³⁰

Terakhir yang menjadi pembahasan dalam aktivitas pembelajaran PAI adalah evaluasi. Peneliti dalam kesempatan

²²⁸ Surani et al., “Focus Group Discussion (FGD) Dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) PAI Kota Denpasar Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Ruang Bidang Pendidikan Islam Bersama Kepala Bidang Pendidikan Islam Kota Denpasar.”

²²⁹ Alaika M. Bagus Kurnia PS, “Wawancara Dengan M. Zaini Di Musholla SMK Negeri 2 Denpasar” (Wawancara Penelitian Disertasi 2022, February 22, 2022).

²³⁰ Surani et al., “Focus Group Discussion (FGD) Dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) PAI Kota Denpasar Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Ruang Bidang Pendidikan Islam Bersama Kepala Bidang Pendidikan Islam Kota Denpasar.”

FGD kemarin seluruh guru PAI menyepakati terkait soal PTS (Penilaian Tengah Semester) dan PAS (Penilaian Akhir Semester) adalah hasil dari pembuatan naskah evaluasi MGMP PAI Provinsi Bali. Sehingga, dapat dikatakan hampir jarang sekali guru PAI mengembangkan dengan kemampuannya sendiri. Di sisi lain, terdapat alat pengembangan evaluasi pembelajaran lainnya, yaitu dengan mengembangkan bank soal melalui evaluasi harian (ujian harian). Demikian juga semenjak diberlakukannya test CBT sebagai media perangkat evaluasi pembelajaran²³¹, semua sekolah negeri baik SMA ataupun SMK sudah melakukannya sejak sebelum pandemic covid-19 hingga saat ini.²³²

Dengan demikian, pembelajaran tidak akan dianggap sukses ketika tidak disokong dengan beberapa perangkat kurikulum sehingga penting bagi kepala sekolah, wakil kepala hingga guru yang membentuk mensukseskan program layanan pembelajaran untuk memperhatikan beberapa aspek. Aspek pertama yang dibutuhkan adalah kalender akademik; kedua adalah silabus; ketiga adalah program tahunan dan program semester; hingga selanjutnya akan dikembangkan sendiri oleh para guru dengan penyusunan silabus hingga RPP.

Aspek pembelajaran juga dianggap penting pada fase pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM). Sehingga dalam perencanaan yang telah disusun dengan rujukan yang dianut

²³¹ Kholis, "Wawancara Dengan Nurkholis Sebagai Guru PAI Di SMA Negeri 4 Denpasar."

²³² Surani et al., "Focus Group Discussion (FGD) Dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) PAI Kota Denpasar Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Ruang Bidang Pendidikan Islam Bersama Kepala Bidang Pendidikan Islam Kota Denpasar."

oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sentralisasi) akan disesuaikan juga dengan keadaan dan kondisi daerah masing-masing (otonomi daerah).²³³ Termasuk juga berkaitan dengan bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh para guru untuk mengukur keberhasilan aktivitas pembelajarannya. Dimulai dari penyusunan alat evaluasi, pengembangan evaluasi hingga penilaian peserta didik.

2. Pemahaman Tentang Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas di Denpasar Bali

Paradigma tentang layanan Pendidikan Islam bagi siswa muslim minoritas di Denpasar harus dipahami dalam kerangka minoritas. Sebab paradigma semacam ini akan membawa kepada satu pemahaman yang diferensiasi di mana terdapat beberapa perbedaan secara mendasar jika layanan Pendidikan Islam tersebut diberikan kepada siswa muslim di wilayah mayoritas. Kebijakan pendidikan agama di setiap wilayah dan daerah tentu bergantung pada tempat dan daerahnya, bahkan di tiap sekolah di wilayah yang sama pun berbeda. Apalagi pada daerah mayoritas dan minoritas, tentu akan sangat jauh berbeda.²³⁴ Masyarakat muslim yang berada pada posisi mayoritas, secara normatif, mereka akan diuntungkan dan secara menyeluruh akan mendapatkan pelayanan yang maksimal, meskipun terkadang masih terdapat beberapa evaluasi. Juga,

²³³ Saihu, Made. *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia (Potret Pendidikan Pluralisme Agama Di Jembrana-Bali)*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

²³⁴ Fadly Mart Gultom, *Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam Di Indonesia* (Deepublish, 2019).

demikian dengan mereka yang ada pada lingkungan minoritas, yang pastinya asumsi penulis mula-mula berekspektasi terhadap tidak maksimalnya dalam pelayanan Pendidikan Islam.

Karena itu, pada sub bab ini penulis akan menguak bagaimana sebenarnya pemahaman layanan ideal PAI, apakah sama layanan Pendidikan Islam minoritas di Bali dengan Jawa, seperti yang terlihat pada momentum peringatan hari besar Islam (PHBI) sebagai pembiasaan atau edukasi, layanan spiritual, dan lain sebagainya.

Istilah “minoritas” diartikan sebagai bagian dari penduduk yang beberapa ciricirinya berbeda dan umumnya mendapat perlakuan berbeda. Beberapa ciri-ciri yang berbeda tersebut bisa berupa bentuk fisik, seperti warna kulit dan bahasa. Menurut Theodorson & Theodorson, kelompok minoritas atau *minority groups* yaitu kelompokkelompok yang diakui berdasarkan perbedaan ras, agama, atau suku bangsa, yang mengalami kerugian sebagai akibat prasangka (*prejudice*) atau biasa dikenal dengan istilah diskriminasi.

Adapun pengertian minoritas menurut Pelapor Khusus PBB untuk perlindungan hak minoritas, Francesco Capotorti (Solikhin, 2016), yaitu: “ *A group numerically inferior to the rest of the population of a state, in a non dominant position, whose members being nationals of the state-posses ethnic, religion or linguistic characteristic differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly a sense of solidarity, direct toward preserving their culture, traditions,*

religion, or language".²³⁵ Minoritas dimaksudkan sebagai: *pertama*, secara numerik jumlahnya lebih kecil dari sisa populasi lainnya dalam suatu negara. *Kedua*, posisinya tidak dominan dalam konteks negara. *Ketiga*, adanya perbedaan etnik, agama, dan budaya dengan populasi lainnya. *Keempat*, memiliki solidaritas agama, bahasa, tradisi, budaya, dan kepentingan untuk meraih persamaan di muka umum dengan populasi di luarnya.²³⁶

Dari beberapa studi menunjukkan betapa keberadaan minoritas selalu dihadapkan pada kondisi yang penuh dengan ketidakadilan sosial (*social injustice*).²³⁷ Mereka hidup dengan penuh ketidaknyamanan apabila prasyarat infrastruktur sosial tidak dapat terokestrasi secara apik. Mengutip Raihani, jika prasyarat infrastruktur sosial tidak dikelola dengan baik, maka konsekuensinya adalah terjadi *social injustice* (ketidakadilan sosial).²³⁸ Ketidakadilan itu, menurut Raihani, terjadi hampir di

²³⁵ Solikhin, Ahmad. "Islam, Negara, Dan Perlindungan Hak-Hak Islam Minoritas." *Journal of Governance* 1.1 (2016).

²³⁶ Agustin, Rizkika, Kasuwi Saiban, and Mufarrihul Hazin. "Problematika Pendidikan Islam di Daerah Minoritas Muslim." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21.02 (2021): 153-160.

²³⁷ Lihat studi minoritas pendidikan Islam seperti Raihani, Raihani. "Islamic schools and social justice in Indonesia: A student perspective." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 50.2 (2012): 279-301; Raihani, Raihani. "A model of Islamic teacher education for social justice in Indonesia: A critical pedagogy perspective." *Journal of Indonesian Islam* 14.1 (2020): 163-186; Burhani, Ahmad Najib. "Treating minorities with fatwas: a study of the Ahmadiyya community in Indonesia." *Contemporary Islam* 8.3 (2014): 285-301; Fahmi, Muhammad, M. Ridwan Nasir, and Masdar Hilmy. "Islamic education in a minority setting: the translation of multicultural education at a local pesantren in Bali, Indonesia." *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 15.2 (2020): 345-364; Berglund, Jenny. "The Study of Islamic Education, A Litmus Test on State Relations to Muslim Minorities." *Method and Theory in the Study of Religion: Working Papers from Hannover*. Brill, 2017. 232-258.

²³⁸ Raihani, 'A Model of Islamic Teacher Education For Social Justice in Indonesia', 165.

semua lapisan sektor, baik sektor pendidikan, sosial-budaya, keagamaan, maupun politik.

Berkaitan dengan keadilan sosial, Cribb dan Gewirtz mengidentifikasi tiga jenis keadilan – distributif, budaya dan asosiasi.²³⁹ Keadilan distributif sebagian besar berkaitan dengan bagaimana barang dan jasa didistribusikan diantara individu dan hanya akan mungkin jika tidak adanya eksploitasi, marginalisasi, dan perampasan dapat dipastikan. Definisi Rawls tentang keadilan sosial adalah salah satu konsep utama yang diklasifikasikan dalam jenis ini.²⁴⁰ Keadilan budaya terjadi ketika setiap budaya dalam masyarakat dihargai dan diakui sejauh tidak ada dominasi budaya dan tidak ada rasa tidak hormat terhadap budaya manapun. Keadilan asosiasional dipandang sebagai: “tidak adanya pola pergaulan antar individu dan antar kelompok yang menghalangi sebagian orang untuk berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kondisi di mana mereka hidup dan bertindak”.²⁴¹

Ketiga jenis keadilan ini, menurut Raihani, mencakup masalah-masalah yang mungkin timbul di antara mereka yang tidak puas dengan berbagai kondisi sosial, termasuk kondisi ekonomi, budaya, dan politik, dan hubungan antar individu maupun antar kelompok.²⁴² Dengan demikian, ketiga jenis keadilan sosial ini tidak hanya menyangkut individu-individu

²³⁹ Cribb, Alan, and Sharon Gewirtz. "Towards a sociology of just practices." *Soc Justice Educ Identity* 15 (2003).

²⁴⁰ J. Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge MA: Harvard University Press, 1971), 3.

²⁴¹ Power, Sally, and Sharon Gewirtz. "Reading education action zones." *Journal of Education Policy* 16.1 (2001): 39-51.

²⁴² Raihani, Raihani. "Islamic schools and social justice in Indonesia: A student perspective." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 50.2 (2012): 279-301.

dalam masyarakat tetapi juga dengan kelompok-kelompok dan hubungannya dengan orang lain. Singkatnya, Greene percaya bahwa keadilan sosial berkaitan dengan hak-hak dasar setiap manusia tanpa memandang kesenjangan ekonomi atau kelas, jenis kelamin, ras, etnis, kewarganegaraan, agama, usia, orientasi seksual, kecacatan atau kesehatan.²⁴³

Dalam konteks pendidikan agama, ketidakadilan sosial tersebut hampir menyelimuti insan pelaku pendidikan itu sendiri. Misalnya, siswa dari agama minoritas mengalami diskriminasi dalam akses terhadap ajaran agamanya dan perampasan dari praktik keagamaannya di sekolah. Istilah minoritas di sini bukan jumlah penduduk beragama yang lebih sedikit di seluruh konteks Indonesia, tetapi minoritas di tempat-tempat tertentu seperti Muslim di Kalimantan Tengah, Muslim di Bali, Muslim di Nusa Tenggara Timur, Muslim di Papua atau bahkan dalam konteks sekolah yang lebih mikro. Sebagai perbandingan, si sebuah sekolah negeri di Batam, misalnya, kepala sekolah dengan persetujuan guru mengeluarkan kebijakan untuk membatasi jumlah siswa dari latar belakang etnis dan agama tertentu.²⁴⁴ Contoh lain ketidakadilan sosial yang ditemukan di sekolah adalah terciptanya citra pembeda dari aliran-aliran akademik tertentu. Aliran Ilmu Pengetahuan Alam dianggap lebih bergengsi dengan murid-muridnya digambarkan lebih rajin dan lebih pintar. Sebaliknya, aliran Ilmu Sosial dan

²⁴³ M. Greene, Introduction: Teaching for Social Justice, in W. Ayers, J. A. Hunt & T. Quinn (eds.), *Teaching for Social Justice* (New York: Teachers College Press, 1998), pp. xxvii-xlvi.

²⁴⁴ Raihani, Raihani. "Islamic schools and social justice in Indonesia: A student perspective." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 50.2 (2012): 279-301.

mahasiswanya dianggap sebagai kelompok kelas dua. Siswa dari kelompok kurang mampu ini tidak hanya mengalami perbedaan oleh guru tetapi juga dari orang tua. Dalam pengamatan Raihani, ketika berdiskusi tentang konsep-konsep agama dan non-Muslim diminta untuk berbicara tentang konsep-konsep iman mereka, para siswa Muslim selalu menertawakan dan mengejek mereka.²⁴⁵ Bukti anekdot lain juga menunjukkan bahwa diskriminasi tidak hanya terjadi pada siswa dari agama minoritas, tetapi juga pada mereka yang berlatar belakang etnis yang berbeda dengan orang-orang yang berkuasa. Pertanyaan “dari mana asalmu” kepada siswa telah menjadi indikasi praktik diskriminasi dalam layanan akademik dan administrasi.

Tidak jauh berbeda dengan Raihani dan peneliti minoritas lainnya, dalam konteks Bali, khususnya siswa minoritas muslim di SMA/ SMK baik negeri maupun swasta, penulis menemukan bahwa siswa tersebut kurang mendapatkan layanan Pendidikan Islam (Pendidikan Islam) secara optimal. Aktualisasi PAI di sana sangatlah minim. Aktualisasi PAI di sini adalah tersedianya layanan Pendidikan Islam secara ekspresif dan komprehensif, baik dari segi kurikulum, guru, stakeholders terkait maupun sarana prasarana, bahkan kebijakan agama di Denpasar Bali itu sendiri. Istilah aktualisasi sendiri – mengikuti bahasa Hendrik De Smet – secara tradisional dilihat sebagai proses berikut analisis ulang sintaksis di mana status sintaksis baru memanifestasikan dirinya dalam perilaku sintaksis baru.²⁴⁶

²⁴⁵ Raihani, Raihani. "Islamic schools and social justice in Indonesia: A student perspective." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 50.2 (2012): 279-301.

²⁴⁶ Hendrik De Smet, "The course of actualization." *Language* (2012): 601-633.

Proses aktualisasi ini berjalan dinamis dan berlangsung dari satu lingkungan ke lingkungan lain atas dasar kesamaan hubungan antar lingkungan.

Aktualisasi PAI pada SMA/ SMK di Bali paling tidak – untuk sementara ini – ditunjukkan dengan pembiasaan sehari-hari di sekolah, testimoni dari orang tua atau wali murid, maupun *stakeholders* terkait, dan ketersediaan guru PAI, serta perhatian dari dinas setempat.

Pertama, agenda program sekolah yang dinyatakan oleh para guru, mereka mengungkapkan mengenai agenda mingguan yang secara fakta dinyatakan mengenai kesempatan ibadah sholat Jum'at.²⁴⁷ Kemudian kami menelusuri bagaimana jadwal pembelajaran peserta didik pada hari Jum'at. Sekolah pertama adalah SMK Negeri 1 Denpasar. Kami mewawancarai salah satu peserta didik muslim, Athalla mengungkapkan, “kami mengakhiri pembelajaran di dalam kelas pkl. 12.00 WITA, sedangkan sholat Jum'at biasanya berlangsung pukul 12.30 WITA. Kami rasa itu sudah mencukupi dalam melakukan persiapan sholat Jum'at”.²⁴⁸ Kemudian kami sebagai peneliti mencoba mengkonfirmasi kembali bagaimana jarak antara sekolah dengan masjid? Ia kembali mengungkapkan, bahwasanya radius antara sekolah dengan masjid adalah 1 km ke arah utara, kemudian 2 km ke arah kampung Jawa.

²⁴⁷ Surani et al., “Focus Group Discussion (FGD) Dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajara) PAI Kota Denpasar Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Ruang Bidang Pendidikan Islam Bersama Kepala Bidang Pendidikan Islam Kota Denpasar.”

²⁴⁸ Athalla, “Wawancara Dengan Peserta Didik SMKN 1 Denpasar Pkl. 09.30 WITA Di Halaman Utama Sekolah” (Sie Kerohanian Islam SMKN 1 Denpasar, February 18, 2022).

Kedua, layanan ibadah. Layanan ibadah adalah bentuk dukungan pembiasaan dalam peningkatan kompetensi afektif. Atau dapat dikatakan, pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah, akan menjadikan pembiasaan karakter sebagai pembiasaan yang dipraktikkan di luar sekolah²⁴⁹. Pada paparan data yang didapat oleh peneliti, peneliti membagi pelayanan peribadatan yang dilakukan oleh peserta didik maupun warga sekolah muslim SMA/ SMK menjadi dua antara lain; tinjauan dari program pendukung lembaga dan regulasi lembaga.

Juga demikian yang dilakukan oleh beberapa sekolah yang menjadi objek penelitian kami sebagai perwakilan beberapa SMA/ SMK Negeri di Denpasar, Bali. Sebagaimana SMK Negeri 2 Denpasar, Zaini menceritakan lika-liku pembelajaran dan pendampingan keagamaan Islam didalamnya. Pada saat sholat Jum'at, peserta didik mendapatkan kesempatan yang luas. Sebab pkl. 12.00 WITA juga adalah jam istirahat. Namun jam istirahat tersebut hingga 15 menit sejak pkl. 12.00 WITA. Sebagai konsekwensinya adalah, peserta didik tersebut terlambat dalam hitungan menit (sekitar 10 menit) psaca istirahat.²⁵⁰ Hal serupa juga dialami oleh SMAN 7 Denpasar.

Bahkan di SMA Negeri 7 Denpasar, kepala sekolah sudah memberikan lampu hijau untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'at dan dhuhur secara berjamaah di aula sekolah.²⁵¹ Dan

²⁴⁹ Mohammad Attaran, "Moral Education, Habituation, and Divine Assistance in View of Ghazali," *Journal of Research on Christian Education* 24, no. 1 (2015): 43–51; Lihat juga Suyatno et al., "Strategy of Values Education in the Indonesian Education System," *International Journal of Instruction* 12, no. 1 (January 2019): 607–624.

²⁵⁰ Kurnia PS, "Wawancara Dengan M. Zaini Di Musholla SMK Negeri 2 Denpasar."

²⁵¹ Cokorda Gede Anom Wiratmaja, "Wawancara Dengan Kepala SMA Negeri 7 Denpasar" (Ruang Kepala SMA Negeri 7 Denpasar, February 21, 2022).

berbeda dengan lokus penelitian kami yang terakhir, yakni SMA Negeri 2 Denpasar. Di sana kita mendapati informasi bahwasanya ketika jam sholat jumat dimulai, pembelajaran masih diberlangsungkan sehingga peserta didik bisa menunaikan sholat Jum'at ketika mereka izin kepada guru kelas untuk menunaikannya.²⁵² Pertimbangan dari waka kurikulum adalah kepulangan atau jam terakhir pembelajaran adalah pukul 14.00 WITA, sebagai ganti jam KBM hari sabtu yang diliburkan.

Demikian juga dengan agenda PHBI seperti hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, karena secara demografis berbeda. Athalla, salah seorang siswa muslim menyatakan, “ketika hendak hari raya Idul Fitri, kita diliburkan biasanya H-3 lebaran”. Demikian juga menjelang Idul Adha, hanya diliburkan waktu tanggal merah saja. Setelah tanggal merah yang bertepatan dengan 10 *Dzulhijjah*, kita masuk PBM seperti biasa. Dan juga diikuti dengan aktivitas kegiatan lainnya. Terkait respon sekolah mengenai pelaksanaan peribadatan siswa, kami menelusuri dengan mewawancarai kepala sekolah maupun waka terkait, kesemuanya *welcome* (terbuka) dan memberikan akses dan ijin seluas-luasnya. Semuanya mencoba membuka pintu selebar-lebarnya untuk peserta didik, guru hingga karyawan yang hendak melakukan aktivitas beribadah.

Selain itu, guru PAI juga bersepakat akan berlanjutnya ucapan selamat hari raya kebesaran agama Islam diucapkan

²⁵² Alaika M. Bagus Kurnia PS, “FGD Dengan Syamsuddin Dan I Nengah Mardana Di Ruang Tata Usaha SMA Negeri Denpasar” (Wawancara Penelitian Disertasi 2022, Pebruari 2022).

secara lisan oleh warga sekolah nonmuslim di dalamnya. Namun yang menjadi perbedaan di sini adalah mengenai regulasi, ada satu sekolah yang benar-benar memberikan regulasi larangan membangun dan melaksanakan aktivitas peribadatan lainnya kecuali dengan tujuannya adalah Pura²⁵³ sehingga dengan adanya regulasi tersebut, peserta didik diperkenankan untuk beribadah, namun dilakukan di luar kawasan sekolah. Juga demikian mengenai respon sekolah mengenai pelaksanaan peribadatan siswa. Semuanya mencoba membuka pintu selebar-lebarnya untuk peserta didik, guru hingga karyawan yang hendak melakukan aktivitas beribadah.

Sebagai layanan peribadatan, ketiga sekolah yang menjadi lokus penelitian kami mengenai bagaimana kepala sekolah mempersilahkan peserta didik dan guru PAI untuk mengekspresikan penguatan dalam beribadah. Dari data yang kami dapat, peran guru PAI di sekolah menjadi sangat sentral dalam mengatur ritme kegiatan keagamaan Islam. Sebagaimana dinyatakan M Zaini, “bahwasanya kita yang berada disini, masih bisa bertahan dengan solidaritas kami”.²⁵⁴ Juga Margiyanto dalam pembicaraannya dengan tegas menerangkan,” kami selalu menanamkan untuk menjaga nama baik agama sehingga tidak sampai merusak fasilitas dan kegiatan yang sudah diizinkan oleh sekolah kepada kita”.²⁵⁵

²⁵³ Surani et al., “Focus Group Discussion (FGD) Dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) PAI Kota Denpasar Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Ruang Bidang Pendidikan Islam Bersama Kepala Bidang Pendidikan Islam Kota Denpasar.”

²⁵⁴ Kurnia PS, “Wawancara Dengan M. Zaini Di Musholla SMK Negeri 2 Denpasar.”

²⁵⁵ Margiyanto, “Wawancara Dengan Margiyanto Selaku Guru SMKN 1 Denpasar Dan SMAN 7 Denpasar.”

Selain itu, peneliti juga mengamati bagaimana kekuatan senioritas guru PAI di SMA Negeri 2 Denpasar yang sangat tandem. Hal ini dikarenakan masa kerjanya sudah lama dan sudah membangun komunikasi, serta kekuatan hubungan kedinasan, segala bentuk aktivitas sekolah terkait keagamaan Islam diserahkan secara sepenuhnya oleh guru PAI.²⁵⁶ Juga demikian bagaimana kepala SMK Negeri 1 Denpasar menyatakan yang sama, yaitu segala bentuk aktivitas penunjang PAI akan diserahkan kepada guru PAI dengan sepenuhnya, yang juga sesuai dengan takaran dan kekuatannya.²⁵⁷

3. Argumen Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas di Denpasar Bali

Argumen tentang layanan Pendidikan Islam bagi siswa minoritas muslim di Denpasar Bali terbagi menjadi beberapa hal, di antaranya;

Pertama, Perumusan dan Persiapan Perangkat dan Perencanaan Pembelajaran. Temuan penulis menyatakan bahwa tidak semua guru SMA/SMK yang menjadi lokus penelitian ini lengkap administrasi pembelajaran nya. Hanya beberapa saja atau hitungan jari. M. Zaini, guru PAI di SMKN 2 Denpasar, misalnya, salah seorang guru PAI yang rajin, inisiatif, kreatif dan tertib administrasi pembelajaran nya. Hampir seluruh administrasi pembelajaran guru PAI di Denpasar berkiblat

²⁵⁶ Alaika M. Bagus Kurnia PS, “Observasi Di SMA Negeri 2 Denpasar Pkl. 12.00 WITA” (Hasil Observasi Penelitian Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya 2022, Pebruari 2022).

²⁵⁷ Alaika M. Bagus Kurnia PS, “Wawancara Dengan Kepala SMK Negeri 1 Denpasar Pkl. 10.00 WITA: I Ketut Suparsa” (Wawancara Penelitian Disertasi 2022, February 21, 2022).

padanya. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Margiyanto dan H.M. Syamsuddin bahwa sejauhnyanya beliau hanya *copy paste* administrasi pembelajaran darinya. Zaini berhasil menunjukkan file dan persiapan pembelajaran dengan baik. Dan semua perangkat perencanaan pembelajaran sudah tersedia dengan lengkap, seperti silabus, program tahunan, program semester, RPP, hingga perangkat evaluasi.

Namun, ketika pelaksanaan observasi, M. Zaini sebagai pengampu mata pelajaran tidak memunculkan tampilan tujuan pembelajaran (atau dalam istilah Merdeka Belajar adalah capaian pembelajaran (CP) hingga indikator ketercapaian peserta didik sehingga peneliti pada saat berada di kelas tidak menyaksikannya. Demikian dengan perangkat administrasi yang biasanya dibawa oleh guru disetiap kelas, peneliti tidak mendapatinya.²⁵⁸

Kedua, Ketersediaan Bahan Ajar. Begitu juga dengan bahan ajar, peneliti hanya mendapati buku Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai pegangan pelajaran PAI, dan tidak menemukan buku paket. Juga demikian kondisi peserta didik pada saat pembelajaran hanya 6 peserta didik yang menunjukkan kesiapan belajar dengan mengeluarkan buku LKS dan buku tulis catatan di atas mejanya, dari 34 peserta didik yang hadir di dalam kelas.²⁵⁹ Hal ini diakui sendiri oleh M. Zaini, guru PAI di SMKN 2 Denpasar. Ia menyebutkan bahwa tidak banyak peserta didik muslim yang menerima buku ajar mengingat pembelajaran

²⁵⁸ Muhammad Zaini, "Observasi Mata Pelajaran PAI Kelas X di SMK Negeri 2 Denpasar" (SMK Negeri 2 Denpasar, Mei 2022).

²⁵⁹ Zaini.

dilakukan sepulang sekolah. Zaini bahkan menyediakan buku paket sendiri namun tidak banyak yang membeli.

Bisa dikatakan bahwa ketersediaan bahan ajar di empat sekolah tersebut kurang memadai. Hal ini bisa dimaklumi karena pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik di SMK Negeri 1 Denpasar, misalnya, memiliki inisiatif secara mandiri dari kepengurusan intra sekolah; yakni sie kerohanian Islam (Rohis) sehingga pengadaan buku paket mata pelajaran PAI dan pengadaan buku LKS dikoordinasi oleh pengurus Rohis sebagai pelayan pengadaan buku bahan ajar. Namun dalam praktik pembelajarannya, juga dilakukan dengan metode yang sama seperti SMA Negeri 7 Denpasar, yaitu melalui *google classroom*.

Hal serupa juga dialami SMK Negeri 2 Denpasar, bahwa mereka menggunakan buku LKS sebagai bahan ajar PAI, namun dalam praktiknya masih banyak peserta didik yang tidak menggunakannya. Ketika peneliti mengkonfirmasi kembali, mereka menjawabnya dengan alasan enggan untuk membeli buku LKS tersebut. Selaras dengan itu, SMA Negeri 7 Denpasar, yang mana perpustakaan SMK Negeri 2 Denpasar juga menyediakan buku paket PAI secara terbatas.

Adapun dalam praktik pembelajarannya, sebagai pengembangan kompetensi keterampilan (K4), guru lebih menekankan pada pengambilan nilai keterampilan melalui kegiatan Rohis yang dilakukan pada saat Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Sebagaimana pada tanggal 22 Mei 2022, guru mengambil penilaian K4 dengan melihat kehadiran peserta didik dalam kegiatan Halal bi Halal yang diadakannya. Juga di SMK

Negeri 1 dengan mengambil penilaian K4 diluar kompetensi inti yang tercantum pada kurikulum PAI SMA/ SMK, yaitu dengan menugaskan menulis kaligrafi.²⁶⁰

Kedua, produktifitas guru. Argumen yang kami kembangkan adalah bahwa seorang guru sebaiknya menyusun bahan ajar sendiri guna mengantisipasi keterbatasan bahan ajar atau penyesuaian materi belajar sesuai kebutuhan peserta didik. Dalam konteks ini, kami melihat bahwa mayoritas guru PAI di Bali, terutama yang menjadi lokus riset kami, tidak banyak melakukan hal itu. Hal itu bisa dipahami karena keterbatasan guru PAI di Bali sehingga mayoritas waktu mereka habis untuk “nyabang” mengajar demi memenuhi kebutuhan hidup dan selain minimnya guru PAI di sekolah umum.

Hal ini juga berdampak pada produktifitas guru itu sendiri. Padahal, produktifitas guru PAI selain sebagai manajer di dalam kelas, juga idealnya adalah sebagai fasilitator bagi peserta didik. Sehingga perlu bagi guru juga menyusun bahan ajar secara mandiri. Dengan menyiapkan materi baik dengan menyusun buku ajar atau bahan sebatas PPT yang nantinya ditampilkan didepan. Juga demikian perlu bagi guru juga melakukan uji validitas dan reliabilitas dari buku ajar tersebut, agar dapat dikatakan layak diedarkan dan dikonsumsi pada saat kegiatan belajar mengajar (KBM).²⁶¹

²⁶⁰ Hasil Focus Group Discussion pada Sabtu, 21 Mei 2022 dengan peserta didik dan 3 guru PAI di SMA/SMK Denpasar Bali.

²⁶¹ “Developing Islamic Science Based Integrated Teaching Materials for Islamic Religious Education in Islamic High Schools,” *Pegem Journal of Education and Instruction* 11, no. 4 (October 1, 2021): 282–89, <https://doi.org/10.47750/pegegog.11.04.27>.

Sejauh ini, peneliti belum sampai menemukan guru PAI di sekolah yang dilakukan observasi tersebut secara mandiri menyusun bahan ajar. Selain internal sekolah yang tidak memungkinkan terbentuknya kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI, juga sangat tidak mungkin dengan keterbatasan secara kuantitas SDM guru PAI di sekolah sehingga tidak memungkinkan untuk menciptakan ruang diskusi, kelompok kerja guru, demikian juga kondisi secara umum di Denpasar, sebagaimana penyajian data sebelumnya yang menunjukkan kekurangan guru PAI dan Budi pekerti di beberapa sekolah.

Dengan kata lain, tidak mungkin untuk melakukan penyusunan hingga pengembangan bahan ajar PAI, terkecuali apabila guru PAI SMA/ SMK bersama-sama pada tingkatan MGMP kota/ kabupaten menyusun dan merumuskan secara bersama dengan membentuk kelompok kerja, dan produktif menghasilkan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik muslim secara umum, baik tercipta secara digital maupun tertulis.

Ketiga, kondisi Pembelajaran di dalam kelas: Kegiatan Pembuka, Motivasi dan Penyampaian Tujuan Materi. Sebagaimana penjelasan di muka bahwa KBM ini dilakukan dua waktu, yaitu di dalam jam efektif dan di luar jam efektif. Kegiatan belajar mengajar (KBM) PAI dan Budi Pekerti dilaksanakan diluar jam efektif sehingga pelaksanaannya

dilakukan setelah pulang sekolah.²⁶² Sebagaimana normalnya aktivitas KBM, kegiatan pembelajaran PAI didalam kelas yang dilaksanakan oleh peserta didik kelas X sebagaimana mestinya, misalnya guru mengucapkan salam, mengajak doa bersama, guru mencontohkan dengan mengangkat tangan, hingga membaca beberapa surat-surat pendek yang dilakukan pembiasaan disetiap satu minggu sekali.²⁶³

Namun di sini guru tidak menyampaikan tujuan materi yang akan dijelaskan. Demikian juga guru tidak mengintruksikan untuk membuka buku LKS atau buku catatannya. Akan tetapi, lebih mengarah pada penguatan karakter keislaman, seperti, mengajak peserta didik agar terampil memandikan jenazah, minimal memandikan jenazah orang tuanya; mengajak untuk istiqomah membaca al-Qur'an, hingga beberapa karakter sosial lainnya sehingga pada saat kegiatan belajar mengajar, peneliti tidak menemukan materi apakah yang akan diajarkan.

Keempat, strategi dan metode pembelajaran yang dilaksanakan. Ketika peneliti mencermati kegiatan pembelajaran, peneliti hanya mendapatkan metode yang digunakan oleh guru dengan dua model. *Pertama*, metode drill yang dilakukan pada saat memimpin doa awal pembelajaran dan

²⁶² Kegiatan belajar non efektif dilaksanakan pkl. 13.00 WITA dengan rincian kegiatan, shalat *z/uhur* berjama'ah, kemudian dilanjutkan memasuki kelas masing-masing dengan juga membawa media kotak infaq sebagai bentuk media pembelajaran sedekah, yang dikoordinir oleh coordinator kelas yang sudah dibentuk pada pertemuan awal, dengan didampingi oleh guru mata pelajaran PAI. Namun waktu kegiatan belajar tersebut juga bersamaan dengan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga hak untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler tereduksi oleh KBM PAI dan Budi Pekerti. Lihat juga di Zaini, "Observasi Mata Pelajaran PAI Kelas X Di SMK Negeri 2 Denpasar."

²⁶³ Zaini.

membaca beberapa surat-surat pendek secara terpimpin, yaitu guru dan peserta didik membaca secara Bersama-sama. *Kedua*, metode ceramah, yang dilakukan oleh guru baik dimulai pada saat awal pembelajaran, seperti pengantar penyampaian materi, hingga akhir. Namun metode tanya jawab dilaksanakan sekitar 5% dari durasi waktu yang dilaksanakan, dengan tidak terstruktur, yaitu ketika ditengah penyampaian, peserta didik boleh bertanya ketika tidak mengetahuinya. *Ketiga*, penugasan. Selama pelaksanaan pembelajaran PAI yang dilakukan oleh peserta didik kelas X, tidak ada penugasan sama sekali, baik secara mandiri, maupun berkelompok baik tugas secara terstruktur (dikerjakan di kelas), maupun tidak terstruktur (dikerjakan di rumah atau PR).²⁶⁴

Kelima, Kegiatan Penutup Pada Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Sebagaimana kegiatan penutup, guru mengajak peserta didik untuk merefleksi materi yang disampaikan, juga mengajak peserta didik melaksanakan kegiatan doa akhir pembelajaran secara bersama-sama.²⁶⁵ Demikian penulis mendapati satu hingga dua peserta didik meninggalkan kelas sebelum jam pembelajaran berakhir. Padahal mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, normalnya dalam satu pekan sekitar 3 x 45 menit. Namun dalam praktiknya, hanya dilaksanakan pada pkl. 13.00 sampai 14. 00 WITA. Yang artinya hak belajar PAI bagi peserta didik kurang dari perspektif durasi waktu. Demikian juga dengan kejenuhan peserta didik dalam menjalani

²⁶⁴ Zaini, "Observasi Mata Pelajaran PAI Kelas X Di SMK Negeri 2 Denpasar".

²⁶⁵ Zaini, "Observasi Mata Pelajaran PAI Kelas X Di SMK Negeri 2 Denpasar".

pembelajaran diluar jam KBM yang juga pada hakikatnya tidak efektif sehingga tidak memungkinkan secara maksimal dilaksanakan kegiatan KBM.

Keenam, Fasilitas Kegiatan Belajar Mengajar PAI dan Budi Pekerti. Demikian juga dengan kurangnya referensi keagamaan Islam baik yang tersedia di perpustakaan, hingga beberapa fasilitas kelas. Sehingga mereka hanya mendapatkan pengalaman belajar pembiasaan shalat di ruangan khusus, kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) diluar agenda sekolah, hingga fasilitas wudhu untuk kebutuhan shalat warga sekolah.²⁶⁶ Hal tersebut dengan disediakannya ruang kelas secara normal sebagaimana kelas belajar untuk keperluan KBM pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Meskipun secara ideal, saat ini pelaksanaan KBM dalam satu kelas maksimal 20 peserta didik. Karena setiap kelas hanya terdapat 4 sampai 5 peserta didik, maka inisiatif digabungkannya dalam satu kelas, menjadi kelas besar dalam setiap jenjangnya.²⁶⁷

Sebagai catatan atas argumen layanan pendidikan Islam dalam penelitian ini adalah selama ini Kabid PAI Kanwil Kemenag, juga sama halnya dengan Kabid PAI Kemenag Kota Denpasar, belum pernah melayangkan surat resmi edaran mengenai kebutuhan guru PAI atau hal yang berkaitan dengan PAI kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Sehingga semuanya hanya berupa usulan melalui lisan, yang mana tidak ada bukti dan landasan kuat untuk

²⁶⁶ Zaini, "Observasi Mata Pelajaran PAI Kelas X Di SMK Negeri 2 Denpasar".

²⁶⁷ Zaini, "Observasi Mata Pelajaran PAI Kelas X Di SMK Negeri 2 Denpasar."

mengadakan program baik pengadaan guru atau pendistribusian. Maka perlu ada riset berbentuk partisipatif dari kabid PAI agar ada perbaikan.²⁶⁸

B. Sistem Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas di Denpasar Bali

1. Dasar Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas

Dasar layanan Pendidikan Islam bagi siswa muslim minoritas di Denpasar Bali dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dari aspek pemerintah dan civil society. Namun, sebelum itu, patut kami uraikan terlebih dahulu bahwa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 yang memuat amanat bahwa tujuan dibentuknya Negara Indonesia antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar Pancasila. Kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa ini menjadi tugas pokok negara dan pemerintah kepada seluruh entitas bangsa ini.

Kewajiban mengajarkan pendidikan agama bagi peserta didik pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan jauh sebelum lahir Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini terungkap dalam TAP MPRS Nomor XXVII Tahun 1966 yang mewajibkan semua sekolah negeri untuk mengajarkan pendidikan agama.

²⁶⁸ Wawancara dengan Jagra selaku Kabid SMA, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

Selain itu, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga sudah mengatur kewajiban pada semua sekolah mengajarkan pendidikan agama, bahkan kualifikasi sekolah negeri tidak disebutkan lagi.²⁶⁹

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia tidak menyebutkan sekolah negeri. Sejak tahun 1989, pendidikan agama diwajibkan di sekolah negeri dan swasta untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Bahkan UU No. 20 Republik Indonesia Tahun 2003 lebih jelas menyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) nomer (a) bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat pelajaran agama menurut agama yang dianut nya, sedang pendidiknya dari guru agama yang sama. Jika lembaga pendidikan tidak melaksanakan peraturan tersebut, maka lembaga pendidikan yang bersangkutan “melanggar undang-gundang” sistem pendidikan Nasional.

Di lain pihak, suasana harmonis juga didukung oleh komitmen pemerintah untuk menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menganut agama yang dianut nya sendiri. Komitmen Pemerintah tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 29 (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

²⁶⁹ Muin, Abdul. "Layanan Pendidikan Agama Di Sma (Slua) Saraswati 1 Denpasar." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2015).

Dalam konteks nasional, UUD 1945 menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi anggota kelompok minoritas, termasuk terjaminnya pendidikan Islam di wilayah minoritas sebagai perluasan pengertian dari perlindungan HAM. Secara kolektif, agama/keyakinan yang tertuang dalam tradisi yang dianut dan hak-hak tradisional setiap warga negara dan masyarakat diakui dan dihormati (Pasal 18B ayat 2). Demikian pula secara individual mereka dilindungi dan diakui sebagai warga negara dan sebagai penduduk Indonesia (Pasal 26). Pengakuan atas hak kewarganegaraan ini, berimplikasi pada keharusan bagi negara untuk menjamin berbagai macam hak-hak asasi mereka sebagai hak-hak konstitusional (BAB IX), termasuk hak untuk dapat mengenyam pendidikan yang layak, jaminan atas hak kelompok minoritas juga sudah tertera dalam UUD 45 pasal 28A hingga J. Secara khusus yang terkait dengan perlindungan hak minoritas terdapat pada 28A, 28C (ayat 2), 28E (ayat 2), dan 28I (ayat 2,3). Jaminan ini kemudian dituangkan dalam bentuk Undang-Undang.²⁷⁰

Salah satu Undang-Undang yang mengatur hak minoritas adalah UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU ini menjamin secara rinci berbagai hak-hak asasi warga negara, meskipun hak-hak minoritas tidak secara jelas dielaborasi. Selain itu, di era pasca reformasi, persisnya era Gus Dur, dikeluarkan Keppres No. 6 tahun 2000 untuk mencabut Inpres No. 14 tahun 1967 yang melarang semua kegiatan dan bentuk

²⁷⁰ Komnas HAM, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia: sebuah laporan awal* (Jakarta; Komnas Ham, 2016), 17.

ekspresi terkait Tionghoa termasuk perayaan Imlek dan aksara China. Kemudian tahun 2001, Kementerian Agama mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa Hari Raya Imlek dijadikan sebagai hari raya [libur] nasional.

Sejalan dengan keyakinan baru reformasi, berbagai konvensi internasional tentang HAM diratifikasi oleh Indonesia termasuk 2 kovenan terpenting yaitu KIHSP, serta KIHESB.²⁷¹ Selain itu, Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi berdasarkan Ras (CERD), Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Hak Anak (CRC), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), Konvensi Perlindungan Hak Buruh Migran dan Keluarganya (ICMW), serta Konvensi Penyandang Disabilitas (ICRPD). Melalui ratifikasi ini, Indonesia secara resmi menjadi Negara Pihak yang terikat pada mekanisme pelaporan pada Komite Kerja pada masing-masing Kovenan atau Konvensi. Pemerintah Indonesia juga wajib melaporkan kemajuan upaya perlindungan dalam Tinjauan Universal Berkala (*Universal Periodic Review*) di Dewan HAM PBB.²⁷²

Dalam praksisnya, konsep kelompok minoritas juga dipahami dengan berbagai cara oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah. Kementerian Sosial, misalnya, memberikan definisi kelompok minoritas sebagai bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Seperti yang termaktub dalam

²⁷¹ Komnas HAM, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia: sebuah laporan awal* (Jakarta; Komnas Ham, 2016), 29.

²⁷² Komnas HAM, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia: sebuah laporan awal* (Jakarta; Komnas Ham, 2016), 18.

Permensos No. 8 tahun 2012 menyebut, “[...] kelompok minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian. Kriteria kelompok minoritas sebagai berikut: a) gangguan keberfungsian sosial; b) diskriminasi; c) marginalisasi; dan d) berperilaku seks menyimpang.”²⁷³

Dalam konteks Bali, undang-undang tentang perlindungan minoritas sebetulnya sudah ada meski tidak secara implisit, misalnya, Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan²⁷⁴, salah satu isinya adalah peraturan ini bertujuan untuk menjamin PPDB dilaksanakan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.²⁷⁵

Kemudian, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, yang salah satu isinya adalah PPDB

²⁷³ Komnas HAM, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia: sebuah laporan awal* (Jakarta; Komnas Ham, 2016), 18.

²⁷⁴ Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

²⁷⁵ Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntable, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.²⁷⁶ Selanjutnya, PPDB berasaskan lima hal, salah satunya adalah non diskriminatif. Diskriminatif yang dimaksud adalah persyaratan warga negara yang berusia sekolah yang memenuhi dapat mengikuti proses pendaftaran sebagai calon peserta didik baru tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial.²⁷⁷

Tidak hanya itu, Kementerian Agama juga menjamin hak-hak minoritas untuk memperoleh akses pendidikan yang sama. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah, misalnya, pada bagian kedua menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan pendidikan agama adalah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan agama yang bermutu di sekolah. (2) Pendidikan Agama terdiri dari: Pendidikan Islam, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha dan Pendidikan Agama Khonghucu. (3) Pengelolaan pendidikan agama meliputi standar isi,

²⁷⁶ Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Bab II tentang Tujuan dan Azas, Pasal 2.

²⁷⁷ Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama.

kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembiayaan, penilaian, dan evaluasi. Kemudian bagian ketiga tentang kewajiban, pada Pasal 3 dijelaskan Setiap sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan agama dan Setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.²⁷⁸

Jauh sebelum PMA di atas terbit, sebenarnya sudah ada keputusan bersama antara Mendikbud dan Menag yang tertuang dalam Nomor 4/U/Skb/1999, Dan No. 570 Tahun 1999, Tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Pembinaan Dirjen Dikdasmen, pada Bab II Penyelenggaraan persisnya Pasal 2 (1) menjelaskan semua satuan pendidikan wajib diberikan pendidikan agama, sesuai dengan kurikulum yg berlaku. (2) Setiap siswa wajib mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yg dipeluknya. (3) Pendidikan agama diberikan oleh Guru Pendidikan Agama atau Guru Pendidikan Agama Tidak Tetap atau Pembina Agama yg seagama dengan siswa. Pasal 3 (1) Apabila terdapat sekurang-kurangnya 10 orang siswa pada suatu kelas yg menganut agama tertentu, maka pendidikan agama kepada 10 orang wajib diberikan di kelas itu. (2) Apabila terdapat siswa yg menganut agama tertentu kurang dari 10 orang dalam satu kelas, maka pendidikan agama di kelas

²⁷⁸ Lihat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah

itu wajib dilaksanakan dengan cara penggabungan beberapa kelas (kolektif) dengan mengatur waktu yg tidak merugikan hak siswa tersebut untuk mengikuti pelajaran lain. (3) Pelaksanaan Pendidikan Agama bagi siswa yang dikelasnya tidak diajarkan pendidikan agama yang dianutnya, dilakukan oleh Pembina Agama. (4) Apabila tidak ada Guru Pendidikan Agama pada satuan pendidikan maka dapat diangkat Guru Pendidikan Agama Tidak Tetap dan/atau Pembina Agama.²⁷⁹

Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Senada dengan ini, Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 1 ayat (1) pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan.

Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan agama merupakan sebuah proses pembentukan karakter manusia yang tidak pernah berhenti.²⁸⁰ Karena itu, pendidikan agama harus ditumbuh-kembangkan dalam kerangka pembentukan karakter peserta

²⁷⁹ Keputusan Bersama Mendikbud Dan Menag No. 4/U/SKB/1999, dan NO. 570 th 1999, Tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah di Lingkungan Pembinaan Dirjen Dikdasmen.

²⁸⁰ M. Bambang Pranowo. 2009. Mereka Berbicara Pendidikan Islam Sebuah Bunga Rampai (Masa Depan Pendidikan Islam). Jakarta: RajaGrafi ndo Persada, 25.

didik yang taat menjalankan ajaran agamanya, sehingga program pendidikan agama dalam kurikulum yang diwajibkan bagi peserta didik harus diperdalam melalui kegiatan ekstrakurikuler, rohis dan berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di masjid, pure, gereja dan vihara. Lebih jauh, pendidikan agama tidak hanya menjadi materi pelajaran yang harus dihafalkan dan diujikan. Tapi, pendidikan agama harus menjadi nilai sublimatif dan transformatif ke dalam pikiran, sikap dan perilaku peserta didik, sehingga mencetak manusia berakhlak mulia, mandiri, beramal kebaikan dan pada gilirannya membentuk insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, keberpihakan sekaligus komitmen negara dan pemerintah untuk menjamin hak-hak minoritas tidak perlu diragukan lagi, meskipun harus diakui dalam tataran implementasinya masih ditemui beberapa kendala, seperti ketidakadilan sosial. Raihani telah meriset tentang masalah ini di lingkungan sekolah yang berbeda dan menemukan bahwa tidak setiap siswa diperlakukan sama.²⁸¹

²⁸¹ Raihani Raihani, *Creating Multicultural Citizens: A Portrayal of Contemporary Indonesian Education* (Routledengane, 2014); Lyn Parker and Chang-Yau Hoon, "Secularity, Religion and the Possibilities for Religious Citizenship," *Asian Journal of Social Science* 41, no. 2 (2013): 150–74.

2. Tujuan Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas di Denpasar Bali

Sebagaimana tujuan pendidikan Islam pada umumnya, yaitu membimbing dan mendidik seseorang untuk memahami ajaran agama Islam secara komprehensif, baik dalam tataran konseptual maupun praksisnya. Diharapkan mereka memiliki kecerdasan berpikir (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan memiliki kecerdasan Spiritual (SQ) untuk bekal hidup menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Menurut Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang Agama, pendidikan dan kebudayaan, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan UUD 1945.²⁸²

Sedangkan menurut UU No. 2 tahun 1989 menjelaskan pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar

²⁸² Dalam TAP MRPS sebelumnya, menurut TAP.MPR No.II/MPR/1993 tentang GBHN dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertinggi semangat kebangsaan agar tumbuh manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa.

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Jika dikaitkan dengan tujuan utama Kemenag pada tahun 2022 ini, yaitu sesuai dengan Program Prioritas Kemenag yakni Penguatan Moderasi Beragama, Transformasi Digital, Revitalisasi KUA, *Cyber Islamic University*, Kemandirian Pesantren, *Religiosity Index*, dan Pencanangan Tahun Toleransi 2022.²⁸³

Dalam konteks PAI di Denpasar Bali, tujuan layanan Pendidikan Islam adalah mampu memberikan layanan prima kepada peserta didik tanpa terdistorsi dengan alasan apapun. Pelayanan prima (*excellent service*) merupakan suatu proses di mana terjadi interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.²⁸⁴ Dengan kata lain, pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah standar pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau masyarakat. Pelayanan Prima (*Excellent Service*) dapat diartikan juga sebagai pelayanan yang lebih dari yang diharapkan, dengan memberikan perhatian seperti waktu, ketepatan, keamanan, kenyamanan, kualitas, biaya, proses, dan kepuasan.

²⁸³ Itjen Kemenag, “"Kawal 7 (Tujuh) Program Prioritas Kemenag" Bahasan KIIS Seri 67”, itjen.kemenag.go.id, dalam <http://itjen.kemenag.go.id/web/kawal-7-tujuh-program-prioritas-kemenag-bahasan-kiis-seri-67#:~:text=Tugas%20utama%20Kemenag%20membangun%20masyarakat.Toleransi%202022%22%2C%20tandas%20Erman.,> diakses 12 Oktober 2022.

²⁸⁴ Barata, Atep Adya. Dasar-dasar pelayanan prima. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.

Dalam dunia pendidikan, peserta didik merupakan manusia yang diasah pemikirannya dan diasuh pendidikannya agar memiliki ketajaman pikiran dan pola pikir yang tepat sehingga dapat bermanfaat bagi masa depannya. Siswa memerlukan layanan pembelajaran yang berkualitas agar berkembang potensi dirinya sesuai fitrahnya.

Oleh karena itu, mengingat pentingnya pelayanan prima ini dalam meningkatkan mutu pembelajaran maka sekolah dan guru haruslah memiliki kompetensi yang lebih baik, diperlukan bantuan dari banyak orang, terutama dari seluruh civitas akademika termasuk guru dan pihak sekolah serta *civil society*. *Service excellence*, dalam hal ini, berarti melayani rekan kerja, melayani profesional pendidikan, dan melayani orang lain dengan sepenih hati. Dalam arti, ketika pihak sekolah membangun budaya keunggulan layanan maka ia harus berkomitmen untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif bagi peserta didik dan pendidik dan orang tua harus memiliki keyakinan bahwa anak-anak mereka menerima pendidikan yang baik.

3. Sistem Pelayanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Minoritas Muslim di SMA/ SMK Denpasar, Bali

Sebagaimana hasil penelitian, beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemegang kebijakan pendidikan, dalam hal ini terdapat tiga, yaitu Bidang PAI, Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi Bali, hal ini dipimpin oleh Mahmudi, Bidang PAI Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, hal ini

dibawah pimpinan Ninik Surani, Bidang SMA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali oleh Jagra.

Beberapa data yang didapat oleh peneliti, pertama adalah Bidang PAI Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Mahmudi memberikan penjelasan mengenai dua hal yang sangat urgent dalam pelayanan PAI, dan hal tersebut menjadi permasalahan. Yaitu mengenai layanan waktu, dan yang paling ditekankan adalah waktu sholat Jum'at. Dan yang kedua adalah memiliki target untuk melakukan *branding* Madrasah. Menurutnya Madrasah Expo perlu ditampilkan secara publik di Denpasar sendiri. Mengingat madrasah di Denpasar masih belum dilihat secara menarik oleh masyarakat muslim Denpasar.

Demikian juga dengan Ninik Surani selaku Kabid PAI Kantor Kementerian Agama juga menyebutkan tentang waktu sholat Jumat peserta didik. Namun Ninik juga menambahkan mengenai kebutuhan guru PAI di SMA/ SMK Negeri maupun swasta. Banyak sekolah juga meminta untuk pengadaan guru PAI, namun sekolah tidak menganggarkannya. Hal tersebut ketika ditanya oleh peneliti mengenai anggaran dari Kemenag, tidak ada untuk guru PAI di lingkungan SMA/ SMK Negeri.

Pengadaan guru PAI sendiri sejak tahun 2015 sudah tidak ada yang ber home base di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Sehingga kebanyakan status guru PAI di SMA/ SMK Negeri Denpasar berstatus Honorer. Yang memiliki status guru PAI PNS hanya dua orang, yaitu H. M. Zaini yang ditempatkan di SMK Negeri 2 Denpasar dan H. Syamsuddin di SMA Negeri 2 Denpasar sehingga dari

sisi regulasi, bisa disimpulkan ada 1 dan rencana regulasi ada 2. Regulasi yang masih tersedia sampai saat ini adalah keberadaan nihilnya pengadaan guru PAI di masing-masing sekolah. sehingga fenomena tersebut dapat digambarkan bahwasanya satu guru bisa mengampu mata pelajaran PAI di dua sekolah atau tiga sekolah. begitupula guru PAI yang berstatus PNS, yang pada hari-hari weekend juga menyempatkan mengajar di SMA/ SMK Swasta.

Hal tersebut bukan berarti kurang baiknya respon dari pemerintah, namun juga membutuhkan komunikasi yang masif antara Kabid PAI baik dari tingkat kota hingga Provinsi kepada Dinas Pendidikan terkait yang pada dasarnya adalah payung dari SMA/ SMK Negeri. Demikian juga rencana Kabid PAI Kanwil Kemenag Provinsi, Mahmudi yang menyatakan untuk menggalakkan Madrasah Expo, hal tersebut bukan satu-satunya alternatif bagi para masyarakat untuk diarahkan kepada Madrasah secara utuh, juga melihat bagaimana preferensi mereka terhadap Madrasah, lantas juga perlu menjadi perhatian mengenai bagaimana perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang masih menginginkan anaknya sekolah di SMA/ SMK Negeri.

Oleh karena itu, pada tahap selanjutnya, pemegang kebijakan atas PAI juga perlu memikirkan alternatif yang baik untuk pelayanan yang maksimal di lingkungan tersebut. Sebagai usulan juga apabila ada survey angket kebutuhan bahan ajar seperti buku paket, ketika ada kekurangan, juga butuh ada rencana anggaran pengadaan buku paket khusus untuk peserta didik yang sekolah di SMA/ SMK Negeri. Juga demikian survey

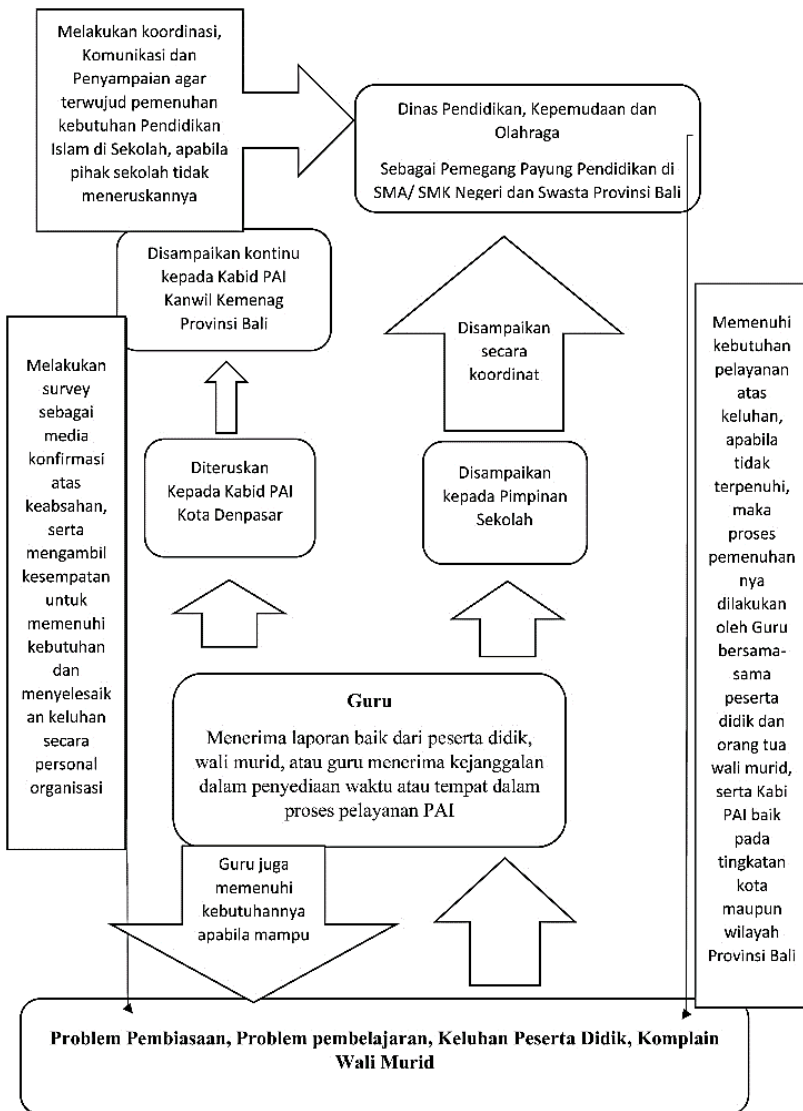
kepuasan atas proses pembelajaran hingga evaluasi guru PAI dari unsur peserta didik hingga guru PAI, yang kedepannya dapat dijadikan evaluasi dan rencana program perbaikan. Mengingat Sumber Daya Manusia dari tenaga Pendidik PAI juga sangat dibutuhkan banyak. Sebagaimana teori pengaruh minoritas, maka siapa yang menjadi lawan komunikasi tersebut, maka hal tersebut menjadi posisi yang sangat strategis untuk melakukan Kontak.

Apabila Kabid PAI juga memiliki perhatian khusus melalui salah satu sub bagiannya, maka memerlukan koordinasi dengan baik mengenai kebutuhan dan perbaikan didalamnya. Hal tersebut juga dibutuhkan saran dan dialog khusus bagi mereka guru PAI sebagai pelaku utama yang bersentuhan dengan pelayanan Pendidikan Islam di unit sekolah.

Juga demikian menjadi temuan bagi peneliti mengenai bagaimana Kepala Sekolah yang hanya memasrahkan kepada guru PAI, juga demikian Waka Kurikulum atau Kesiswaan dari beberapa sekolah yang sudah diwawancarai oleh peneliti, mereka membuat kebijakan layanan waktu dari dua sekolah yang masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) pada waktu sholat Jum'at, hal tersebut juga membatasi ukuran toleransi dengan mempersilahkan peserta didik putra bisa menunaikan sholat Jumat, dan pembelajaran masih berlangsung. Ketika hal tersebut pernah disampaikan secara lisan oleh salah satu guru PAI di SMK Negeri 2, agar sekolah menyamakan dengan momentum Purnama (tradisi Hindu), agar diberhentikan kegiatan belajar mengajar, dan peserta didik serta para guru

muslim dapat menunaikan sholat Jumat, ranah tersebut juga masih tidak direspon dan diamini dengan serius.

Artinya, asumsi penulis dengan kejadian tersebut, pada hakikatnya mereka yang memegang kendali manajemen sekolah dalam hal ini adalah kepala sekolah, bukan berarti mendapatkan label intoleransi, melainkan ketidak tahuan. Maka dari itu, perlu menjadi kiblat bagi para guru PAI yang sedang menjalani proses pelayanan prima di SMA/ SMK Negeri masing-masing unitnya dengan menunjukkan prestasi, melakukan komunikasi secara masif, hingga model komunikasi juga tidak melalui satu jalur, melainkan juga multi jalur, yang artinya juga mengajak para peserta didik, menjalin hubungan komunikasi yang baik kepada Wakil Kepala Sekolah, Kepala Sekolah dan kerabat lainnya.



Gambar 4.1 Skema Sistem Pelayanan Pendidikan Islam di SMA/ SMK Negeri Denpasar

Yang pasti adalah melakukan beberapa kompromi yang sangat baik dalam setiap langkah menjalani aktivitas kerjanya. Sehingga yang menjadi pemain utama dalam pelayanan ini adalah guru itu sendiri sebagai informan induk, peserta didik sebagai customer dan wali murid sebagai customer kedua. Hal tersebut sudah dilakukan oleh salah satu sekolah, yaitu SMA Negeri 7 Denpasar, yang mana kepala sekolah mempersilahkan Aula Sekolah dijadikan tempat untuk Sholat Jumat berjamaah.

Dengan demikian, skema untuk sistem pelayanan PAI di Denpasar, Bali alurnya adalah melalui jalur bawah, yaitu Guru PAI, Peserta didik dan Wali Murid. Demikian selanjutnya komplain, usulan kebutuhan dan koordinasi dilakukan secara baik dan kontinu kepada 1) pejabat sekolah dan 2) pemegang regulasi.

Sejauh ini bacaan peneliti, Kabid PAI baik Kota maupun provinsi belum pernah melayangkan usulan, keluhan atau himbauan secara tertulis kepada pelaku pelayanan PAI di SMA/ SMK Negeri sehingga belum menemukan benang merah yang sangat erat untuk menjalankan proses perbaikan peraturan atau surat keputusan secara tertulis.

**Tabel 4.1 Regulasi Pelayanan PAI di SMA/ SMK Negeri
Denpasar**

Identitas Pejabat	Regulasi Pelayanan			
	Pelayanan Guru PAI	Pelayanan Waktu Belajar dan Pembiasaan	Pelayanan Sarana Belajar (seperti buku, media, pelatihan metode dll)	Pelayanan Sarana dan Prasarana
Kabid PAI Kanwil Kemenag Provinsi Bali	Diserahkan kepada Kabid PAI Kemenag Kota Denpasar	Sebatas lisan dan wacana	Belum ada (tidak masuk dalam daftar program dan terealisasi)	Ranah Sekolah
Kabid PAI Kementerian Agama Kota Denpasar	Menempatkan 2 (dua) Guru PAI berstatus PNS dan 9 guru Non-PNS baik di SMA/ SMK Negeri atau Swasta	Sebatas lisan dan wacana	Belum ada (tidak masuk dalam daftar program dan terealisasi)	Ranah Sekolah
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	Tidak masuk anggaran	Ranah sekolah	Menyediakan buku Paket PAI dari Kemendikbud, tetapi tidak sesuai dengan pemerataan jumlah peserta didik di setiap tahunnya	Ranah sekolah
Kepala Sekolah	Mebutuhkan, dan pernah meminta kepada Kemenag Kota Denpasar, maupun Dinas	2 (dua) sekolah menetapkan jam istirahat dan 2 sekolah tetap melaksanakan pembelajaran dengan batas	Menyediakan buku paket dan didistribusikan melalui bagian Perpustakaan Sekolah. Sumber bahan	2 (dua) sekolah merealisasikan musholla, 1 Sekolah direalisasikan di lorong kelas, dan 1 sekolah

Identitas Pejabat	Regulasi Pelayanan			
	Pelayanan Guru PAI	Pelayanan Waktu Belajar dan Pembiasaan	Pelayanan Sarana Belajar (seperti buku, media, pelatihan metode dll)	Pelayanan Sarana dan Prasarana
	Kepemudaan, Olahraga dan Provinsi	toleransi mempersilahkan untuk menunaikan Sholat Jum'at di luar sekolah 1 (satu) sekolah memfasilitasi Aula untuk dijadikan tempat Sholat Jum'at	ajar dari Diknas terkait	direalisasikan di Aula Sekolah. Semuanya atas usulan guru PAI terkait.

BAB 6

PRAKTIK LAYANAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SISWA MUSLIM MINORITAS DI DENPASAR BALI

A. Praktik Layanan Kurikulum Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas di Denpasar Bali

Dalam praktiknya, belum pernah terlihat sama sekali pengembangan kurikulum PAI bagi siswa minoritas di Denpasar Bali. Karena itu, diperlukan RnD (*research and development*) atau penelitian pengembangan bahan ajar edisi khusus *muslim minority* karena biasa-biasa saja. Perlu ada penelitian lanjutan. Mulai dari penguatan akhlak, muatan materi, kurikulum dan sebagainya.

Dalam konteks minoritas, ketiakhadiran sosial kerap kali dialami oleh warga minoritas. Salah satu bentuk ketidakadilan sosial menurut Raihani adalah bahwa tidak setiap siswa diperlakukan sama.²⁸⁵ Misalnya, siswa agama minoritas

²⁸⁵ Raihani telah membahas masalah ini di lingkungan sekolah yang berbeda dan menemukan bahwa tidak setiap siswa diperlakukan sama. Lihat Raihani, "A model of Islamic teacher education for social justice in Indonesia: A critical pedagogy perspective." *Journal of Indonesian Islam* 14.1 (2020): 163-186.

mengalami diskriminasi dalam akses terhadap ajaran agama mereka dan pengasingan dari praktik keagamaan mereka di sekolah. Di sebuah sekolah negeri di Batam, sebagaimana lokus riset Raihani, kepala sekolah dengan persetujuan guru mengeluarkan kebijakan untuk membatasi jumlah siswa dari suku dan agama tertentu. Contoh lain ketidakadilan sosial yang ditemukan di sekolah adalah terciptanya citra pembeda aliran akademik tertentu. Jurusan IPA dinilai lebih bergengsi bagi peserta didik digambarkan lebih rajin dan cerdas. Sedangkan jurusan IPS dinilai tidak memiliki masa depan yang cerah dan lebih banyak diisi oleh peserta didik yang IQ-nya rendah, nakal, misalnya.²⁸⁶

Penelitian yang lain mengemukakan, sekolah negeri tidak membolehkan jilbab, menunjukkan batas-batas multikulturalisme di Bali. Sementara jilbab harus mengungkapkan kesalehan dan moralitas, ada beberapa kemunafikan di antara beberapa wanita muda berjilbab. Beberapa perempuan muda telah menginternalisasi keberatan orang Bali terhadap imigran Muslim yang miskin, dan merasa minder saat mengenakan jilbab. Data menunjukkan bahwa jenis kelamin/gender perempuan mereka menandai status minoritas Muslim yang tidak setara dengan cara yang tidak dialami oleh laki-laki minoritas Muslim.²⁸⁷

²⁸⁶ Raihani, "A model of Islamic teacher education for social justice in Indonesia: A critical pedagogy perspective." *Journal of Indonesian Islam* 14.1 (2020): 163-186.

²⁸⁷ Parker, "Intersections of gender/sex, multiculturalism and religion: Young Muslim minority women in contemporary Bali", 441-458.

Pada gilirannya, ketidakadilan sosial tersebut menciptakan dan memperlebar – mengutip istilah *American Psychological Association* – ancaman stereotip (*stereotype threat*) — stigma yang memaksakan diri bagi siswa yang percaya bahwa mereka “inferior dalam bidang akademik” (*inferior in academics.*) Ancaman stereotip semacam ini dapat “meningkatkan keraguan yang menghambat dan kecemasan tekanan tinggi”, yang berpotensi memberatkan kinerja akademik siswa.

Karena itu, kurikulum yang responsif secara budaya akan bekerja untuk mengintervensi dan secara langsung menangani masalah tersebut dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali lebih dalam keragaman pengalaman belajarnya. Dalam konteks ini, Sukmadinata pernah mengemukakan setidaknya ada dua prinsip dalam mengembangkan kurikulum, yaitu prinsip umum dan spesifik.²⁸⁸ Prinsip umum mencakup relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, kepraktisan dan efektivitas. Prinsip-prinsip ini adalah lanskap yang kuat untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa, guru, dan masyarakat. Sedangkan prinsip spesifik atau khusus berkaitan dengan tujuan pendidikan, pemilihan konten pendidikan, proses belajar mengajar, pemilihan media dan alat belajar, dan prinsip yang berkaitan dengan pemilihan kegiatan penilaian.²⁸⁹

Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum (tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan

²⁸⁸ Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan kurikulum* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2020).

²⁸⁹ Shofiyah, Shofiyah. "Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran." *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Islam* 2.2 (2018): 122-130.

evaluasi). Sedangkan secara eksternal komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi (relevansi epistemologis), tuntutan dan potensi siswa (relevansi psikologis), serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat (relevansi sosiologis), Maka dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetisi di dunia kerja yang akan datang.

Dalam konteks PAI di Bali, kebutuhan akan pengembangan kurikulum berbasis relevansi sangat penting untuk menunjang pemahaman siswa muslim dalam menyikapi kearifan lokal dan kultur Bali yang kental akan nuansa Hindu. Pemahaman semacam ini penting mengingat keberagaman penduduk Bali sangat kaya dan terkenal akan eksotisme kultur Bali yang telah mendunia. Sekaligus juga mempererat kohesi sosial yang selama ini telah terjalin berlangsung lama.

Lebih dari itu, pengembangan kurikulum tidak boleh asal-asalan dan tidak menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan peserta didik dan lokus tempat asal mereka. Dengan kata lain, kurikulum di wilayah minoritas dalam hal ini haruslah fleksibel dan akomodatif akan budaya lokal sebagai bagian daripada pendidikan ramah masyarakat. Selain itu, kurikulum harus menyediakan ruang untuk memberikan kebebasan bagi pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran. Pendidik dalam hal ini memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum

yang sesuai dengan minat, kebutuhan siswa dan kebutuhan bidang lingkungan mereka.²⁹⁰

Dalam hal ini, kebutuhan siswa minoritas muslim di Denpasar Bali akan fleksibilitas kurikulum merupakan suatu keniscayaan. Mereka harus diberi pemahaman yang moderat agar bijak menyikapi segala persoalan terutama menyangkut keanekaragaman budaya di Bali. Pada gilirannya, mereka akan terbiasa untuk bersikap rukun meski beda agama dan budaya.

Berikutnya adalah prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengharuskan kurikulum berjalan berkesinambungan atau berjalan *on the track*.²⁹¹ Makna kontinuitas di sini adalah keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan baik yang mengajarkan (guru) maupun yang belajar (peserta didik).

Tidak kalah pentingnya, prinsip pengembangan kurikulum selanjutnya adalah efisiensi. Di era disrupsi ini, kurikulum haruslah bernilai efisien sebagai respon atas meningkatnya teknologi dan arus informasi di era digital. Jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan satu bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukan halangan.²⁹²

²⁹⁰ Mansur, Rosichin. "Pengembangan kurikulum Pendidikan Islam multikultural (Suatu prinsip-prinsip pengembangan)." *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam* 1.2 (2016): 3; Shofiyah, Shofiyah. "Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran." *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Islam* 2.2 (2018): 122-130.

²⁹¹ Shofiyah, Shofiyah. "Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran." *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Islam* 2.2 (2018): 128.

²⁹² Shofiyah, Shofiyah. "Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran." *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Islam* 2.2 (2018): 128-129.

Dan terakhir adalah prinsip efektivitas. Efektivitas yang dimaksud adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran.²⁹³

B. Praktik Layanan Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas di Denpasar Bali

Praktik layanan SDM pendidikan Islam bagi siswa muslim minoritas di Denpasar Bali ditunjukkan melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Kegiatan intrakurikuler seperti yang tergambar dalam data di muka bahwa pelaksanaan pembelajaran PAI di keempat sekolah Denpasar Bali ada yang berlangsung sesuai jadwal yang ditentukan dan ada yang tidak

²⁹³ Shofiyah, Shofiyah. "Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran." *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Islam* 2.2 (2018): 129.

misalnya, SMKN 2 Denpasar yang pembelajaran PAI nya berlangsung di jam efektif.

Adapun kegiatan kokurikuler tercermin dari kegiatan di luar jam pembelajaran seperti kegiatan keagamaan. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), misalnya, berdasarkan pengakuan Margiyanto, ia kembali menjelaskan bagaimana ia mengemas kegiatan PHBI dengan dua model; *pertama*, adalah hari Besar Islam mingguan, yakni setiap hari Jum'at. Setiap Jum'at, Margiyanto mula-mula mencoba melakukan pendekatan secara parsial, baik dari para peserta didik Muslim, perangkat struktural sekolah, khususnya kepala sekolah, hingga mengajak kepada para guru dan karyawan muslim untuk mengadakan sholat Jum'at di Aula SMAN 7 Denpasar yang ada.

Pada akhirnya pada tahun 2018 (sebelum pandemi Covid-19 merebak), atas izin kepala sekolah, diadakannya sholat jumat secara berjamaah. Pertimbangan tersebut dikarenakan warga sekolah muslim memiliki jumlah terbesar kedua setelah Hindu. Namun pasca diberlakukannya belajar di rumah karena pandemi covid-19, aktivitas sholat Jum'at belum berlanjut kembali. Namun berbeda dengan SMK Negeri 1, SMK Negeri 2 dan SMA Negeri 2 yang mengadakan sholat Jum'at diluar sekolah.²⁹⁴

Secara waktu, SMK Negeri 1, SMK Negeri 2 dan SMA Negeri 7 ketika sholat Jum'at, segala jenis KBM dan aktivitas sekolah diistirahatkan. Sehingga banyak peserta didik yang izin

²⁹⁴ Margiyanto, "Wawancara Dengan Margiyanto Selaku Guru SMKN 1 Denpasar Dan SMAN 7 Denpasar"; Kurnia PS, "FGD Dengan Syamsuddin Dan I Nengah Mardana Di Ruang Tata Usaha SMA Negeri Denpasar"; Kurnia PS, "Wawancara Dengan M. Zaini Di Musholla SMK Negeri 2 Denpasar."

untuk melaksanakan sholat Jum'at diluar sekolah, kecuali SMA Negeri 7 pada keterangan diatas. Berbeda dengan SMA Negeri 2 Denpasar, kegiatan pembelajaran dilaksanakan seperti biasa hingga pkl. 14.00 WITA, tanpa ada jam istirahat sehingga peserta didik yang muslim diperbolehkan izin untuk melaksanakan sholat Jum'at. I Nengah dalam FGD nya menuturkan, “Bagi peserta didik yang taat sholat jum'at, dia akan izin untuk melaksanakan sholat jum'at, namun berbeda dengan yang tidak taat, mereka akan tetap izin, namun tidak sholat jum'at dan atau tidak izin sama sekali”.²⁹⁵

Juga dialami oleh peserta didik di SMA Negeri 7 Denpasar. Bahkan di SMA Negeri 7, kepala sekolah sudah memberikan lampu hijau untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'at dan dhuhr secara berjamaah di aula sekolah.²⁹⁶ Dan berbeda dengan lokus penelitian kami yang terakhir, yakni SMA Negeri 2 Denpasar. Di sana kita mendapatkan informasi bahwasanya ketika jam sholat jumat dimulai, pembelajaran masih diberlangsungkan sehingga peserta didik bisa menunaikan sholat Jum'at ketika mereka izin kepada guru kelas untuk menunaikannya.²⁹⁷ Pertimbangan dari waka kurikulum adalah, kepeulangan atau jam terakhir pembelajaran adalah pukul 14.00 WITA, sebagai ganti jam KBM hari sabtu yang diliburkan.

²⁹⁵ Kurnia PS, “FGD Dengan Syamsuddin Dan I Nengah Mardana Di Ruang Tata Usaha SMA Negeri Denpasar.”

²⁹⁶ Wiratmaja, “Wawancara Dengan Kepala SMA Negeri 7 Denpasar.”

²⁹⁷ Kurnia PS, “FGD Dengan Syamsuddin Dan I Nengah Mardana Di Ruang Tata Usaha SMA Negeri Denpasar.”

Demikian juga dengan agenda PHBI seperti hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, karena secara demografis berbeda. Athalla menyatakan, “ketika hendak hari raya Idul Fitri, kita diliburkan biasanya H-3 lebaran”. Demikian juga menjelang Idul Adha, hanya diliburkan waktu tanggal merah saja. Setelah tanggal merah yang bertepatan dengan 10 *Dzulhijjah*, kita masuk PBM seperti biasa. Dan juga diikuti dengan aktivitas kegiatan lainnya.

Di lain sisi, terkait pelaksanaan pembelajaran, terdapat sekolah yang tetap melaksanakan kegiatan PBM dengan menempatkan jam mata pelajaran PAI didalam jam efektif. Moh. Zaini selaku guru PAI di lingkungan SMKN 2 Denpasar menambahkan, bahwasanya ia mengajar jam mata pelajaran PAI pada jam efektif. Karena kondisi sekolah tersebut masih tersedia kelas kosong untuk ditempati sebagai perpindahan kelas PAI (*moving class system*). Namun ada juga yang melaksanakan kelas pembelajaran PAI diluar jam efektif sekolah sebagaimana Margiyanto di SMA Negeri 7 Denpasar, dan Nur Kholis yang juga mengampu di SMA Negeri 4 Denpasar.²⁹⁸

Demikian juga dengan agenda PHBI lainnya seperti hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, karena secara demografis berbeda. Athalla menyatakan, “ketika hendak hari raya Idul Fitri, kita diliburkan biasanya H-3 lebaran”. Demikian juga menjelang Idul Adha, hanya diliburkan waktu tanggal merah saja. Setelah tanggal merah yang bertepatan dengan 10 *Dzulhijjah*, kita

²⁹⁸ Margiyanto, “Wawancara Dengan Margiyanto Selaku Guru SMKN 1 Denpasar Dan SMAN 7 Denpasar.” Hal tersebut juga terjadi pada Kholis, “Wawancara Dengan Nurkholis Sebagai Guru PAI Di SMA Negeri 4 Denpasar.”

masuk PBM seperti biasa. Dan juga diikuti dengan aktivitas kegiatan lainnya.

Dalam konteks ini, kami melihat bahwa guru menjadi pemeran utama. Dengan demikian, ketika guru tidak begitu memiliki *sense of belonging* atau kurang begitu vokal, dalam artian selalu berinovasi dan berkreasi, maka tidak akan pernah ada kegiatan yang bersifat mendidik siswa. Sebab, dalam konteks minoritas sebagaimana penelitian ini, tatkala siswa muslim minoritas tidak dibiasakan untuk mengadakan atau mengikuti acara kegamaan dan ditambah *circle* teman mereka mayoritas nonmuslim, maka karakter religius mereka dapat tergerus secara perlahan. Dalam hal ini, guru perlu melakukan pendampingan secara intensif. Bahkan, jika diperlukan ketika PHBI, guru memberikan punishment kepada siswa yang tidak mengikuti, misalnya nilai merah, dan lain sebagainya.

Memang, harus diakui, eksistensi guru PAI di sekolah umum Bali tidak begitu eksis sebab secara kuantitas, jumlah guru PAI di Bali cukup terbatas. Seperti yang dipaparkan Ninik, bahwasanya guru PAI SMA/ SMK secara kepangkatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu guru PNS dan non PNS (yaitu honorer atau P3K).²⁹⁹ Peneliti mengamati secara parsial melalui data yang ada pada kantor kementerian agama Kota Denpasar, status guru PAI SMA/ SMK yang PNS berjumlah 2 orang.³⁰⁰ Sedangkan sisanya adalah non PNS, juga bisa disebut P3K atau

²⁹⁹ Surani, “Wawancara Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Oleh Ninik Surani Pada Pkl. 13.00 Sampai 15.30 WITA.”

³⁰⁰ Seksi Pendidikan Islam, “Data Guru PAI” (Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Denpasar, February 16, 2022).

bahkan guru tetap yayasan (guru swasta/ Guru Tidak Tetap (GTT)).

Hal senada juga dijelaskan Jagra terkait keterbatasan guru PAI bahwasannya guru PAI di bawah naungan Dinas Pendidikan (guru PNS) terakhir ada pada tahun 2020. Semenjak semua guru PAI yang berasal dari lingkungan Dinas Pendidikan purna tugas, belum diadakan kembali mengenai pengadaan guru PAI.³⁰¹ Lantas bagaimana dengan sekolah lain? Ternyata ada guru yang memiliki SATMINKAL (Satuan Tempat Mengajar Induk atau Tempat Tugas Induk) SMP juga merangkap menjadi guru SMA/ SMK.³⁰² Zaini menambahkan sekitar 12 guru PAI yang ber-satminkal diluar SMA/ SMK umum, sehingga terdapat 23 guru PAI SMA/ SMK yang tersebar di kota Denpasar.³⁰³

Selain itu, Ninik menambahkan terkait fakta yang dilakukan peneliti dalam wawancaranya, peneliti menemukan data terkait permohonan bantuan SDM yang berasal dari luar kualifikasi sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) atau sejenisnya.³⁰⁴ Dalam artian, mereka bukan dari lulusan Pendidikan Islam, namun mereka memiliki kompetensi bidang keagamaan.³⁰⁵ Demikian pula, terdapat juga guru PNS yang berasal dari Kementerian Agama, dan juga ada guru PAI yang diangkat PNS langsung dari Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Bali,

³⁰¹ Jagra, "Wawancara Dengan Pak Jagra Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Bali" (Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, February 18, 2022).

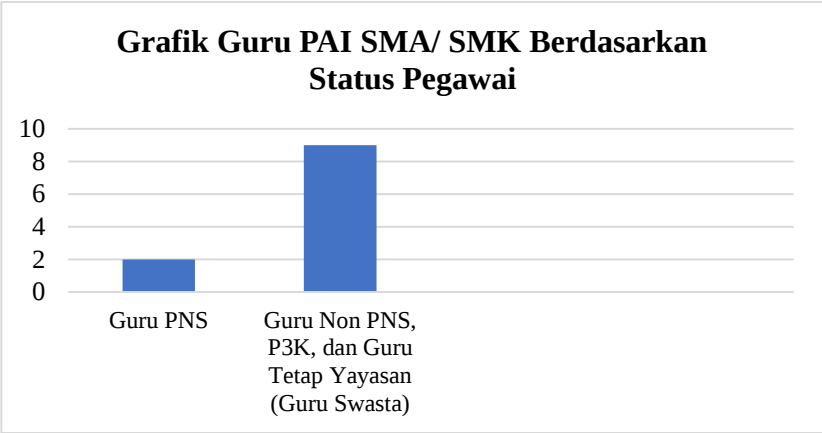
³⁰² Pendidikan Islam, "Data Guru PAI."

³⁰³ Alaika M. Bagus Kurnia PS, "Wawancara Data Statistik Guru PAI SMA/ SMK Bersama H. M. Zaini, M. Pd." (Telephone by Whatsapp, February 22, 2022).

³⁰⁴ Surani, "Wawancara Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Oleh Ninik Surani Pada Pkl. 13.00 Sampai 15.30 WITA."

³⁰⁵ Surani.

sehingga pada saat itu peneliti masih perlu menelusuri data PNS guru PAI yang masuk dalam struktur kepegawaian Diknas Provinsi Bali.³⁰⁶ Sebagaimana grafik data sebagai berikut:



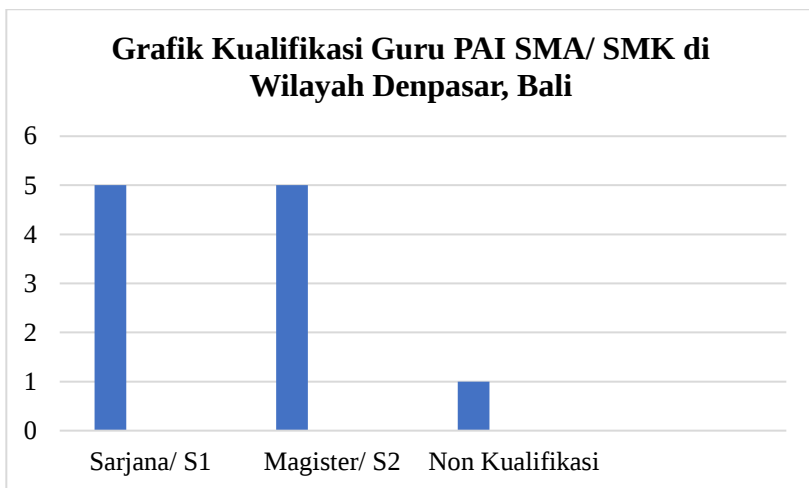
Grafik 4.1 Guru PAI berdasarkan status pegawai

Pada grafik 4.1 diatas jenis guru PAI PNS atau Non PNS yang terdaftar oleh Kementerian Agama Kota Denpasar. Data tersebut belum juga ditampilkan bagaimana guru PAI yang berafiliasi dengan Diknas Provinsi Bali.

Selain itu, ada satu data guru yang tidak disebutkan kualifikasi akademiknya.³⁰⁷ Sebagai prediksi, guru tersebut belum memenuhi kualifikasi akademik atau hanya sebagai praktisi agama yang berasal dari tokoh agama Islam setempat sehingga dapat juga digambarkan grafiknya sebagai berikut:

³⁰⁶ Surani.

³⁰⁷ Pendidikan Islam, “Data Guru PAI.”



Grafik 4.2. Kualifikasi Guru PAI SMA/SMK di Denpasar

Grafik di atas berdasarkan kualifikasi akademik yang sudah ditempuh oleh guru PAI di lingkungan kota Denpasar, namun grafik tersebut masih terbatas pada penyajian dari hasil pengambilan dokumentasi dan wawancara di lingkungan kementerian agama baik Provinsi maupun Kota.

Layanan guru PAI juga tidak kalah penting. Sebab kepuasan peserta didik juga ditentukan oleh kemasakan guru PAI itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat grafik pelayanan guru yang dinyatakan oleh peserta didik sebagai berikut.

Pertama, adalah perhatian guru terhadap peserta didik tentang kewajiban belajarnya seperti pekerjaan tugas harian, pekerjaan rumah (PR), hingga tugas kelompoknya. Hal tersebut digambarkan dengan grafik hanya 74,1% guru memberikan perhatian penuh atas kewajiban belajar peserta didik. Sedangkan

25,9 % mereka menjawab jarang adanya perhatian. Meskipun mata pelajaran PAI dilakukan diluar jam efektif sekolah. namun guru juga memberikan materi tambahan diluar jam tersebut kepada peserta didik sebagai bentuk pengayaan dan pendalaman materi yang telah disampaikan. Hal tersebut dapat dilihat prosentasenya yang menunjukkan 78,9% para guru memberikan materi tambahan. Sedangkan untuk meningkatkan semangat belajar, guru juga tidak jarang mengajak peserta didik untuk belajar diluar kelas dan atau bahkan sekolah. sehingga hal tersebut banyak pengakuan dari peserta didik sebanyak 50% mereka juga mendapatkan pengalaman belajar diluar sekolah.

Kedua, akses buku ajar. Adapun peserta didik yang mendapatkan buku paket atau buku ajar yang telah disediakan oleh sekolah, terdapat 71,4 %, dan 28,6 % belum mendapatkannya. Artinya, masih banyak peserta didik yang tidak mendapatkan jatah buku paket dari sekolah. yaitu 35 peserta didik mendapatkan buku paket, 14 peserta didik belum mendapatkannya. Sedangkan bagaimana guru menyampaikan materi PAI yang sesuai dengan buku ajar atau kurikulum PAI saat ini, sebanyak 75,1% menjawab iya, 24,1% menjawab kadang-kadang dan 6.1% (3 peserta didik) menjawab tidak.

Sebab eksistensi guru PAI di wilayah minoritas terhadap pendidikan kepada seluruh siswa, dalam hal ini adalah Bali, dijamin oleh Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007, khususnya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2). Ini berarti, semua anak usia pendidikan telah memperoleh layanan pendidikan agama berkelanjutan yang

pada gilirannya semua warga negara Indonesia taat mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadikan ajaran agamanya sebagai landasan beretika dan bermoral baik dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.

Uraian tersebut, diperkuat oleh realitas tentang layanan pendidikan agama di sekolah ini, misalnya, guru-guru pendidikan agama tersebut semuanya telah memiliki kualifikasi akademik dengan latar belakang pendidikan guru agama (*link and match*) yang didukung oleh pengalaman mengajar pendidikan agama yang sebagian besar telah memiliki pengalaman “memadai” sebagai pendidik dan pengajar. Dari segi usia, dapat disimpulkan bahwa GPA di sekolah ini sebagian besar masih berusia kurang dari 50 tahun. Artinya guru-guru tersebut masih tergolong usia produktif yang penuh inovatif, dinamis dan kreatif, sehingga proses pembelajaran pendidikan agama “sangat berpotensi” untuk mencetak peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.³⁰⁸

Apabila GPA di sekolah ini dilihat dari status kepegawaian, maka sebagian besar berstatus GPA swasta (honorar). Tapi, tidaklah berarti GPA berstatus kepegawaian PNS lebih berkualitas, jika dibandingkan dengan GPA swasta (honorar). Sebaliknya tidak ada jaminan bahwa GPA yang berstatus kepegawaian swasta lebih berkualitas, jika dibanding

³⁰⁸ Muin, Abdul. "Layanan Pendidikan Agama di SMA (SLUA) Saraswati 1 Denpasar." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2015): 432-433.

dengan GPA yang berstatus kepegawaian PNS. Dan inilah tantangan guru PAI di sekolah umum Denpasar Bali yang mengajar di sekolah-sekolah yang minoritas muslim, di mana Pendidikan Islam tidak masuk dalam skala prioritas.³⁰⁹ Tidak hanya itu, mereka juga harus senantiasa berinovasi dalam mengajar PAI kepada para siswa yang berada dalam wilayah minoritas.

C. Praktik Layanan Waktu dan Pembiasaan Pendidikan Islam di Denpasar Bali

Berdasarkan temuan penulis, sebetulnya siswa muslim di lokus penelitian ini tidak minoritas sekali. Bahkan, bisa dikatakan siswa muslim di Bali adalah *runner up* karena di dalam satu sekolah terdapat sekurangnya 500 siswa muslim. Hal ini senada dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) yang mencatat penduduk di Bali berjumlah 4,27 juta jiwa pada 30 Juni 2021. Rincian nya, mayoritas atau sebanyak 3,71 juta jiwa (86,8%) penduduk di Pulau Dewata beragama Hindu, dan Islam menjadi agama terbesar kedua dengan jumlah pemeluk 430,92 ribu jiwa (10,08%).³¹⁰ Kemudian, sebanyak 69,03 ribu jiwa (1,62%) penduduk Bali

³⁰⁹ Kemenag, "Dinilai Berdedikasi, Tiga Guru PAI ini Raih Penghargaan Nasional 2019", Kemenag.go.id, (14 Desember 2019), dalam <https://kemenag.go.id/read/dinilai-berdedikasi-tiga-guru-pai-ini-raih-penghargaan-nasional-2019-bgq1o>, diakses 23 Oktober 2022.

³¹⁰ Viva Budy Kusnandar, "Islam Agama Terbesar Kedua Di Bali | Databoks," accessed October 23, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/islam-agama-terbesar-kedua-di-bali>.

memeluk agama Kristen, sebanyak 34,6 ribu jiwa (0,81) penduduk Bali agama Katolik, sebanyak 29,04 ribu jiwa (0,68%) beragama Budha, sebanyak 521 jiwa (0,01%) beragama Konghucu, dan 99 jiwa (0,0) menganut aliran kepercayaan.

Dalam konteks minoritas layaknya Bali, layanan Pendidikan Islam yang harusnya diberikan secara layak kepada siswa muslim, akan tetapi tidak memadai. Banyak hal yang semestinya mereka mendapatkan hak sebagai siswa, namun tidak demikian bagi siswa muslim di Bali. Oleh karena itu, penulis mengamati beberapa temuan dan kemudian menganalisisnya untuk menjelaskan posisi siswa muslim minoritas beserta dilema yang dialaminya, sebagai berikut.

Pertama, peneliti mengajak berdiskusi tentang doa pagi. Dari beberapa peserta didik yang kami ajak untuk berdiskusi, terdapat banyak kesamaan, hingga perbedaan. Sebagaimana persamaan tersebut adalah cara berdoa yang dilakukan oleh peserta didik Hindu dengan muslim. Mereka menyatakan kegiatan doa pagi sebelum KBM dimulai, bahwasanya kegiatan doa pagi dilakukan secara terpusat dari sekolah, yang dipandu secara Hindu sehingga mereka yang beragama Islam mencoba menyelesaikan doanya masing-masing dengan duduk ditempatnya, kemudian berdiri. Karena prosesi doa yang dilakukan oleh umat Hindu adalah dengan berdiri.

Sedangkan letak perbedaannya adalah seperti yang diinyatakan oleh Galih dan Nur sebagai siswa muslim di SMA Negeri 7 Denpasar. Ia mendapati banyak siswa yang berdoa secara muslim, namun selepas berdoa, dia tidak ikut untuk berdiri dan diam, melainkan dengan duduk di tempat saja.

Namun apabila ada intruksi untuk berdiri, maka selepas menyelesaikan doa sebelum belajar, ia akan ikut berdiri dan diam sebagai penghormatan dan bentuk toleransinya.³¹¹

Di samping itu, peneliti mencoba menelusuri kembali, apakah guru PAI juga memberikan tulisan berupa catatan kecil atau buku panduan doa sebelum belajar yang diberikan kepada peserta didiknya, untuk dibaca secara mandiri, namun ketika dikonfirmasi dikatakan belum ada. Guru PAI yang hadir pun juga menyatakan belum pernah memberikan amaliyah doa pagi sebelum pembelajaran dimulai kepada peserta didik. Namun, di sisi lain pada saat jam KBM yang dilaksanakan, maka akan dimulainya dengan membaca doa pagi dengan bacaan *raditu billahi rabba* sampai akhir, dan dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek pilihan.³¹² Namun di SMK Negeri 1 dan SMA Negeri 7 hanya melakukan doa pagi tanpa membaca surat-surat pendek.

Kedua, layanan Kurikulum. Untuk memotret layanan kurikulum yang ada, penulis melakukan pengambilan data melalui angket yang diberikan kepada siswa muslim tersebut. Dari hasil pengambilan data berupa angket, terdapat sekitar 1.600 peserta didik muslim dari 4 sekolah yang diambil oleh peneliti, terdapat 58 peserta didik yang mengisi kuesioner dan rata-rata diisi oleh peserta didik kelas X SMK. Mayoritas peserta didik yang mengisi kuesioner adalah peserta didik dari SMK Negeri 1 Denpasar.

³¹¹ Kurnia PS, "Focus Group Discussion Bersama Peserta Didik SMA/ SMK Di Denpasar, Bali."

³¹² Kurnia PS.

Dari angket yang kami sebar, ternyata peserta didik yang mendapatkan buku paket atau buku ajar yang telah disediakan oleh sekolah, terdapat sekitar 71,4 %, dan 28,6 % belum mendapatkannya. Artinya, masih banyak peserta didik yang tidak mendapatkan jatah buku paket dari sekolah yaitu 35 peserta didik mendapatkan buku paket, dan 14 peserta didik belum mendapatkannya.

Demikian juga dengan bahan ajar yang digunakan dalam pelaksanaan KBM mata pelajaran PAI dan Budi pekerti. Dimulai dari SMA Negeri 2 Denpasar, mereka lebih cenderung menggunakan buku Lembar Kerja Siswa (baca: LKS), namun jarang digunakan sebagai acuan referensi dalam pembelajaran sehingga materi yang selalu disampaikan oleh guru PAI adalah dengan memanfaatkan ICT, seperti menonton video yang terkait dengan PAI, kemudian peserta didik ditugaskan untuk merangkum video tersebut, dan juga terkadang guru menjelaskan, terkadang juga tidak.

Selanjutnya, peserta didik SMA Negeri 7 Denpasar menyatakan mengenai bahan ajar yang digunakan, bahwa mereka menggunakan buku paket sebagai buku induk referensi pembelajaran. Namun jumlah buku paket dengan jumlah peserta didik tidak mencukupi untuk mendapatkan semuanya. Dengan kata lain, terdapat dua kemungkinan; peserta didik enggan mengambil buku paket tersebut di perpustakaan yang menyediakannya, atau perpustakaan hanya menyediakan buku paket mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti dengan jumlah yang minim. Akan tetapi, di dalam praktek penyampaian materi pembelajaran sampai pada pertemuan tatap muka pada bulan

Maret 2022 di minggu terakhir, guru masih menyampaikan dan memberikan penugasan melalui akun *google classroom*.

Selain itu, layanan kurikulum berikutnya tercermin dari bagaimana guru menyampaikan materi PAI yang sesuai dengan buku ajar atau kurikulum PAI saat ini. Dari data yang kami dapat, sebanyak 75,1% menjawab iya, 24,1% menjawab kadang-kadang dan 6.1% (3 peserta didik) menjawab tidak. Artinya, sebagian besar guru menyampaikan materi sesuai buku ajar, dan sebagiannya lagi tidak. Selanjutnya, mengenai materi mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti yang diberikan oleh guru sebagaimana pada saat FGD, banyak peserta didik yang tidak mengetahui materi apa sajakah yang sudah diberikan dan disampaikan oleh guru sehingga pada proses pembelajarannya, dapat dipastikan guru tidak menyampaikan maksud dan tujuan materi apa yang akan disampaikan dan tepatnya tema apa yang akan dipelajari oleh peserta didik.

Lebih dari itu, durasi waktu pembelajaran PAI sebagaimana standar pembelajaran yang dituangkan oleh Mendikbudristek dalam salinan pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran³¹³, yang mestinya 3 jam pelajaran (3JP), ternyata ada 42.1% peserta didik menjawab tidak tentu. Yang artinya adalah mereka mendapatkan jatah waktu mata pelajaran PAI tidak menentu. Ketika dikonfirmasi oleh beberapa peserta didik, juga ketika melakukan observasi, semuanya dipraktikkannya tidak sampai 3 JP. 17.5% menjawab

³¹³ Nadiem Anwar Makarim, “Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/ M/ 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran” (KEMENDIKBUDRISTEK, February 10, 2022).

tidak dan 40,4% menjawab iya. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh peneliti dari 35,4 % peserta didik. Apakah benar mereka mendapatkan 3 JP pada mata pelajaran PAI, ternyata hampir kesemuanya ada yang menjawab asal, dan mereka adalah peserta didik kelas X atau ketika pertemuan pertama pada tahun ajaran baru.

Demikian juga pendistribusian buku ajar PAI yang menjadi hak peserta didik untuk dapat mengaksesnya secara otentik, 75,9 % mereka mendapatkannya, dan 24,1 % tidak mendapatkan buku ajar PAI dari sekolah. SMK Negeri 2 Denpasar, juga menyatakan terkait penggunaan bahan ajar. Mereka menggunakan buku LKS sebagai bahan ajar PAI, namun dalam praktiknya masih banyak peserta didik yang tidak menggunakannya. Ketika peneliti mengkonfirmasi kembali, mereka menjawabnya dengan alasan enggan untuk membeli buku LKS tersebut. Hal tersebut juga dialami sebagaimana SMA Negeri 7 Denpasar, yang mana perpustakaan SMK Negeri 2 Denpasar juga menyediakan buku paket PAI secara terbatas.

Sedangkan pada saat proses pembelajaran, biasanya guru juga menyampaikan tujuan materi yang akan diajarkan. Namun demikian, ada banyak materi yang disampaikan guru tidak sesuai dengan tujuan materi. Hal ini terkonfirmasi dari data yang kami dapatkan bahwa terdapat 63,2 % membenarkan atas penyampaian tujuan pembelajaran, dan sisanya sebanyak 36,8 % menjawab tidak. Yang artinya, hampir seperempat dari mereka (baca: siswa) tidak mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai tujuan pembelajaran. Ada beberapa kemungkinan yang didapat, *pertama* adalah mereka tidak mendengarkan

materi yang disampaikan oleh guru, yang *kedua* guru benar-benar tidak memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran yang tertuang dalam kurikulum PAI.

Selanjutnya, mengenai penilaian belajar. Semestinya, peserta didik secara ideal mendapatkan penilaian harian, penilaian semester dan penilaian akhir. Dan hal tersebut dilakukan semua oleh guru PAI. Sebagaimana data yang kami dapatkan, menunjukkan bahwa 91,2 % peserta didik menjawab iya, dan 8,8% peserta didik menjawab tidak. Adapun dalam praktik pembelajarannya, sebagai pengembangan kompetensi keterampilan (K4), guru lebih menekankan pada pengambilan nilai keterampilan melalui kegiatan Rohis yang dilakukan pada saat Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Sebagaimana pada tanggal 22 Mei 2022, guru mengambil penilaian K4 dengan melihat kehadiran peserta didik dalam kegiatan Halal bi Halal yang diadakannya. Juga di SMK Negeri 1 dengan mengambil penilaian K4 diluar kompetensi inti yang tercantum pada kurikulum PAI SMA/ SMK, yaitu dengan menugaskan menulis kaligrafi.

Lebih dari itu, guru PAI juga melakukan penugasan layaknya tugas mapel lainnya. Penugasan pada mata pelajaran PAI, di SMK Negeri 1 Denpasar dan SMA Negeri 7 Denpasar yang mendapatkan tugas tidak terstruktur (PR atau Pekerjaan Rumah) dengan komposisi lebih besar 70 % melalui akun *google classroom*. Sedangkan SMA Negeri 2 dan SMKN 2 Denpasar mendapatkan tugas di luar materi yang mengacu pada LKS, dengan merangkum video, mereview artikel tulisan religious,

hingga terkadang mencatat beberapa surat-surat pilihan yang ada di dalam al-Qur'an.

Layanan kurikulum berikutnya adalah durasi jam pelajaran PAI. Jam pelajaran PAI dilakukan pada saat waktu non efektif. Sebagaimana jawaban yang dituangkan oleh peserta didik, yaitu 82,8 % mereka menjawab jam efektif dan 17,2 % mereka menjawab non efektif. Hal tersebut juga perlu ditinjau dari waktu pelaksanaan KBM mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Sebagian besar pelaksanaan KBM PAI dan Budi pekerti di beberapa sekolah di Denpasar dilaksanakan pada jam non efektif. Hal tersebut sebagaimana pernyataan dari salah satu guru yang menghadiri FGD.

Syamsuddin memberikan keterangan,” Sebenarnya mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti tidak masuk dalam penjadwalan mata pelajaran dari sekolah, sehingga yang menjadwalkan dan mengetahui sendiri adalah guru PAI dan peserta didiknya sendiri”.³¹⁴ Perlu digaris bawahi, implementasi KBM mata pelajaran PAI dilaksanakan sebelum pelaksanaan jam efektif pembelajaran atau setelah jam efektif pembelajaran. Artinya pelaksanaannya kalau tidak dilaksanakan pagi hari sebelum jam masuk sekolah, atau dilaksanakan pada jam selepas pulang sekolah. Sebagaimana di SMK Negeri 2 Denpasar dilaksanakan pada jam pulang sekolah, yaitu jam 13.00 WITA. Sedangkan di SMA Negeri 2 Denpasar dilaksanakan pada pagi hari sebelum jam masuk sekolah. Juga demikian oleh SMK Negeri 1 Denpasar dan SMA Negeri 7 Denpasar yang melangsungkan

³¹⁴ Wawancara dengan Syamsuddin, guru PAI SMAN 2 Denpasar.

pembelajarannya dengan jam kondisional. Tergantung dari kegunaan kelas yang digunakan atau keberadaan jadwal dan program sekolah.

Dengan banyaknya jumlah peserta didik yang beragama Islam disetiap sekolah, juga mempengaruhi jam pelajaran yang dilakukan oleh guru PAI yang mengampu didalamnya. Sebagaimana diketahui, dalam satu sekolah hanya 1 guru PAI saja, sehingga tidak ada ruang diskusi atau musyawarah guru mata pelajaran didalamnya. Juga demikian jam belajar PAI yang ada diluar jam efektif sekolah. Idealnya mereka mendapatkan pelayanan pembelajaran PAI 3 x 45 menit atau 3 jam pelajaran dalam satu pekan.³¹⁵ Namun dalam praktiknya, lama pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa SMA/ SMK di Denpasar dalam satu pekan selama 30 – 60 menit. Sebagaimana di SMK Negeri 2 Denpasar selama 30 menit. SMK Negeri 1 Denpasar selama 45 menit, dan SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 7 Denpasar selama 60 menit.³¹⁶

Beberapa kendala juga dialami oleh beberapa guru dalam melangsungkan KBM. Salah satunya adalah tingkat kedisiplinan peserta didik dalam mengikuti mata pelajaran PAI. Beberapa peserta didik tidak hadir tanpa ada keterangan, ada juga yang berbenturan dengan program ekstrakurikuler sekolah yang dilaksanakan pada jam yang sama.

³¹⁵ Achmad Yusuf, “Pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Multikultural (Perspektif Psikologi Pembelajaran),” *Jurnal Al-Murabbi* 4, no. 2 (2019): 251–74.

³¹⁶ Kurnia PS, “Focus Group Discussion Bersama Peserta Didik SMA/ SMK Di Denpasar, Bali.”

D. Praktik Layanan Sarpras Pendidikan Islam bagi Siswa Minoritas Muslim Denpasar Bali

Keberadaan siswa minoritas muslim cukup dilematis. Bagaimana tidak, sarana prasarana yang harusnya terpenuhi bagi mereka, namun faktanya kurang. Bahkan, tidak memadai. Misalnya, layanan pengadaan tempat ibadah. Dalam hal ini, terdapat 98,3 % peserta didik mengatakan ada tempat untuk sholat, sedangkan sisanya hanya 1,7 % menyatakan tidak adanya tempat ibadah. Demikian juga kembali kepada fasilitas ibadah yang disediakan oleh sekolah terhadap peserta didik, guru dan karyawan muslim. Beberapa teguran yang dilakukan oleh salah satu guru di sekolah, misalnya di SMK Negeri 1 Denpasar.

Beberapa guru memberikan teguran bagi peserta didik muslim yang memangkas waktu masuk kelas pasca jam istirahat dikarenakan mereka beralasan menunaikan shalat dhuhur. Ketika keterangan tersebut diteruskan kepada guru PAI, ternyata beberapa indikasi yang menyebabkan molornya jam masuk kelas bagi peserta didik muslim, yaitu minimnya kran air untuk melakukan wudhu. Sebagaimana keterangan Margiyanto, mereka yang beragama muslim berjumlah 250 – 300an, namun jumlah kran wudhu hanya tersedia satu saluran yang bisa digunakan dari empat saluran ideal. Hal tersebut juga menjadi indikasi utama. Juga demikian ruang shalat yang disediakan hanya berdiameter 3X5 meter di sudut lorong kelas. Hal tersebut juga menyebabkan pelaksanaan sholat dhuhur dilakukan secara

bergantian. Maka menjadi permasalahan tersendiri atas kebutuhan ibadah peserta didik di dalamnya.³¹⁷

Demikian juga di SMA Negeri 7 Denpasar. Mereka boleh melakukan ritual shalat dhuhur dan Jum'at di Aula yang sudah ada. Namun juga tidak disediakan kran untuk wudhu. Sehingga mereka untuk mendapatkan air wudhu di kamar mandi sekolah. Dan begitu juga dirasakan oleh SMK Negeri 2 Denpasar, serta SMA Negeri 2 Denpasar yang mana kondisi tempat ibadahnya sama seperti SMK Negeri 1 Denpasar. Namun bedanya, mereka mendapatkan fasilitas ruang khusus untuk dijadikan sebagai mushalla. Misalnya di SMK Negeri 2 Denpasar secara geografis mushalla berada di depan perpustakaan dan berada di lantai 2, dan tempat wudhu berada di lantai 1 sehingga mereka yang hendak sholat harus mengambil air wudhu di lantai 1 terlebih dahulu, di depan taman sekolah.

Sedangkan di SMA Negeri 2 Denpasar posisi Mushalla bersinggungan dengan arah UKS. Juga tempat wudhu berada di depan Pura sekolah. Namun di SMA Negeri 2 Denpasar letak mushalla dan tempat wudhu bebedaannya di lantai 1 semuanya. Kedua sekolah tersebut memiliki luas mushalla kira-kira 15 m². Menjadi hal yang sama problemnya pada kala itu dengan SMK Negeri 1 Denpasar, yaitu jumlah saluran air wudhu yang berada di SMA Negeri 2 Denpasar hanya 1. Namun belum ada keterangan tertentu mengenai teguran dari personal warga sekolah sebagaimana di SMK Negeri 1 Denpasar.

³¹⁷ Kurnia PS.

Sarana pra sarana berikutnya adalah ruang belajar khusus untuk mata pelajaran PAI. Dari hasil kuesioner, terdapat 69% peserta didik mendapatkan ruang kelas khusus untuk mata pelajaran PAI. sedangkan 31% mereka menjawab tidak adanya ruang khusus untuk mata pelajaran PAI. Kemudian, ruang kelas. Untuk ruang kelas ini mayoritas mereka menjawab 100% tentang ketersediaan ruangan untuk mata pelajaran PAI yang disebutkan. Akan tetapi untuk pemilihan tempat pelaksanaan mata pelajaran sekolah sudah menyediakan kelas yang representatif untuk melaksanakan pembelajarannya. Sebagaimana di SMK Negeri 1 Denapsar, Aldi sebagai pengurus Rohis sekaligus peserta didik menyatakan bahwa mereka juga yang mengusahakan untuk mencari kelas kosong sebagai tempat KBM. Sedangkan di sekolah lain sudah disediakan kelas tetap untuk dijadikan KBM secara berkala.

Selanjutnya, jumlah peserta didik dalam satu kelas. Sebagaimana dikatakan kelas efektif di era saat ini, adalah dengan besar kecilnya jumlah peserta didik yang mengikuti KBM dalam satu kelas. Sebagaimana Nurnajmi, dkk menyebutkan mengenai kelas ideal dalam satu kelas memiliki kapasitas lebih kurang 20 peserta didik.³¹⁸ Seperti SMK Negeri 2 Denpasar, dalam satu jenjang kelas seperti kelas X, terdapat 54 peserta didik, dan pelaksanaan KBM PAI dibagi menjadi 2 rombongan belajar (baca: rombel), karena mengingat

³¹⁸ Nurnajmi Wahyuningsih, Etty Nurbayani, and Wildan Saugi, "Pengaruh Rasio Jumlah Siswa Dalam Kelas Terhadap Efektivitas Pembelajaran PAI Di SMK Farmasi Samarinda," *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 1 (2019): 47–61.

efektivitasnya. Demikian juga di SMK Negeri 1 Denpasar yang membagi rombongan belajar pada setiap jenjang menjadi 4 kelas. Memperhatikan jumlah peserta didik dalam tiap jenjang hingga mencapai ± 100 peserta didik. Hal tersebut juga dilakukan dan diatur oleh guru PAI yang ada di sekolah lain. Selain itu, sekolah juga menyediakan tempat wudhu untuk pelengkap sarana ibadah. Hal tersebut juga dinyatakan 100% tentang adanya tempat untuk berwudhu.

E. Praktik Layanan Kesiswaan bagi Siswa Minoritas Muslim di Denpasar Bali

Pada layanan kesiswaan ini, peneliti fokus menanyakan kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan penunjang kurikuler dari PAI itu sendiri. Sebagaimana regulasi hingga program sekolah yang sudah dianggarkan. Kegiatan ekstrakurikuler, beberapa sekolah juga menyediakan program ekstra yang menunjang mata pelajaran PAI. Hal tersebut diketahui terkait adanya 29,1% mereka menjawab ada. Namun jenis kegiatan ekstrakurikuler tersebut belum ditanyakan secara pasti seperti apa bentuknya sehingga dapat ditelusuri dengan jenis dan judul penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kegiatan kesiswaan. Dan 70,9 % peserta didik menjawab tidak ada. Hal ini sangat lumrah karena peserta didik muslim juga bukan tergolong mayoritas.

Peserta didik juga mengungkapkan atas adanya kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dengan terbentuknya secara

legal sub organisasi sie kerohanian Islam. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya grafik 98,3 % menjawab adanya legalitas izin dari sekolah. dan 1.7 % mereka menjawab tidak. Dengan adanya sie kerohanian Islam, maka peserta didik juga diingatkan atas momentum Peringatan Hari Besar Islam. Dari sini sekolah juga memberikan ruang kebebasan bagi peserta didik muslim untuk memperingati hari besar Islam itu sendiri.

Sebagaimana dari hasil kuesioner, mereka menjawab 77,4 % yang menyatakan bentuk legal izinnya sekolah atas kegiatan PHBI. Sedangkan sisanya 22,6 % mereka menyatakan tidak. Hal tersebut dapat ditelusuri apakah mereka peserta didik kelas X yang sudah barang tentu belum merasakan bagaimana kemas PHBI yang diadakan oleh sekolahnya masing-masing. Juga tempat pelaksanaannya, sekolah juga membolehkan kegiatan tersebut dilaksanakan didalam sekolah. Sebagaimana grafik tersebut menyatakan, 92,6 % mereka menjawab iya dan sisanya 7,4 % mereka menjawab tidak mendapatkan izin atau ketidaktahuannya.

Begitu juga dengan respon orang tua wali murid mengenai waktu pelaksanaan KBM mata pelajaran PAI. Peneliti hanya menemui keterangan dari Galih dari SMA Negeri 7 Denpasar, dan Aldi dari SMK Negeri 1 Denpasar. Mereka menerangkan tidak ada keterangan ataupun respon yang spesifik terhadap mata pelajaran PAI di sekolahnya masing-masing. Mereka hanya menanyakan kenapa ia pulang terlambat ketika di awal masuk pembelajaran. Ternyata dalam hal tersebut, sekolah dan guru PAI tidak memberikan keterangan atau pengumuman mengenai kondisi mata pelajaran PAI di sekolah masing-

masing. Namun untuk respon atau keterangan lainnya belum ada komplain ataupun hal yang lain dari keterangan wali murid.

Hal tersebut juga ditambahkan oleh M. Zaini mengenai kondisi muslim di SMA/ SMK Negeri. Padahal secara kuantitas, muslim di Denpasar dalam satu sekolah sudah mencapai ratusan hingga ribuan peserta didik. Namun dalam praktik perlakuan satuan Pendidikan atau sekolah, M. Zaini masih merasakan menjadi minoritas. Pun demikian usulan dari beberapa guru PAI mengenai disertasi yang sedang disusun oleh peneliti, agar menghilangkan kata minoritas pada judul tersebut. Karena mereka menganggap muslim di setiap sekolah bukan menjadi minoritas sehingga mereka secara kuantitas berada di urutan nomer dua setelah Hindu.

Secara sosiologis, sebenarnya guru PAI sudah cukup baik dalam melakukan pengembangan pembelajaran yang lebih kreatif dan variatif di luar Rencana Proses Pembelajaran (RPP) yang disusun. Kecakapan guru PAI, sejauh kami lihat, sudah diapresiasi oleh stakeholders terkait, misalnya mendapatkan fasilitas sarpras yang memadai, dan keleluasaan mengadakan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), dan sebagainya.

F. Praktik Pembelajaran Pendidikan Islam bagi Siswa Minoritas Muslim di Denpasar Bali

Layanan guru PAI juga tidak kalah penting. Sebab kepuasan peserta didik juga ditentukan oleh kemasakan guru PAI itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat pelayanan guru yang dinyatakan oleh peserta didik sebagai berikut: perhatian guru terhadap peserta didik tentang kewajiban belajarnya seperti pekerjaan tugas harian, pekerjaan rumah (PR), hingga tugas kelompoknya. Hal tersebut digambarkan dengan grafik hanya 74,1% guru memberikan perhatian penuh atas kewajiban belajar peserta didik. Sedangkan 25,9 % mereka menjawab jarang adanya perhatian.

Meskipun mata pelajaran PAI dilakukan di luar jam efektif sekolah, namun guru juga memberikan materi tambahan diluar jam tersebut kepada peserta didik sebagai bentuk pengayaan dan pendalaman materi yang telah disampaikan. Hal tersebut dapat dilihat prosentasenya yang menunjukkan 78,9 % para guru memberikan materi tambahan. Sedangkan untuk meningkatkan semangat belajar, guru juga tidak jarang mengajak peserta didik untuk belajar diluar kelas dan atau bahkan sekolah. sehingga hal tersebut banyak pengakuan dari peserta didik sebanyak 50% mereka juga mendapatkan pengalaman belajar diluar sekolah.

Juga demikian, guru yang sukses adalah guru yang mampu meningkatkan kompetensi keahlian peserta didik. Salah satu dari kompetensi yang diharapkan oleh peserta didik setelah mendapatkan mata pelajaran PAI adalah kompetensi keahlian

ibadah dan membaca al-Qur'an. Hal tersebut ditunjukkan, 75% peserta didik cakap melaksanakan ibadah dan tata cara melaksanakan ritual peribadatan dengan baik. Demikian juga kompetensinya dalam membaca al-Qur'an, 80,4 % mereka merasakan bantuan guru PAI dalam mendalami tata cara membaca al-Qur'an dengan tartil.

Sebagai perwujudan keberhasilan pelayanan pembelajaran PAI, perlu kiranya guru meminta pendapat atau melakukan sharing kepada orang tua wali murid. Namun perlu dilihat bagaimana intensitas komunikasinya dengan orang tua wali murid, 46,4 % guru tidak pernah sama sekali komunikasi dengan wali murid, dan 21,4 % guru jarang melakukannya. Hal tersebut menunjukkan kesenjangan komunikasi antar kedua arah antara pelayan dan *customer*. Dan sisanya 32,1% guru sudah melaksanakannya. Hal ini perlu menjadi perhatian dan evaluasi tersendiri, agar guru PAI mampu melakukan pendekatan dengan keluarga peserta didik.

Dari data di atas, bahwa dalam proses belajar-mengajar yang dilakukan oleh SMAN 2, SMAN 7, SMKN 1, SMKN 2 Denpasar melalui kegiatan intrakurikuler umumnya menggunakan metode pembelajaran: ceramah, penugasan, presentasi, diskusi, tanya-jawab dan demonstrasi.³¹⁹ Metode pembelajaran ini disesuaikan dengan materi pembelajaran yang sedang disajikan. Proses pembelajaran tidak hanya terbatas pada sejumlah materi pembelajaran yang tercantum pada kurikulum

³¹⁹ Hal serupa juga dilakukan di SMA Saraswati 1 Denpasar. Lihat Muin, Abdul. "Layanan Pendidikan Agama Di Sma (Slua) Saraswati 1 Denpasar." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2015): 434-437.

pendidikan agama. Tapi, juga berkaitan dengan berbagai kegiatan peserta didik dalam rangka memperdalam dan memperluas pemahaman materi pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan oleh peserta didik dalam kelas, seperti; berdiskusi dengan teman-temannya atau mendemonstrasikan suatu topik pembelajaran.³²⁰

Di samping itu, untuk memperdalam materi pelajaran yang telah diterima melalui intra kurikuler, dilanjutkan di luar kelas dan di luar jam pelajaran, kegiatan ini berupa pengayaan. Kegiatan ini dilakukan oleh siswa dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, seperti pembiasaan mengaji, penyelenggaraan PHBI, dan lain sebagainya. Proses pembelajaran pendidikan agama berikutnya dilakukan melalui kegiatan co-kurikuler, seperti; latihan membaca dan menulis Qur'an, menyimpulkan khotbah Jum'at tempat siswa shalat Jum'at yang diserahkan hari Sabtu kepada GPA Islam, menghafal surat dan ayat-ayat tertentu.

Proses pembelajaran melalui ekstrakurikuler dan kurikuler dimaksudkan untuk lebih memantapkan pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap suatu materi pembelajaran yang telah diserap melalui pembelajaran intra kurikuler. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberian tugas-tugas oleh guru kepada peserta didik. Namun demikian, pada dasarnya kegiatan intra kurikuler, ekstrakurikuler maupun kurikuler merupakan satu kesatuan yang saling mendukung, melengkapi

³²⁰ Muin, Abdul. "Layanan Pendidikan Agama Di Sma (Slua) Saraswati 1 Denpasar." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2015): 434-437.

dan menyempurnakan, sehingga antara satu dengan lainnya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.

Dengan demikian, secara administratif, dapat disimpulkan bahwa frekuensi pelaksanaan pendidikan agama baik melalui kegiatan ekstra-kurikuler maupun co-kurikuler sebagaimana terurai di atas, ternyata lebih cenderung disebabkan oleh faktor ketersediaan sarana/fasilitas pendidikan agama yang memadai di sekolah tersebut. Dari hasil observasi yang dilakukan terhadap sarana/fasilitas pendidikan agama menunjukkan, bahwa tingkat ketersediaan sarana/fasilitas PA Hindu jauh lebih “sangat memadai”, jika dibandingkan dengan ketersediaan sarana/fasilitas PA Islam, PA Kristen dan PA Buddha, antara lain, tempat atau ruang khusus peserta didik yang beragama Islam, Kristen dan Buddha untuk melaksanakan ibadah belum tersedia di sekolah ini.³²¹ Padahal sudah dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 45 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 4 ayat (5). Kondisi ini jelas dapat mempengaruhi tingkat kualitas proses pembelajaran pendidikan agama peserta didik yang bersangkutan.³²²

Sejalan dengan data di atas, menurut Krathwohl dan Bloom kemampuan manusia dibagi ke dalam tiga bidang, yaitu:

³²¹ Temuan penulis ketika observasi, dan ternyata hal tersebut juga berlaku di beberapa sekolah swasta di Bali, seperti SMA Saraswati 1 Denpasar. Lihat Muin, Abdul. "Layanan Pendidikan Agama Di Sma (Slua) Saraswati 1 Denpasar." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2015): 434-437.

³²² Muin, Abdul. "Layanan Pendidikan Agama Di Sma (Slua) Saraswati 1 Denpasar." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2015):435.

kognitif, afektif dan psychomotor. Bidang kognitif menitikberatkan kepada pengetahuan dan kemampuan mengingat atau memahami dan kemampuan intelektual. Bidang afektif berkaitan dengan minat, sikap dan nilai. Bidang psychomotor berkaitan dengan kemampuan memanipulasi gerakan.³²³ Ini berarti, bahwa pembelajaran pendidikan agama, harus mencakup tiga bidang tersebut.

G. Problematika Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas di Denpasar Bali

Indonesia – negara kepulauan yang sangat luas dengan lebih dari 17.000 pulau – memiliki populasi sekitar 255 juta orang; sebuah angka yang menjadikan Indonesia sebagai negara terpadat keempat di dunia. Jumlah yang mengesankan ini juga menyiratkan bahwa keragaman budaya, etnis, agama dan bahasa yang signifikan dapat diharapkan dapat ditemukan dalam batas-batasnya, mulai dari ritual harian Hindu yang dipraktikkan di pulau Bali hingga prevalensi hukum syariah Islam di Aceh (Sumatera) atau gaya hidup pemburu-pengumpul semi nomaden masyarakat Mentawai.

³²³ David R. Krathwohl and Benjamin S. Bloom. 1973. *Taxonomy of Educational Obyektives, The Classifi cation of Educational Goals, Handbook II Affective Domain*. London: Longman Group, 6-7; lihat juga Muin, Abdul. "Layanan Pendidikan Agama Di Sma (Slua) Saraswati 1 Denpasar." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pend idikan Agama dan Keagamaan* (2015):436.

Apalagi, sebelum kerangka nasional diletakkan di atasnya, berbagai daerah mengalami sejarah politik dan ekonomi yang terpisah yang masih terlihat dalam dinamika daerah saat ini. Semboyan nasional Indonesia Bhineka Tunggal Ika (Persatuan dalam Keanekaragaman) mengacu pada keanekaragaman dalam komposisi internal negara tetapi juga menunjukkan bahwa - terlepas dari semua perbedaan dalam masyarakat multikulturalnya - ada rasa persatuan (keindonesiaan) yang sebenarnya di antara masyarakat Indonesia.

Konstitusi Indonesia memberikan beberapa derajat kebebasan beragama. Pemerintah menghormati kebebasan beragama untuk enam agama yang diakui secara resmi (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu) dan/atau agama rakyat. Semua agama memiliki hak yang sama menurut hukum Indonesia. Menurut sensus 2018, 86,7% persen populasi adalah Muslim, 7,6% Protestan, 3,12% Katolik, 2% Hindu, 1% Budha, <1% Konghucu, <1% lainnya, dan <1% tidak disebutkan atau tidak ditanyakan.³²⁴ Sebagian besar Muslim di negara ini adalah Sunni. Dua ormas Islam terbesar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, masing-masing memiliki basis massa atau pengikut sebanyak 108 juta (NU) dan 30 juta (Muhammadiyah)

³²⁴ "Statistik Umat Menurut Agama di Indonesia" (dalam bahasa Indonesia). Kementerian Agama Republik Indonesia. 15 Mei 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 September 2020, diakses tanggal 15 November 2020 dan 8 Desember 2022. Muslim 231.069.932 (86.7), Kristen 20.246.267 (7.6), Katolik 8.325.339 (3.12), Hindu 4.646.357 (1.74), Budha 2.062.150 (0,77), Khonghucu 117091 (0,03), Lainnya/Kepercayaan Tradisional 112.792 (0,04), Total 266.534.836.

pengikut Sunni. Ada juga sekitar satu juta hingga tiga juta Muslim Syiah.³²⁵

Pasal 29 UUD 1945 mengatur kebebasan beragama, memberikan "setiap orang hak untuk beribadat menurut agama atau kepercayaannya masing-masing", dan menyatakan bahwa "bangsa berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila pertama ideologi nasional negara, Pancasila, juga menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemerintah tidak mengizinkan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Pegawai pemerintah harus bersumpah setia kepada negara dan ideologi Pancasila. Kebijakan lain membatasi jenis kegiatan keagamaan tertentu, terutama di antara kelompok agama yang tidak diakui dan sekte "menyimpang" dari kelompok agama yang diakui.

Aceh tetap menjadi satu-satunya provinsi yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk menerapkan syariat Islam, dan non-Muslim di provinsi tersebut tetap dibebaskan dari syariat. Aceh mengadopsi hukum pidana berbasis Syariah yang memberlakukan hukuman fisik bagi pelanggaran.³²⁶

Kementerian Agama memperluas status resmi menjadi enam kelompok agama: Islam, Katolik, Protestan, Budha,

³²⁵ Kominfo, "Wujudkan Kesejahteraan Umat, NU Perlu Maksimalkan Gerakan Kemasyarakatan", *Kominfo.go.id*, dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/32981/wujudkan-kesejahteraan-umat-nu-perlu-maksimalkan-gerakan-kemasyarakatan/0/berita>, diakses 8 Desember 2022.

³²⁶ Lihat lebih lanjut Arskal Salim, "'Shari a from below' in ACEH (1930s–1960s): Islamic identity and the right to self-determination with comparative reference to the Moro Islamic Liberation Front (MILF)." *Indonesia and the Malay World* 32.92 (2004): 80-99; Arskal Salim, "Dynamic legal pluralism in Indonesia: Contested legal orders in contemporary Aceh." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 42.61 (2010): 1-29; Arskal Salim, *Contemporary Islamic law in Indonesia: Sharia and legal pluralism* (Edinburgh University Press, 2015).

Hindu, dan Konghucu. Kelompok yang tidak dikenal dapat mendaftar ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai organisasi sosial. Meskipun kelompok-kelompok ini memiliki hak untuk mendirikan rumah ibadah, memperoleh KTP, dan mencatatkan perkawinan dan kelahiran, terkadang mereka menghadapi kesulitan administratif untuk melakukannya. Dalam beberapa kasus, tantangan ini mempersulit individu untuk mencari pekerjaan atau menyekolahkan anak. Secara hukum, aplikasi kartu identitas sekarang dapat diterima ketika bagian “agama” dibiarkan kosong; namun, anggota dari beberapa kelompok melaporkan bahwa mereka terkadang menghadapi kendala.

Larangan selama tiga dekade atas kebebasan berorganisasi dicabut dari Keyakinan Bahá’í³²⁷ pada tahun 2000, tetapi penganut Bahá’í tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan penjangkauan dan harus mengatur pertemuan mereka hanya dalam komunitas Bahá’í. Bahá’í ditoleransi, tetapi dipahami bahwa itu mungkin tidak berkembang. Kegiatan seperti transmisi dari pintu ke pintu, acara terbuka untuk non-Bahá’í dan penyebaran brosur dilarang. Situs tersebut telah berulang kali dimatikan, dan pusat Bahá’í di Jakarta ditinggalkan selama sebagian besar tahun 2013 dan 2014.³²⁸

³²⁷ Lihat Peter Smith, *An introduction to the Baha’i faith* (Cambridge University Press, 2008).

³²⁸ Selengkapnya di Hendri F. Isnaeni, “Riwayat Baha’i di Indonesia”, *Historia.id*, dalam <https://historia.id/agama/articles/riwayat-baha-i-di-indonesia-DbdqP>, diakses 8 Desember 2022; lihat juga CRCS UGM, “Baha’i dan Perjuangan Hak-Hak Sipil di Indonesia”, *CRCS UGM*, dalam <https://crccs.ugm.ac.id/bahai-dan-perjuangan-hak-hak-sipil-di-indonesia/>, diakses 8 Desember 2022.

Dalam konteks yang lebih luas, kebebasan beragama berangsur-angsur harus ternodai dengan sejumlah ulah oknum, misalnya, kesepakatan akan larangan pendirian Gereja di Cilegon. Sulitnya pendirian gereja di Cilegon baru-baru ini menunjukkan aparaturnya negara yang seharusnya mengayomi, justru sebaliknya.³²⁹ Lebih spesifik dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan Islam di daerah Muslim minoritas, tentu juga tidak luput diterpa berbagai permasalahan. Misalnya, fasilitas ibadah seperti masjid di sekolah kurang belum ada, ketika pelaksanaan shalat Jumat, siswa muslim terkadang tidak diberi ruang atau kesempatan dikarenakan proses belajar mengajar (PBM) masih berlangsung. Bahkan ruang kelas khusus bagi siswa untuk mata pelajaran Pendidikan Islam juga tidak tersedia. Selain itu, problem berikutnya adalah kurangnya guru PAI di beberapa sekolah, bahkan didapati guru PAI bukanlah muslim.³³⁰

Selain itu, para guru PAI di daerah minoritas Muslim itu sendiri juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang menjerat mereka. Wahib, misalnya, meriset tentang pergulatan Pendidikan Islam yang ada di Bali bahwa ditemukan sekurangnya tiga; masih didapati ketidakleluasaan guru PAI dalam menyelenggarakan pembelajaran di sekolah misalnya di kelas tidak mendapatkan meja kerja sendiri, tidak pernah mendapatkan posisi struktural yang berarti, dilibatkan sebagai

³²⁹ Lihat Wawan Wahyudin, "Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja di Cilegon", kemenag.go.id, dalam <https://www.kemenag.go.id/read/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-doyyq>, diakses 12 Oktober 2022; lihat juga Masdar Hilmy, "Kebebasan Agama yang terluka", Opini Kompas, 4 Oktober 2022.

³³⁰ Rusmayani, Rusmayani. "The Potrait of PAI and Budi Pekerti's Learning in Public School on Earth Minorty." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*. Vol. 3. No. 1. 2019.

panitia hanya sekedar untuk peran-peran kecil; input siswa yang berkualitas rendah dan situasi lingkungan yang kurang mendukung seperti tidak memadai tempat belajar bagi siswa muslim, mengajar di luar jam efektif, proses belajar mengajar mata pelajaran PAI yang bersamaan dengan latihan kesenian yang menggunakan musik dengan suara keras, dan lain-lain. Selain itu, guru PAI di Bali masih dihantui dengan realitas sosial yang sedikit banyak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan di sekolah, lingkungan masyarakat dan tokoh adat Bali setempat, dan sebagainya.³³¹

Problematika tersebut sedikit banyak disumbang, menurut Azyumardi Azra, dengan adanya kebijakan pemberlakuan otonomi atau desentralisasi pendidikan.³³² Kebijakan ini berdampak serius terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam, termasuk madrasah dan pondok pesantren. Dalam amatan Azra, kebijakan ini tidak melibatkan lembaga pendidikan Islam sehingga berlaku prinsip *top-down* yang tidak mengakomodasi kebutuhan masyarakat.³³³ Pada saat yang bersamaan, lembaga pendidikan Islam atau yang menyelenggarakan pendidikan Islam harus mengikuti perubahan sistem pendidikan akibat kebijakan tersebut. Tentu saja, Muslim sebagai minoritas di Bali dan beberapa wilayah Indonesia yang lain kondisi tersebut sangat tidak menguntungkan. Terlebih, Bali merupakan basis

³³¹ A Wahib, "Pergulatan Pendidikan Islam di Kawasan Minoritas Muslim", *Walisono*, 19(2) 2011.

³³² Lihat Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokrasi* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2002).

³³³ Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Prenada Media, 2019.

masyarakat Hindu sehingga perhatian akan masyarakat Muslim cenderung kurang.

Dalam tataran tertentu, kebijakan yang mereka buat secara tidak langsung mendiskriminasi terhadap pendidikan Islam. Kebijakan – kebijakan tersebut semakin diskriminatif manakala Pemerintah daerah yang masih salah tafsir dalam memahami peraturan Mendagri yang sebetulnya tidak melarang Pemerintah daerah memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam (madrasah). Di lain itu, Kementerian Agama selaku instansi pemerintah yang membawahi madrasah itu sendiri juga tidak memiliki penganggaran memadai bagi penyelenggaraan madrasah, sehingga sulit melakukan realisasi anggaran berdasarkan asas keadilan dan pemerataan, serta terjadi perlakuan yang berbeda antara madrasah negeri dan swasta, antara madrasah perkotaan dan madrasah pedesaan, dan antara madrasah di daerah mayoritas Muslim dan madrasah di daerah minoritas Muslim.³³⁴

Di samping permasalahan diskriminasi, masalah besar lain yang dihadapi madrasah pasca diberlakukannya otonomi daerah yaitu peran atau partisipasi masyarakat (*civil society*) dan ormas keagamaan. Bagi masyarakat mayoritas non-muslim, Pendidikan Islam tidak hanya dijadikan sebagai bukan kebutuhan mereka, tetapi juga dipandang membahayakan keyakinan mereka sehingga harus di jauhi dan dihindari, khususnya bagi mereka yang masih berpegang teguh pada

³³⁴ U Hidayati. 2015. Penyelenggaraan Madrasah Di Daerah Minoritas Muslim. Edukasi, 13(2).

keyakinan agama mereka. Hal ini berimbas dari sisi input siswa, lembaga pendidikan Islam akan sangat sulit memperoleh siswa dari kalangan non-Muslim.³³⁵

Bagi sekolah-sekolah negeri yang berada di daerah marginal khususnya di daerah minoritas muslim, tentu memiliki permasalahan yang jauh lebih kompleks dan rumit, tidak hanya terbatas pada kondisi fisik, tetapi juga kondisi non fisik seperti rendahnya daya dukung masyarakat dan pemerintah. Diberlakukannya peraturan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan yang sangat besar dalam mengatur anggaran termasuk mengatur anggaran pendidikan. Menurut Azyumardi Azra, pemberlakuan otonomisasi/desentralisasi pendidikan telah menimbulkan implikasi mendasar bagi pendidikan Islam (termasuk madrasah), karena desentralisasi pendidikan tidak melibatkan lembaga-lembaga pendidikan Islam termasuk madrasah, namun ia harus mengikuti perubahan tersebut.³³⁶ Kebijakan yang deskriminatif ini semakin menguat, tatkala Pemerintah Daerah masih salah tafsir dalam memahami peraturan Mendagri yang sebenarnya tidak melarang Pemda memberikan bantuan pada madrasah.³³⁷

³³⁵ B Arifin. 2019. Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam di Daerah Minoritas Muslim dan Kawasan Elite. *Falasifa*, 10(2).

³³⁶ Azyumardi Azra. 2002. Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Rekonstruksi dan Demokratisasi), Kompas, Jakarta. h. 3; Hidayati, Umul. "Penyelenggaraan Madrasah di Daerah Minoritas Muslim." *Edukasi* 13.2 (2015): 271-272.

³³⁷ Surat Keputusan Mendagri Nomor 903/2429/ SJ Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD, yang ditafsirkan SK tersebut tidak memperkenankan pengalokasian anggaran untuk membantu institusi vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Padahal tahun berikutnya Mendagri telah merubah kebijakannya dengan memperbolehkan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran APBD-nya untuk kegiatan pendidikan keagamaan (madrasah), yang penyalurannya dilakukan melalui Dinas Pendidikan setempat yang dituangkan dalam Rancana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Perangkat Kerja Daerah. Lihat

Problematika yang tak kalah mendasar adalah pihak kementerian agama terkesan cukup lamban dalam realisasi anggaran pendidikan Islam. Dalam hal ini Komisi VIII DPR RI mengkritisi pemangkasan anggaran Pendidikan Islam yang semula 46.9 triliun menjadi 45.5 triliun atau mengalami efisiensi sebesar 1.389 triliun atau 2.96 % dari total anggaran Program Pendidikan Islam tahun 2017.³³⁸Selain itu, Kemenag terkesan cukup lamban dalam menyalurkan pencarian TPG (tunjangan profesi guru). Hal ini terbukti dari sinkronisasi data yang belum beres dan selalu menjadi kendala. Mestinya kemenag sudah mengantongi berapa jumlah guru di bawah naungannya baik yang sudah bersertifikasi maupun belum.

Persoalan ini terkonfirmasi oleh Zain, Direktur GTK Madrasah, bahwa salah satu lambannya realisasi anggaran ini dikarenakan proses verifikasi berbasis data pada SIMPATIKA (Sistem Informasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) Kemenag masih kurang *up to date*. Oleh karena itu, Zain menekankan pentingnya pembaharuan (*updating*) data guru PAI maupun guru Agama di seluruh Indonesia di SIMPATIKA, sekaligus sebagai upaya mitigasi atas pencairan TPG (Tunjangan Profesi Guru) yang dinilai lamban, agar tidak terulang kembali.

Namun, perkembangan saat ini, Yaqut C. Qoumas, Menteri Agama RI bersama Komisi VIII DPR RI telah

Hidayati, Umul. "Penyelenggaraan Madrasah di Daerah Minoritas Muslim." *Edukasi* 13.2 (2015): 271.

³³⁸ DPR RI, "Jangan Ada Pemotongan Anggaran Pendidikan Islam", *DPR RI, dalam* <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/16925/t/Jangan+Ada+Pemotongan+Anggaran+Pendidikan+Agama+Islam>, diakses 9 Desember 2022.

menyepakati peningkatan RAPBN Kementerian Agama pada tahun 2023 mendatang. Berdasarkan pagu indikatif, anggaran Kementerian Agama mengalami peningkatan sebesar Rp69.010.639.547.000. Besaran pagu indikatif ini mengalami peningkatan sebesar Rp2.234.987.330.000 atau bertambah 3,82%, bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran tahun 2022, yaitu sebesar Rp66.453.208.486.000.³³⁹ Artinya, peningkatan anggaran ini harus disambut dengan baik, yang sudah barang tentu diperlukan pengawalan bersama agar kesejahteraan para guru PAI di wilayah minoritas dapat terjaga secara berkala.

Hal-hal semacam inilah yang menjadi problematika layanan Pendidikan Islam di wilayah minoritas muslim, layaknya Denpasar Bali sebagai lokus riset kami. Di lapangan, justru hal ini sangat berpotensi menggerus spirit guru PAI dan peserta didik muslim minoritas di Denpasar Bali. Oleh karenanya, tidak heran jika terkadang ada siswa yang apatis terhadap pelajaran PAI, begitupun dengan gurunya yang terpaksa “nyabang” ke beberapa sekolah lain karena kebijakan sekolah dan terbatasnya anggaran dari pemerintah untuk subsidi mereka, terutama bagi guru swasta.

Problem selanjutnya ialah terkait pembiasaan. Pembiasaan disini dapat berupa kebutuhan, juga dapat berupa hal yang bersangkutan dengan kewajiban agama. Sebagaimana contohnya ialah *sajalat*, menutup aurat, doa pagi, dsb.

³³⁹ Kementerian Agama RI, “Kemenag dan DPR Bahas Pendalaman Pagu Indikatif 2023 “, *Kemenag.go.id*, dalam <https://kemenag.go.id/read/kemenag-dan-dpr-bahas-pendalaman-pagu-indikatif-2023-01xar>, diakses 9 Desember 2022.

Dalam konteks pendidikan Islam di Bali, beberapa pelayanan tersebut juga menjadi perhatian serius. Beberapa pengakuan peserta didik secara tidak langsung mengalami pengalaman religius dan menyentuh pada kondisi jiwa nya. Yaitu doa pagi di sekolah yang diisi oleh puja *Tri Sandya*³⁴⁰. Beberapa peserta didik muslim mengaku sampai pada tingkatan hafal³⁴¹ dari mantra *Tri Sandya*. Namun ketika ditanya mengenai terkait keyakinannya, apakah mereka pernah terbesit tentang pengaruh kepercayaannya atau tidak, mereka menjawab tidak, dan beberapa diam. Makna diam tersebut masih belum dilakukan konfirmasi ulang mengenai jawabannya.

Kondisi tersebut apabila dikaitkan dengan teori konstruksi sosial, secara eksternalisasi, mereka menyesuaikan ritual adat dari kelompok mayoritas. Sehingga memiliki sisi positif dan negatif. Melihat sisi positif, nilai toleransi dapat dimunculkan didalamnya. Meskipun sebenarnya, mengantisipasi beberapa efek negatif membutuhkan durasi waktu yang cukup padat bagi guru PAI. Misalnya, mereka mendampingi secara khusus hanya untuk doa pagi. Hal tersebut sangat mustahil, karena juga kebutuhan SDM.

Larangan secara adat oleh pimpinan atau manajemen sekolah di salah satu SMA Negeri Denpasar (SMA Negeri 4

³⁴⁰ Alaika M. Bagus Kurnia PS, "Observasi Penelitian Di SMA/ SMK Negeri Denpasar, Bali" (Penelitian Disertasi, February 2022). Mantra puja *tri sandya* ialah ritual doa yang dimiliki oleh umat Hindu dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat di Meghan Hynson, "A Balinese 'Call to Prayer': Sounding Religious Nationalism and Local Identity in the Puja Tri Sandhya," *Religions* 12, no. 8 (2021): 668.

³⁴¹ "Wawancara Dengan Peserta Didik SMKN 1 Denpasar Pkl. 09.30 WITA Di Halaman Utama Sekolah."

Denpasar) untuk membangun tempat ibadah di dalam lingkungannya, kecuali pura.

Larangan memakai jilbab bagi peserta didik muslim. Namun tidak secara sistematis secara terbuka oleh sekolah, atau hingga ranah aturan pemerintah provinsi. Melainkan secara personal. Misalnya, para guru yang beragama Hindu. Ketika dikonfirmasi, mereka memeluk keyakinan Hindu sekte Hendra Krisna atau Kama Sutra.

BAB 7

MODEL LAYANAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SISWA MUSLIM MINORITAS DI DENPASAR BALI

Peningkatkan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan agama sangat tergantung kepada kualitas layanan pendidikan. Hal ini berarti kualitas layanan dapat dijadikan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat umumnya dan peserta didik khususnya. Kualitas layanan pendidikan berpusat pada upaya pemenuhan keinginan dan kebutuhan peserta didik serta ketepatan penyampainnya. Karena itu, kualitas layanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pemakai.³⁴²

Kualitas layanan pendidikan diketahui dengan cara membandingkan harapan/kepentingan pelanggan atas layanan yang ideal dengan layanan yang benar-benar mereka terima.³⁴³

³⁴² Muin, Abdul. "Layanan Pendidikan Agama Di Sma (Slua) Saraswati 1 Denpasar." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2015): 425-426.

³⁴³ Tjiptono F. dan Diana A., *Total Quality Management*. Yogyakarta: Andi Offset, 2003, 57; Muin, Abdul. "Layanan Pendidikan Agama Di Sma (Slua) Saraswati 1 Denpasar." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2015): 425-426.

Menurut Feigenbaum, kualitas layanan merupakan kekuatan penting yang dapat membuahkan keberhasilan baik di dalam organisasi maupun pada pertumbuhan lembaga pendidikan, juga bisa diterapkan di dalam penyelenggaraan layanan kualitas pendidikan.³⁴⁴ Sehubungan dengan itu, jika layanan yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas layanan dipersepsikan “baik dan memuaskan”. Jika layanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas layanan dipersepsikan sebagai “kualitas ideal”. Sebaliknya, jika layanan yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas layanan dipersepsikan “tidak memuaskan”.³⁴⁵

Uraian di atas, jika dikaitkan dengan fokus masalah penelitian ini, maka layanan yang kami maksud adalah meliputi semua aspek seperti dari aspek kurikulum PAI dan kebijakan pendidikan agama, sarana prasarana, peran stakeholders terkait (kepala sekolah, kepala dinas, dan sebagainya), guru, peserta didik, dan peran wali siswa/ orang tua yang di mana ikut berperan aktif dalam memberikan layanan pendidikan PAI yang memadai bagi siswa. Juga, menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik.

³⁴⁴ Feigenbaum, A., V. 1996. *Total Quality Control*. New York: McGraw-Hill Book, 103; Muin, Abdul. "Layanan Pendidikan Agama Di Sma (Slua) Saraswati 1 Denpasar." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2015): 425-426.

³⁴⁵ Edward Sallis, *Total Quality Mnagement in Education, Manajemen Mutu Pendidikan*. Alih Bahasa Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi. Yogyakarta: IRCiSoD, 2006, 86; Muin, Abdul. "Layanan Pendidikan Agama Di Sma (Slua) Saraswati 1 Denpasar." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2015): 425-426.

Selanjutnya, Zeithaml (1993) membedakan antara tiga jenis harapan layanan: layanan yang diinginkan (*desired service*), layanan yang cukup (*sufficient service*) dan layanan yang diprediksi (*predicted service*).³⁴⁶ Selain itu, kami menambahkan dua layanan yaitu layanan prima dan layanan mandiri.

1. *Desired Service* (Layanan yang Diinginkan)

Menurut Zeithaml dan Bitner, *Desired Service* merupakan suatu ekspektasi konsumen dimana konsumen ingin mendapatkan pelayanan yang mempunyai kualitas tinggi dan sesuai atau lebih baik dengan apa yang diharapkan pada awalnya.³⁴⁷ Sedangkan menurut Loveock et al, *Desired Service* (layanan yang diinginkan), merupakan layanan yang diharapkan untuk diterima oleh pelanggan. Dalam hal ini adalah suatu tingkat, harapan, atau suatu kombinasi akan apa yang pelanggan anggap dan harus dihantarkan dalam konteks kebutuhan pribadinya.³⁴⁸ Dengan demikian, *desired service* merupakan tingkat harapan pelanggan terkait pelayanan yang diinginkan, yaitu kepercayaan pelanggan tentang pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang seharusnya diterima.

Di antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *desired service* adalah (1) faktor penguat pemilihan jasa (*enduring*

³⁴⁶ Zeithaml, Valarie A., Leonard L. Berry, and Arantharanthan Parasuraman. "The nature and determinants of customer expectations of service." *Journal of the academy of Marketing Science* 21.1 (1993): 1-12.

³⁴⁷ Mary Jo Bitner, Valarie A Zeithaml, *Services Marketing*, Edisi 1, (Boston: McGraw-Hill, 1996), 77.

³⁴⁸ Christopher Loveock, Jochen Wirtz dan Jacky Mussry, *Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 50.

service intensifiers) yaitu faktor-faktor individu atau kelompok yang mempengaruhi harapan konsumen secara stabil dalam meningkatkan sensitivitasnya terhadap jasa. Misalnya ekspektasi dasar terhadap jasa (*desired service expectation*), yang dapat terjadi bila ekspektasi konsumen dikendalikan oleh orang lain atau sekelompok orang. Faktor penguat lain adalah personal service philosophy, yaitu sikap dasar dari konsumen tentang arti jasa dan sikap yang pantas dari penyedia jasa. Dan (2) keinginan pribadi (*personal needs*), yaitu faktor yang sangat penting untuk membentuk tingkat *desired service*. Keinginan pribadi dapat masuk pada banyak kategori termasuk fisik, sosial, dan psikologi.

Menurut Rangkuti, indikator yang dapat diperhatikan dalam menentukan tingkat harapan yang diinginkan sebagai berikut:³⁴⁹ 1. Keinginan untuk dilayani dengan baik dan benar Pelanggan berharap dilayani dengan baik dan benar karena ia melihat pelanggan lainnya dilayani dengan baik serta dilayani dengan benar, dimana pelayanan yang benar tergantung dari falsafah individu yang bersangkutan. 2. Kebutuhan Perorangan Pelayanan yang diharapkan pelanggan karena kebutuhan pelayanan tersebut bersifat mendasar dan terkait dengan kesejahteraan pelanggan. 3. Janji secara langsung Pelayanan yang diharapkan pelanggan karena pelanggan dijanjikan mendapatkan pelayanan seperti itu secara langsung oleh pemberi/organisasi pemberi pelayanan. 4. Janji secara tidak

³⁴⁹ Rangkuti, Freddy. *Measuring Customer Satisfaction Teknik Mengukur Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan, serta Analisis PLN JP*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018, 36.

langsung Pelayanan yang diharapkan pelanggan karena pelanggan memperoleh petunjuk yang berkaitan dengan pelayanan tersebut sehingga pelanggan menarik kesimpulan tentang pelayanan seperti apa yang seharusnya diberikan. Petunjuk tersebut meliputi harga serta peralatan pendukung pelayanan. 5. Komunikasi dari mulut ke mulut Pelayanan yang diharapkan pelanggan karena pelanggan menerima informasi atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak (bukan organisasi penyedia jasa), misalnya individu, orang ahli, laporan pelanggan, serta publisitas. 6. Pengalaman masa lalu Pelayanan yang diharapkan pelanggan karena pelanggan telah memiliki pengalaman yang meliputi hal-hal yang telah dipelajarinya atau diketahui.

Dalam konteks penelitian ini, merujuk pada persepsi dan ekspektasi peserta didik, guru dan orang tua di Bali, mereka menginginkan layanan Pendidikan Islam yang memadai tanpa memandang sekat-sekat ras. Selain itu, mereka ingin pembelajaran agama Islam (PAI) bisa dilangsungkan secara normal layaknya pembelajaran agama Hindu, baik dalam hal pembelajaran maupun pembiasaan. Tentu hal tersebut merupakan hal yang wajar. Namun, harus diakui fakta yang terjadi berkata lain. Indonesia dengan keragaman suku, *bahasa*, agama dan budaya di dalam proses akulturasi dan asimilasi tidak bisa meninggalkan etnisitas sehingga proses perumusan kebijakan beserta eksekusinya tidak lepas dari persoalan ini, termasuk layanan Pendidikan Islam di Bali yang notabene adalah minoritas.

Hal tersebut jauh berbeda dengan penyesuaian dan strategi bertahan bagi lingkungan guru PAI dan siswa muslim di daerah yang menjadi wilayah minoritas secara kuantitas. Sebagaimana di Denpasar, Bali contohnya. Ketika kita membicarakan sekolah Islam di Bali, maka tidak ada perbedaan yang signifikan secara internal kelembagaan dalam melaksanakan pembelajaran hingga program keagamaan. Hal tersebut berbeda dengan sekolah umum negeri yang terdapat ketimpangan cukup jauh.

Keempat lokus sekolah yang peneliti teliti (SMKN 1 Denpasar, SMAN 7 Denpasar, SMKN 2 Denpasar, SMAN 2 Denpasar) terdapat beberapa kesamaan. SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 2, dalam hal ini, memiliki kesamaan. Guru difasilitasi dan diberikan tempat yang memadai untuk mengajar di kelas dan dilaksanakan pada jam efektif mengingat jumlah ruang kelasnya banyak. Juga tempat ibadahnya seperti musholla juga didapati dalam kondisi ada dan layak, meskipun mengecil di dalamnya. Sedangkan tempat belajarnya sebagaimana di SMK Negeri 1 Denpasar, yaitu di satu kelas besar dan dilaksanakan di luar jam efektif.

Di lain sisi, terkait pelaksanaan pembelajaran, terdapat sekolah yang tetap melaksanakan kegiatan PBM dengan menempatkan jam mata pelajaran PAI didalam jam efektif. Moh. Zaini selaku guru PAI di lingkungan SMKN 2 Denpasar menambahkan, bahwasanya ia mengajar jam mata pelajaran PAI pada jam efektif dikarenakan kondisi sekolah tersebut masih tersedia kelas kosong untuk ditempati sebagai perpindahan kelas PAI (*moving class system*). Namun ada juga yang melaksanakan kelas pembelajaran PAI di luar jam efektif sekolah sebagaimana

yang dilakukan Margiyanto di SMA Negeri 7 Denpasar, dan Nur Kholis yang juga mengampu di SMA Negeri 4 Denpasar³⁵⁰.

2. *Sufficient Service* (Layanan yang Memadai)

Sufficient Service adalah tingkat kerja minimal yang masih dapat diterima berdasarkan perkiraan jasa yang mungkin akan diterima dan tergantung pada alternatif yang tersedia.³⁵¹ Sedangkan Loveock et al mengemukakan *Adequate Service* atau *Sufficient service* (layanan yang memadai) merupakan suatu kesadaran seorang pelanggan bahwa suatu perusahaan tidak selalu bisa menghantarkan layanan sesuai dengan harapan yang mereka inginkan.³⁵² Jadi, *Adequate Service* adalah suatu tingkatan ketika pelanggan menerima pelayanan sesuai dengan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi permintaan pelayanan dari pelanggan tersebut.

Dalam hal ini, klien memiliki tingkat layanan yang diinginkan yang mereka harapkan untuk diterima dan yang terdiri dari apa yang mungkin dan apa yang harus dipenuhi. Mereka juga memiliki tingkat layanan yang dapat diterima setelah mereka mengakui bahwa suatu layanan tidak selalu dapat mencapai tingkat yang diinginkan, yaitu layanan yang memadai (*sufficient service*). Di antara dua tingkat layanan ini ada zona

³⁵⁰ Margiyanto, "Wawancara Dengan Margiyanto Selaku Guru SMKN 1 Denpasar Dan SMAN 7 Denpasar." Hal tersebut juga terjadi pada Kholis, "Wawancara Dengan Nurkholis Sebagai Guru PAI Di SMA Negeri 4 Denpasar."

³⁵¹ Rangkuti, Freddy. *Measuring Customer Satisfaction Teknik Mengukur Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan, serta Analisis PLN JP*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018, 35.

³⁵² Christopher Loveock, Jochen Wirtz dan Jacky Mussry, *Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 50.

toleransi yang bersedia diterima oleh klien. Dan akhirnya klien memiliki tingkat layanan yang diprediksi (*a predicted service level*), yang mewakili tingkat layanan yang akan dipenuhi oleh perusahaan.³⁵³

Selain itu, Zeithaml juga menunjukkan fakta bahwa layanan yang diinginkan lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada situasi khusus layanan daripada jenis harapan lainnya.³⁵⁴ Hill (1995) percaya bahwa harapan umum peserta didik dan harapan mereka tentang layanan pendidikan Islam seperti kualitas pembelajaran, metode pengajaran dan khususnya RPP mata pelajaran PAI cukup stabil dalam waktu.³⁵⁵ Telford & Masson (2005) telah menunjukkan fakta bahwa persepsi kualitas layanan pendidikan tergantung pada harapan dan persepsi peserta didik.³⁵⁶ Voss, et.al (2007), misalnya, menunjukkan lebih banyak tahapan yang menunjukkan dampak positif harapan dan nilai pada variabel seperti: partisipasi siswa (*students' participation*), kejelasan peran (*the clarity of role*) dan motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam kursus (*their motivation to participate in courses*).³⁵⁷

³⁵³ Munthiu, Maria-Cristiana, et al. "Characteristics of educational services in the virtual environment." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 109 (2014): 1237-1241.

³⁵⁴ Zeithaml, Valarie A., Leonard L. Berry, and Arantharanthan Parasuraman. "The nature and determinants of customer expectations of service." *Journal of the academy of Marketing Science* 21.1 (1993): 1-12.

³⁵⁵ Hill, Frances M. "Managing service quality in higher education: the role of the student as primary consumer." *Quality assurance in education*, 3.3 (1995): 10-21.

³⁵⁶ Telford, Ronnie, and Ron Masson. "The congruence of quality values in higher education." *Quality assurance in education*, 13.2 (2005): 107-119.

³⁵⁷ Voss, Roediger, Thorsten Gruber, and Isabelle Szmigin. "Service quality in higher education: The role of student expectations." *Journal of Business Research* 60.9 (2007): 949-959.

Cetin et al. (2009) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi harapan klien adalah: komunikasi verbal (verbal communications), urgensi pribadi (personal exigencies), pengalaman masa lalu (past experience) dan pengaruh eksternal (external influences).³⁵⁸ Faktanya, melebihi harapan pelanggan adalah elemen kejutan dan kesempatan terbaik untuk mengejutkan pelanggan adalah selama proses penyampaian layanan, ketika penyedia layanan bertemu dengan pelanggan, dalam kasus kami, selama proses pendidikan offline dan online. Foroughi Abari dkk. (2011) percaya bahwa spesialis yang secara khusus meneliti cara untuk mengevaluasi kualitas layanan sangat tertarik dengan kenyataan bahwa harapan klien telah terpenuhi, tetapi korespondensi antara layanan yang ditawarkan (*offered services*) dan harapan klien hanya dianggap sebagai kriteria.³⁵⁹

Dari beberapa sekolah yang peneliti teliti (SMKN 1 Denpasar, SMAN 7 Denpasar, SMKN 2 Denpasar, SMAN 2 Denpasar) terdapat beberapa kesamaan. SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 2, dalam hal ini, memiliki kesamaan. Guru difasilitasi dan diberikan tempat yang memadai untuk mengajar di kelas dan dilaksanakan pada jam efektif mengingat jumlah ruang kelasnya banyak. Juga tempat ibadahnya seperti musholla juga didapati dalam kondisi ada dan layak, meskipun mengecil di dalamnya. Sedangkan tempat belajarnya sebagaimana di

³⁵⁸ Iuliana Cetina, *Marketingul serviciilor. Fundamente și domenii de specializare*. București: Editura Uranus, 2009.

³⁵⁹ Abari, Ahmad Ali Foroughi, Mohammad Hossein Yarmohammadian, and Mina Esteki. "Assessment of quality of education a non-governmental university via SERVQUAL model." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 15 (2011): 2299-2304.

SMK Negeri 1 Denpasar, yaitu di satu kelas besar dan dilaksanakan di luar jam efektif.

Di lain sisi, terkait pelaksanaan pembelajaran, terdapat sekolah yang tetap melaksanakan kegiatan PBM dengan menempatkan jam mata pelajaran PAI didalam jam efektif. Moh. Zaini selaku guru PAI di lingkungan SMKN 2 Denpasar menambahkan, bahwasanya ia mengajar jam mata pelajaran PAI pada jam efektif dikarenakan kondisi sekolah tersebut masih tersedia kelas kosong untuk ditempati sebagai perpindahan kelas PAI (*moving class system*). Namun ada juga yang melaksanakan kelas pembelajaran PAI di luar jam efektif sekolah sebagaimana yang dilakukan Margiyanto di SMA Negeri 7 Denpasar, dan Nur Kholis yang juga mengampu di SMA Negeri 4 Denpasar³⁶⁰.

Dalam konteks ini, jika ditinjau lebih mendalam, sebetulnya para siswa, guru dan orang tua dari siswa tidak menuntut sesuatu yang lebih dalam pengajaran. Makna lebih di sini adalah secara sempurna tanpa ada kekurangan sedikitpun dalam kualitas layanan Pendidikan Islam yang diberikan. Namun, dalam amatan penulis, mereka menyadari bahwa mereka memang termasuk minoritas muslim sehingga yang penting anak mereka mendapatkan layanan Pendidikan Islam yang memadai. Hal ini dibuktikan oleh sebagian orang tua siswa yang berinisiatif menyisihkan uang untuk menggaji guru PAI untuk mengajarkan anak mereka mengingat anggaran sekolah tidak cukup untuk meng-*cover* gaji guru tersebut. Hal ini

³⁶⁰ Margiyanto, "Wawancara Dengan Margiyanto Selaku Guru SMKN 1 Denpasar Dan SMAN 7 Denpasar." Hal tersebut juga terjadi pada Kholis, "Wawancara Dengan Nurkholis Sebagai Guru PAI Di SMA Negeri 4 Denpasar."

menandakan, sejatinya orang tua siswa beragama Islam di Bali peduli terhadap pendidikan agama, meskipun kenyataan lain ada juga orang tua yang apatis.

Namun demikian, poin penting kami adalah bahwa orang tua siswa muslim menaruh kepedulian terhadap layanan Pendidikan Islam yang memang sangat kurang memadai. Dalam hal ini, pendidikan agama tetap menempati peran sentral kehidupan manusia, tidak terkecuali di wilayah minoritas muslim di Bali.

3. *Predicted Service* (Layanan yang Diprediksi)

Predicted service adalah layanan yang benar-benar diantisipasi pelanggan untuk diterima dikenal sebagai layanan yang diprediksi. Jika layanan yang baik diprediksi, tingkat yang memadai akan lebih tinggi daripada jika layanan yang lebih buruk diprediksi. Harapan pelanggan atas layanan mungkin spesifik situasi. Jika dikontekstualisasikan dalam penelitian ini, maka *predicted service* lebih kepada prediksi peserta didik, guru, dan orang tua siswa perihal pelayanan pendidikan Islam di sekolah umum negeri. Prediksi tersebut dapat bernilai positif atau negatif tergantung bagaimana seluruh komponen sekolah bekerja keras dalam hal memberikan pelayanan terbaiknya (*quality service*).

Sebagai perwujudan *predicted service* pelayanan pembelajaran PAI, perlu kiranya guru meminta pendapat atau melakukan sharing kepada orang tua wali murid. Namun perlu dilihat bagaimana intensitas komunikasinya dengan orang tua

wali murid, 46,4 % guru tidak pernah sama sekali komunikasi dengan wali murid, dan 21,4 % guru jarang melakukannya. Hal tersebut menunjukkan kesenjangan komunikasi antar kedua arah antara pelayan dan *customer*. Dan sisanya 32,1% guru sudah melaksanakannya. Hal ini perlu menjadi perhatian dan evaluasi tersendiri, agar guru PAI mampu melakukan pendekatan dengan keluarga peserta didik.

Dari data di atas, bahwa dalam proses belajar-mengajar yang dilakukan oleh SMAN 2, SMAN 7, SMKN 1, SMKN 2 Denpasar melalui kegiatan intrakurikuler umumnya menggunakan metode pembelajaran: ceramah, penugasan, presentasi, diskusi, tanya-jawab dan demonstrasi.³⁶¹ Eksplorasi atas berbagai metode dan strategi pembelajaran berikut layanannya masih minim sehingga pengembangan kreativitas dalam mengolah pembelajaran kurang.

4. *Excellent Service* (Pelayanan Prima)

Pelayanan Prima adalah terjemahan dari *Excellent Service* yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik, atau pelayanan yang terbaik. Pelayanan prima dikembangkan berdasarkan konsep A3, yaitu *Attitude* (sikap), *Attention* (perhatian), dan *Action* (tindakan).³⁶² Pelayanan prima berdasarkan konsep sikap (*attitude*) meliputi tiga prinsip yaitu:

³⁶¹ Hal serupa juga dilakukan di SMA Saraswati 1 Denpasar. Lihat Muin, Abdul. "Layanan Pendidikan Agama Di Sma (Slua) Saraswati 1 Denpasar." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2015): 434-437.

³⁶² Suprpto, Suprpto. "Layanan Pendidikan Islam Bagi Anak-Anak Buruh Migran Indonesia Di Kota Kinabalu Sabah Malaysia." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2017): 423-424.

melayani pelanggan berdasarkan penampilan yang sopan dan serasi, melayani pelanggan dengan berpikiran positif, *what* dan logis dan melayani pelanggan dengan sikap menghargai. Pelayanan prima berdasarkan perhatian (*attention*) meliputi tiga prinsip: mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan, mengamati dan menghargai perilaku para pelanggan dan mencurahkan perhatian penuh kepada para pelanggan.

Pelayanan prima berdasarkan tindakan (*action*) meliputi lima prinsip: mencatat setiap pesanan para pelanggan, mencatat kebutuhan para pelanggan, menegaskan kembali kebutuhan para pelanggan, mewujudkan kebutuhan para pelanggan dan menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan mau kembali. Dalam hal ini, Layanan Pendidikan Islam yang ditawarkan oleh Kementerian Agama RI di bidang program pendidikan Islam tahun 2022 yaitu menetapkan 7 kebijakan prioritas, yakni Penguatan Moderasi Beragama, Transformasi Digital, Tahun Toleransi Beragama, Revitalisasi KUA, Religiosity Index, Kemandirian Pesantren, dan Cyber Islamic University.

Untuk menopang layanan Pendidikan Islam tersebut mutlak diperlukan layanan yang prima sebagai bagian daripada penerjemahan program tersebut. Dalam hal Bali, pelayanan prima ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali wilayah minoritas. Pemerataan ini adalah wujud realisasi dari amanat undang-undang bahwa negara wajib mencerdaskan kehidupan berbangsa melalui pendidikan dan ekonomi.

Pemerataan pendidikan ini yang dimaksud adalah kesempatan bagi anak bangsa untuk dapat mengenyam pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam ruang lingkup masyarakat. Hal tersebut harus diperoleh agar tidak ada perbedaan atau kecemburuan dalam aspek pemerataan pendidikan.

Layanan prima ini, misalnya, ditunjukkan oleh SMAN 7 Denpasar Bali. Hal itu ditunjukkan dengan pemberian apresiasi kepada peserta didik yang meraih prestasi. Dalam teori kontak dan pengaruh minoritas, prestasi tersebut akan menjadi motivasi bagi guru PAI lain yang mengampu di sekolah lain. Sekaligus hal ini menjadi *high bargaining* kepada stakeholders terkait bahwa mereka benar-benar mampu menunjukkan prestasinya di segala keterbatasan yang ada. Kepala sekolah beserta jajarannya yang responsif atas prestasi tersebut, juga dengan memberikan penghargaan dan apresiasi di depan warga sekolah. Hal tersebut merupakan bentuk toleransi yang tinggi dari pendidikan dan nilai-nilai masyarakat Bali yang beragama, yang biasa disebut dengan '*menyame braye*' atau hidup dalam kebersamaan³⁶³. Hal ini juga dikuatkan oleh kepala sekolah, "Bahwasanya kita mendukung segala prestasi yang diraih. Sebagaimana kemarin kita mendapatkan informasi dari guru PAI terkait prestasi yang didapatnya baik pada kancah nasional maupun Internasional."³⁶⁴

Pendidikan di Indonesia sudah diatur dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi

³⁶³ I. Ketut Sunarya, "The Concept of Rwa Bhineda Kriya on the Island of Bali towards Jagadhita.," *Wacana Seni Journal of Arts Discourse* 19 (2020): 47–60.

³⁶⁴ Wiratmaja, "Wawancara Dengan Kepala SMA Negeri 7 Denpasar."

hak warga negara dalam memperoleh pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa. Hak warga negara Indonesia seperti yang tertuang didalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan tentang setiap warga negara berhak menerima pendidikan yang sama. Adanya pasal tersebut dapat mendukung upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan di wilayah wilayah saudara kita yang kurang dalam fasilitas pendidikan. Dengan pemerataan pendidikan yang baik, maka nasib dari suatu negara akan dapat terjamin dikarenakan memiliki kualitas generasi yang cemerlang. Maka negara kita akan dapat maju seperti negara lainnya.

Dengan begitu bangsa ini dapat maju dan berkembang melalui sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk menciptakan SDM yang berkualitas semuanya berawal dari pendidikan yang didapatkan. Semakin baik pendidikan yang didapatkan maka, sudah menjadi jaminan akan kualitas yang dapat diberikan. Dengan begitu dapat meningkatkan kesejahteraan umum warga negara. Pendidikan yang didapatkan dari setiap daerah haruslah sama. Inilah yang menjadi tujuan dari pemerataan pendidikan tidak ada pelosok daerah yang mendapatkan pendidikan berbeda. Atau bahkan yang tidak tersentuh sama sekali oleh sistem pendidikan di daerahnya.

5. Self Service (Layanan Mandiri)

Layanan mandiri adalah layanan yang sebagian besar dikerjakan dan diinisiasi oleh seseorang atau sebagian kelompok dalam hal memenuhi kebutuhannya. Kami melihat, layanan

Pendidikan Islam yang ada dalam lingkup penelitian ini, dan bahkan mayoritas di Bali adalah layanan mandiri. Dalam arti, para guru PAI seakan berjuang sendiri dan bertahan hidup dengan bermodal ilmu yang dimiliki dan keterbatasan kemampuan (baca: biaya) namun, mereka tetap semangat mengajar demi li I'lai kalimatillah (tegaknya agama Allah). Selain itu, kami melihat juga bahwa interaksinya hanya kepada guru dan murid saja, tanpa bantuan anggaran dari sekolah, bahkan waktu pembelajaran pun kepala sekolah dan wakil kepala tidak tahu-menahu. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya referensi keagamaan Islam baik yang tersedia di perpustakaan, hingga beberapa fasilitas kelas sehingga peserta didik hanya mendapatkan pengalaman belajar pembiasaan shalat di ruangan khusus, kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) diluar agenda sekolah, hingga fasilitas wudhu untuk kebutuhan shalat warga sekolah³⁶⁵.

Tidak dapat dipungkiri, karena guru PAI menyiapkan segala sesuatunya secara mandiri. Misalnya, menggabungkan kelas. Karena secara normal sebagaimana kelas belajar untuk keperluan KBM pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, terbatas. Meskipun secara ideal, saat ini pelaksanaan KBM dalam satu kelas maksimal 20 peserta didik. Karena setiap kelas hanya terdapat 4 sampai 5 peserta didik, maka inisiatif digabungkan nya dalam satu kelas, menjadi kelas besar dalam setiap jenjangnya.³⁶⁶ Hal-hal semacam itu akan menjadi

³⁶⁵ Zaini, "Observasi Mata Pelajaran PAI Kelas X Di SMK Negeri 2 Denpasar."

³⁶⁶ Zaini.

penghambat demi terwujudnya layanan yang prima atau memadai. Namun, itulah faktanya. Oleh karena itu, layanan mandiri cukup tepat disematkan kepada guru PAI di SMAN/SMKN Denpasar karena mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran, sarpras dan lain sebagainya dilakukan secara mandiri, meskipun ada beberapa dukungan itupun tidak mengurangi kemandirian di dalam memberikan layanan Pendidikan Islam.

Layanan mandiri ini merujuk pada temuan peneliti ketika mengadakan pertemuan (baca: FGD) dengan sebagian guru SMA/ SMK Negeri di Bali, baik yang berstatus PNS atau Non PNS yang difasilitasi oleh Kepala Seksi Pendidikan Islam Kota Denpasar, yaitu Ninik Surani pukul. 10.00 WITA. Dimulai dari Margiyanto, guru SMKN 1 Denpasar sekaligus SMAN 7 Denpasar menjelaskan beberapa kegiatan keagamaan. Sesungguhnya Sekolah melakukan dukungan secara serius terhadap kegiatan keagamaan, terbukti dari beberapa event yang diadakan di luar, sebagaimana ia menjelaskan,³⁶⁷

”Kami pernah mengirimkan delegasi dari peserta didik, antusiasnya luar biasa ketika sekolah mengetahui mereka mendapatkan prestasi juara. Misalnya juara 2 Olimpiade Halal tingkat Nasional, dan bahkan pernah berprestasi pada olimpiade PAI tingkat Nasional. Ia juga menambahkan, bahwasanya pejabat sekolah bersama pimpinan MUI Provinsi Bali di depan warga sekolah

³⁶⁷ Surani et al., “Focus Group Discussion (FGD) Dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajara) PAI Kota Denpasar Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Ruang Bidang Pendidikan Islam Bersama Kepala Bidang Pendidikan Islam Kota Denpasar.”

memberikan apresiasi yang sangat luar dengan mendokumentasikan penghargaan”.

Prestasi tersebut diraih oleh peserta didik SMA Negeri 7 Denpasar. Menurutnya, prestasi tersebut akan menjadi motivasi bagi guru PAI lain yang mengampu di sekolah lain. Kepala sekolah beserta jajarannya yang responsif atas prestasi tersebut, juga dapat memberikan penghargaan dan apresiasi di depan warga sekolah. Hal tersebut merupakan bentuk toleransi yang tinggi dari pendidikan dan nilai-nilai masyarakat Bali yang beragama, yang biasa disebut dengan ‘*menyame braye*’ atau hidup dalam kebersamaan.³⁶⁸ Hal ini juga dikuatkan oleh kepala sekolah, ”Bahwasanya kita mendukung segala prestasi yang diraih. Sebagaimana kemarin kita mendapatkan informasi dari guru PAI terkait prestasi yang didapatnya baik pada kancah nasional maupun Internasional” .³⁶⁹

Demikian pula, mengenai acara Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang setiap tahunnya ditandai dengan tanggal merah, ada beberapa sekolah yang menjelaskan dengan gamblang mengenai kegiatan PHBI. Margiyanto, misalnya, kembali menjelaskan bagaimana ia mengemas kegiatan PHBI dengan dua model; *pertama*, adalah Hari Besar Islam mingguan, seperti setiap hari Jum’at. Setiap Jum’at, Margiyanto mula-mula mencoba melakukan pendekatan secara parsial, baik dari para peserta didik Muslim, perangkat struktural sekolah, khususnya

³⁶⁸ I. Ketut Sunarya, “The Concept of Rwa Bhineda Kriya on the Island of Bali towards Jagadhita.,” *Wacana Seni Journal of Arts Discourse* 19 (2020): 47–60.

³⁶⁹ Cokorda Gede Anom Wiratmaja, “Wawancara Dengan Kepala SMA Negeri 7 Denpasar” (Ruang Kepala SMA Negeri 7 Denpasar, February 21, 2022).

kepala sekolah, hingga mengajak kepada para guru dan karyawan muslim untuk mengadakan sholat Jum'at di Aula SMAN 7 Denpasar yang ada, sehingga pada akhirnya pada tahun 2018 (sebelum pandemi Covid-19), atas izin kepala sekolah, diadakanlah sholat jumat secara berjamaah. Bukan tanpa alasan kepala sekolah mengizinkan, dikarenakan jumlah warga sekolah yang beragama Islam merupakan yang paling besar kedua setelah agama Hindu. Namun pasca diberlakukannya belajar di rumah karena pandemi covid-19, aktivitas shalat Jum'at belum berlanjut kembali.

Hal ini tentu menjadi problem tersendiri terkait tata tertib atau peraturan sekolah karena menyangkut pertanggungjawaban karakter peserta didik. Sebab tidak sedikit peserta didik yang menyalahgunakan kelonggaran ibadahnya pada saat sholat jum'at. M. Zaini dalam kesempatan ini menuturkan, “Sekolah dengan saya selaku guru agama juga bertanggungjawab untuk melakukan tindakan dan hukuman (*punishment*) bagi mereka yang melanggar ketentuan sekolah, khususnya menyalahgunakan izin sholat Jum'at”. Ia juga menambahkan, ”karena ketika hari Jum'at bentuk kegiatan kami juga selalu mendapatkan jadwal khutbah diluar, otomatis tidak memiliki kuasa untuk melakukan pendampingan dan pengarahan. Maka biasanya kami meminta bantuan dari pengurus Rohis yang ada di sekolah tersebut”.³⁷⁰

³⁷⁰ Kurnia PS, “FGD Dengan Syamsuddin Dan I Nengah Mardana Di Ruang Tata Usaha SMA Negeri Denpasar.”

Kondisi tersebut apabila dikaitkan dengan teori konstruksi sosial, secara eksternalisasi, pelayanan mandiri tidak terlepas dari kondisi siswa muslim sebagai minoritas dan menyesuaikan ritual adat Hindu Bali. Dari hal tersebut, muncul dua sisi, yaitu positif dan negatif. Melihat sisi positif, guru PAI dapat lebih mandiri dalam mengembangkan kreativitasnya karena dihadapkan pada persoalan yang menuntut mereka mau tidak mau harus kreatif. Persoalan yang dimaksud adalah kondisi Bali yang sarat akan nuansa Hindu membuat guru PAI dalam melakukan proses KBM harus lebih adaptif tanpa menimbulkan gesekan yang berarti terhadap sisw/i Hindu Bali.

Adapun sisi negatif lainnya, jika persoalan ini tidak segera ditangani oleh stakeholders terkait, pimpinan sekolah, kepala dinas pendidikan dan agama wilayah Bali, misalnya, bukan tidak mungkin kesulitan yang dialami guru PAI di lapangan dapat menjadi bom waktu karena keluhan mereka yang tidak terakomodir dalam proses KBM. Tentu saja, kasak-kusuk di antara guru PAI menjadi kepelikan yang tak terbantahkan. Solusi yang harus diambil dari para stakeholders terkait adalah merumuskan formula terbaik bagaimana mengemas pembelajaran PAI di tingkat dasar, menengah hingga atas tanpa harus melunturkan nilai-nilai tradisi yang sudah ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul, Hasnan Bachtiar, Ahmad Nur Fuad, and Tongat Tongat. “Minority Muslims and Freedom of Religion: Learning from Australian Muslimsâ€™™ Experiences.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 2 (2019).
- Athalla. “Wawancara Dengan Peserta Didik SMKN 1 Denpasar Pkl. 09.30 WITA Di Halaman Utama Sekolah.” *Sie Kerohanian Islam SMKN 1 Denpasar*, February 18, 2022.
- Attaran, Mohammad. “Moral Education, Habituation, and Divine Assistance in View of Ghazali.” *Journal of Research on Christian Education* 24, no. 1 (2015): 43–51. <https://doi.org/10.1080/10656219.2015.1008083>.
- Bararah, Isnawardatul. “Efektifitas Perencanaan Pembelajaran Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah.” *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (2017): 131–47.

- Berger, Peter L, and Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Penguin Uk, 1991.
- Burhani, Ahmad Najib. *Agama, Kultur (In)Toleransi, Dan Dilema Minoritas Di Indonesia*. LIPI PRESS, 2020. <https://e-service.lipipress.lipi.go.id/press/catalog/book/235>.
- . “Torn between Muhammadiyah and Ahmadiyah in Indonesia: Discussing Erfaan Dahlan’s Religious Affiliation and Self-Exile.” *Indonesia and the Malay World* 48, no. 140 (2020): 60–77.
- . “Treating Minorities with Fatwas: A Study of the Ahmadiyya Community in Indonesia.” *Contemporary Islam* 8, no. 3 (2014): 285–301.
- Burhani, M Najib. *Menemani Minoritas*. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Denpasar Kota, Pusat Data. “Identitas Sekolah SMA/ SMK Di Wilayah Kota Denpasar,” 2021.
- “Developing Islamic Science Based Integrated Teaching Materials for Islamic Religious Education in Islamic High Schools.” *Pegem Journal of Education and Instruction* 11, no. 4 (October 1, 2021): 282–89. <https://doi.org/10.47750/pegegog.11.04.27>.
- Espinosa Cevallos, Ligia Fernanda, and Sandy T. Soto. “EFL Classroom Management.” *MEXTESOL Journal* 44, no. 2 (2020): 1–11.
- Gultom, Fadly Mart. *Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam Di Indonesia*. Deepublish, 2019.

- Hidayat, Tatang, and Abas Asyafah. “Konsep Dasar Evaluasi Dan Implikasinya Dalam Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah.” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2019): 159–81.
- Himatil ‘Ula, Nurul, and Senata Adi Prasetya. “PERFORMATIVE ANALYSIS OF RAJAH SYEKH SUBAKIR IN TAWING VILLAGE, TRENGGALEK PERSPECTIVE OF LIVING QUR’AN.” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 21, no. 2 (July 29, 2020): 313–30. <https://doi.org/10.14421/qh.2020.2102-04>.
- <https://crcs.ugm.ac.id>. “Indonesian Legal Discourse on Minorities: An Interview with Tim Lindsey.” Accessed October 8, 2021. <https://crcs.ugm.ac.id/indonesian-legal-discourse-on-minorities-an-interview-with-tim-lindsey/>.
- Hynson, Meghan. “A Balinese ‘Call to Prayer’: Sounding Religious Nationalism and Local Identity in the Puja Tri Sandhya.” *Religions* 12, no. 8 (2021): 668.
- “Islam Agama Terbesar Kedua Di Bali | Databoks.” Accessed October 23, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/islam-agama-terbesar-kedua-di-bali>.
- Jagra. “Wawancara Dengan Pak Jagra Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Bali.” Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, February 18, 2022.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quranul Karim*, 2020.

Kholis, Nur. “Wawancara Dengan Nurkholis Sebagai Guru PAI Di SMA Negeri 4 Denpasar.” SMA Negeri 4 Denpasar, February 22, 2022.

Kurnia PS, Alaika M. Bagus. “FGD Dengan Syamsuddin Dan I Nengah Mardana Di Ruang Tata Usaha SMA Negeri Denpasar.” Wawancara Penelitian Disertasi 2022, Pebruari 2022.

———. “Focus Group Discussion Bersama Peserta Didik SMA/ SMK Di Denpasar, Bali.” FGD Denpasar, Bali, Mei 2022.

———. “Observasi Di SMA Negeri 2 Denpasar Pkl. 12.00 WITA.” Hasil Observasi Penelitian Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya 2022, Pebruari 2022.

———. “Observasi Penelitian Di SMA/ SMK Negeri Denpasar, Bali.” Penelitian Disertasi, February 2022.

———. “Observasi Penelitian Di SMKN 1 Denpasar.” SMK Negeri 1 Denpasar, February 18, 2022.

———. “Wawancara Data Statistik Guru PAI SMA/ SMK Bersama H. M. Zaini, M. Pd.” Telephone by Whatsapp, February 22, 2022.

———. “Wawancara Dengan Kepala SMK Negeri 1 Denpasar Pkl. 10.00 WITA: I Ketut Suparsa.” Wawancara Penelitian Disertasi 2022, February 21, 2022.

———. “Wawancara Dengan M. Zaini Di Musholla SMK Negeri 2 Denpasar.” Wawancara Penelitian Disertasi 2022, February 22, 2022.

Mahmudi. “Wawancara Dengan Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Pkl. 10. 00 Sampai 12.00 WITA Di Kantor Kepala Bidang

- Pendidikan Islam Kemenag Provinsi Bali,” February 16, 2022.
- Makarim, Nadiem Anwar. “Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/ M/ 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.” KEMENDIKBUDRISTEK, February 10, 2022.
- Margiyanto, Margiyanto. “Wawancara Dengan Margiyanto Selaku Guru SMKN 1 Denpasar Dan SMAN 7 Denpasar.” MGMP Guru PAI Denpasar, February 17, 2022.
- Media, Kompas Cyber. “Menag Sebut Mayoritas Muslim Indonesia Setuju dengan Pancasila.” KOMPAS.com, March 13, 2021.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/13/11584391/menag-sebut-mayoritas-muslim-indonesia-setuju-dengan-pancasila>.
- Muazaroh, Siti, and Subaidi Subaidi. “Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah).” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (2019): 17–33.
- Ogbu, John U. “Minority Education in Comparative Perspective.” *The Journal of Negro Education* 59, no. 1 (1990): 45–57.
- “OHCHR | SC Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights.” Accessed October 8, 2021.
<https://www.ohchr.org/en/hrbodies/sc/pages/subcommission.aspx>.

- Parker, Lyn, and Chang-Yau Hoon. "Secularity, Religion and the Possibilities for Religious Citizenship." *Asian Journal of Social Science* 41, no. 2 (2013): 150–74.
- Pendidikan Islam, Seksi. "Data Guru PAI." Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Denpasar, February 16, 2022.
- Raihani, Raihani. "A MODEL OF ISLAMIC TEACHER EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE IN INDONESIA: A Critical Pedagogy Perspective." *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 14, no. 1 (June 1, 2020): 163-186–186. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.1.163-186>.
- . *Creating Multicultural Citizens: A Portrayal of Contemporary Indonesian Education*. Routledge, 2014.
- Setiawan, Hendro. "Manusia Utuh. Sebuah Kajian Atas Pemikiran Abraham Maslow." Penerbit PT Kanisius, 2014.
- SMK Negeri 2 Denpasar, Bagian TU. "Dokumentasi Perangkat Pembelajaran SMK Negeri 2 Denpasar." SMK Negeri 2 Denpasar, February 22, 2022.
- Srimulyani, Eka, Marzi Afriko, M Arskal Salim, and Moch Nur Ichwan. "Diasporic Chinese Community in Post-Conflict Aceh: Socio-Cultural Identities, and Social Relations with Acehnese Muslim Majority." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (2018): 395–420.
- Sunarya, I. Ketut. "The Concept of Rwa Bhineda Kriya on the Island of Bali towards Jagadhita." *Wacana Seni Journal of Arts Discourse* 19 (2020): 47–60.

- Surani, Ninik. “Wawancara Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Oleh Ninik Surani Pada Pkl. 13.00 Sampai 15.30 WITA.” Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Denpasar, February 16, 2022.
- Surani, Ninik, Moh Zaini, Margiyanto, Nurkholis, Syamsuddin, and Alaika M. Bagus Kurnia PS. “Focus Group Discussion (FGD) Dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajara) PAI Kota Denpasar Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Ruang Bidang Pendidikan Islam Bersama Kepala Bidang Pendidikan Islam Kota Denpasar.” FGD MGMP PAI Kota Denpasar, February 17, 2022.
- Suyatno, Jumintono, Dholina Inang Pambudi, Asih Mardati, and Wantini. “Strategy of Values Education in the Indonesian Education System.” *International Journal of Instruction* 12, no. 1 (January 2019): 607–24.
- Syafi’i, Fahrian Firdaus. “MERDEKA BELAJAR: SEKOLAH PENGGERAK.” In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN DASAR*, 2022.
- SYAUQI, Ahmad. “Analisa Implementasi Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 Tentang Pemenuhan Anggaran Pendidikan 20 Persen.” PhD Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Umar, Ahmad, Kusaeri Kusaeri, Ali Ridho, Ahmad Yusuf, and Ahmad Hanif Asyhar. “Does Opportunity to Learn Explain the Math Score Gap between Madrasah and Non-Madrasah Students in Indonesia?” *Jurnal Cakrawala*

Pendidikan 41, no. 3 (September 30, 2022): 792–805.
<https://doi.org/10.21831/cp.v41i3.40169>.

Wahyuningsih, Nurnajmi, Ety Nurbayani, and Wildan Saugi. “Pengaruh Rasio Jumlah Siswa Dalam Kelas Terhadap Efektivitas Pembelajaran PAI Di SMK Farmasi Samarinda.” *Tarbiyah Wa Ta’lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 1 (2019): 47–61.

Warsah, Idi, Yusron Masduki, Imron Imron, Mirzon Daheri, and Ruly Morganna. “Muslim Minority in Yogyakarta: Between Social Relationship and Religious Motivation.” *QIJS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 7, no. 2 (2019): 367–98.

Wiratmaja, Cokorda Gede Anom. “Wawancara Dengan Kepala SMA Negeri 7 Denpasar.” Ruang Kepala SMA Negeri 7 Denpasar, February 21, 2022.

Yusuf, Achmad. “Pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Multikultural (Perspektif Psikologi Pembelajaran).” *Jurnal Al-Murabbi* 4, no. 2 (2019): 251–74.

Zaini, Muhammad. “Observasi Mata Pelajaran PAI Kelas X Di SMK Negeri 2 Denpasar.” SMK Negeri 2 Denpasar, Mei 2022.

BIOGRAFI PENULIS

Alaika M. Bagus Kurnia PS, putra dari Agus Fahmi Basyaiban dengan Tutik Zahrotul Amaliyah di Surabaya, pada tanggal 3 Juni 1992. Anak pertama dari tiga bersaudara dan menyandang gelar Doktor pada tahun 2023. Ia mengenyam pendidikan S1 program studi Pendidikan Agama Islam pada tahun 2011-2015 di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel Surabaya, kemudian melanjutkan studinya S2 pada tahun 2015 hingga 2017 juga di UIN Sunan Ampel Surabaya, dan kemudian menutup studinya pada tahun 2019 – 2023 pada program doktoral (S3) di UIN Sunan Ampel Surabaya. Beberapa karya nya baik jurnal maupun buku sudah terintegrasi di google scholar. Sebagaimana *Deradicalization of Religion Through Aswaja Course at Lamongan Islamic University* yang sudah terpublish di *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* (Sinta 3), *Deradicalization Model Through Islamic Education Curriculum in Indonesia, Spain, And Nigeria*, yang terpublish



pada jurnal Resmilitaris (Q4) juga pada tahun 2022. Dan banyak jurnal lagi yang terpublish pada tahun 2022. Semoga di tahun 2023 juga banyak jurnal yang terbit. Alek sapaan akrabnya berprofesi menjadi dosen tetap di Institut Kesehatan dan Bisnis Sunan Ampel Surabaya. Ia sering mengampu mata kuliah PAI dan ilmu sosial lainnya. Sehingga aktivitas sehari-harinya ialah mengajar di kampus